KOMDIGI

Lampung BALMON

LAPORAN KINERJA 2025



BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG

LAPORAN KINERJA

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung (Balmon Lampung) Tahun 2025 disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu instrumen dalam mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyajian informasi kinerja yang transparan dan terukur terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini memuat capaian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Balmon Lampung Tahun 2025 yang telah disepakati antara Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dengan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun pelaksanaan.

Pada Tahun 2025, Balmon Lampung menetapkan dua sasaran kegiatan utama, yaitu: (1) Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi; dan (2) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien. Kedua sasaran kegiatan tersebut menjadi indikator dalam menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan selama satu periode perencanaan. Uraian lebih lanjut mengenai capaian dan analisis terhadap sasaran kegiatan dimaksud disajikan secara rinci pada Bab III laporan ini.



Terdapat 13 indikator kinerja pada sasaran kegiatan "Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Layanan Telekomunikasi". Berikut ringkasan capaian untuk masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

IKSK 1: Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sasaran kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota memiliki target sebesar 80%. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Balmon Lampung yang memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 15 Kabupaten/Kota harus melakukan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio minimal di 12 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025 ini, realisasi kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota melampaui target pada bulan September, dan realisasi di bulan Desember sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Sehingga capaian kinerja sebesar **125%**.

IKSK 2: Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Indikator kinerja sasaran kegiatan pemeriksaan stasiun radio bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian data teknis dan data administrasi antara pengguna frekuensi radio *microwave link*, penyiaran dan pengguna lainnya di lapangan dengan data Izin Stasiun Radio (ISR). Pada tahun 2025 target indikator kinerja pemeriksaan stasiun radio ditetapkan sebesar 100%, realisasi kinerja pemeriksaan stasiun radio Balmon Lampung adalah 136%, sehingga capaian kinerja sebesar **143%**.

IKSK 3: Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator kinerja sasaran kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio ditargetkan sebesar 95% pada tahun 2025. Hal ini berarti 95% aduan gangguan frekuensi radio yang diterima harus terselesaikan. Realisasi penanganan gangguan spektrum frekuensi radio Balmon Lampung adalah sebesar 100% dimana seluruh aduan gangguan frekuensi yang diterima dapat terselesaikan. Terdapat sebanyak 10 aduan gangguan di wilayah kerja Balmon Lampung sepanjang tahun 2025 dan seluruhnya dapat terselesaikan. Sehingga capaian kinerja sebesar **105,26%**.

IKSK 4: Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Indikator kinerja sasaran Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital memiliki target sebesar 75%. Dengan empat komponen yaitu : Monitoring perangkat telekomunikasi dilaksanakan pada 80% kabupaten/kota di wilayah kerja UPT (sekurang-kurangnya 10 kabupaten/kota untuk UPT yang memiliki wilayah kerja lebih dari 13 kabupaten/kota). Termonitor tiga jenis perangkat prioritas yang wajib dimonitor, yaitu: (1) Wireless Access Point (WiFi Extender/Wireless Repeater Router), (2) Optical Line Terminal (OLT), dan (3) Handy Talky (HT). Jumlah merek/tipe perangkat yang ditargetkan untuk dimonitor sebanyak 300 merek/tipe, dengan tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi sebesar 100%.
Pada tahun 2025, realisasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut : realisasi monitoring pada 15 dari 15 kabupaten/kota (100%); realisasi monitoring 7 dari 16 jenis perangkat prioritas, yaitu HT, Pemancar FM, MW Link (IDU/ODU), Mobile Transceiver/Radio Rig, Optical Line Terminal (OLT), Wireless Access Point, dan Optical Network Terminal (ONT); realisasi 912 dari target 300 merk/tipe perangkat termonitor; serta realisasi penindakan 18 dari 18 pelanggaran APT yang seluruhnya telah dikenakan sanksi administrasi (100%), target terlampaui pada setiap bulan sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar **133%**.

IKSK 5: Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Indikator kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio pada UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung, yang meliputi stasiun portable, stasiun bergerak, dan stasiun tetap (*transportable*), ditetapkan dengan target capaian sebesar 85%. Pada Tahun 2025 indikator tersebut terealisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa operasional serta fungsi monitoring dari seluruh stasiun monitor frekuensi radio dapat terjaga dengan baik dan melampaui target yang telah ditetapkan, Sehingga capaian kinerja sebesar **115,2%.**

IKSK 6: Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif memiliki target sebesar 80%. Penanganan sanksi denda administratif merupakan tindak lanjut dari temuan pelanggaran

SFR dan APT dari semua kegiatan monitoring. Untuk invoice/tagihan yang dikeluarkan, jika ada denda yang belum terbayar setelah jatuh tempo, tindak lanjutnya berupa penyampaian Surat Reminder dan Klarifikasi UPT untuk Denda Belum Terbayar. Bobot Tindak Lanjut Invoice Berdasarkan Surat Reminder adalah Reminder 1 adalah 0,9; Reminder 2 adalah 0,8; Reminder 3 adalah 0.7; dan Pelimpahan KPKNL adalah 0,6. Pada Tahun 2025, terdapat 54 invoice yang dikeluarkan yang berasal dari 59 pelanggaran SFR. Semua invoice terbayar sebelum jatuh tempo, sehingga realisasi 100% terlampaui sejak bulan Maret 2025 sehingga capaian kinerja sebesar **125%**

IKSK 7: Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Indikator Kinerja Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan memiliki target sebesar 80% dari Kab/Kota di Provinsi Lampung (12 Kab/ Kota) dengan Realisasi sebesar 100% Pada Tahun 2025, sehingga Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung pada tahun 2025 untuk pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas layanan jaringan seluler mencapai 125%. Pengukuran kualitas layanan jaringan seluler dilakukan pada 15 Kab/ Kota.

IKSK 8: Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Indikator kinerja sasaran kegiatan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) ditargetkan sebesar 100%, dengan target Jumlah Kegiatan UNAR sebanyak 6 kegiatan, Bimtek SRC/LRC 1 kegiatan, dan pelaksanaan Bimtek IKRAN 1 Kegiatan. Realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah pelaksanaan Kegiatan UNAR sebanyak 7 kegiatan, Bimtek SRC/LRC 1 kegiatan, dan pelaksanaan Bimtek IKRAN 1 kegiatan, Sehingga capaian kinerja sebesar 108.3%.

IKSK 9: Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Indikator kinerja sasaran kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2025, Tahun 2025 target Perjanjian Kinerja (PK) 100% dari kegiatan Penanganan Piutang yang dihubungi (penyampaian surat tagihan ke masing-masing waba atau wajib bayar) sebanyak 297 surat tagihan dan pelaksanaan Koordinasi dengan KPKNL (berupa koordinasi dengan KPKNL dan pelaksanaan pengumpulan dokumen syarat penghapusan mutlak/PPNTO) sebanyak 7 (tujuh) kali kegiatan.Realisasi penyampaian piutang melalui Whatsapp melalui Hotline resmi Balmon Lampung, Telepon, Email dan diantar langsung.

Sebanyak 297 berkas (100%) dan pelaksanaan Koordinasi dengan KPKNL Setempat terkait progres penanganan piutang yang sudah dilimpahkan sebanyak 7 (tujuh) kali kegiatan (175%) sehingga Capaian PK = (100 % + 175%) / 2 = 137,5%.

IKSK 10: Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Indikator kinerja sasaran kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat ditargetkan sebesar 100% (1 kali kegiatan, minimal 50% dari wilayah layanan) . Realisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan wilayah layanan mencapai 15 kabupaten/kota wilayah Provinsi Lampung dimana target minimal 50% dari wilayah layanan. Dengan realisasi kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja sebesar 200%.

IKSK 11: Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dilakukan setiap triwulan, dengan 4 kali pelaksanaan. dimana hasil dari survei yang dilaksanakan memenuhi target sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK 12: Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik dilakukan setiap triwulan, dengan 4 kali pelaksanaan. dimana hasil dari survei yang dilaksanakan memenuhi target sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

IKSK - 13 Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Indikator kinerja sasaran kegiatan Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) ditargetkan sebesar 100% dari Jumlah ISR yang tidak sesuai. Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai atau Prima Aksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi) sebagai solusi perizinan melalui pembenahan data dan bisnis proses ISR yang mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Pada tahun 2025, realisasi kinerja Balmon Lampung adalah 100% dari target 100% Jumlah ISR yang tidak sesuai, sehingga capaian kinerja sebesar **100%**.

Terdapat 2 indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien”. Berikut ringkasan capaian indikatornya.

IKSK 1: Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2025

Pada tahun 2025 target indikator kinerja sasaran kegiatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan sebesar 86,95 mengacu pada indikator kinerja anggaran Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada Kementerian Komunikasi dan Digital. Nilai Kinerja Anggaran meliputi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dihitung menggunakan formula 50% Nilai Kinerja Perencanaan DIPA Baru + 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan (rata-rata DIPA Baru dan DIPA Lama). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diperoleh dari beberapa indikator yang menjadi dasar penilaian oleh Kementerian Keuangan, antara lain penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, Renkas/RPD, kesalahan SPM, retur SP2D, serta penyelesaian pagu minus belanja. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi e-Monev Kementerian Keuangan, capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung adalah 84,01 sehingga capaian kinerja dari target yang ditentukan sebesar **96,62%**.

IKSK 2 : Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

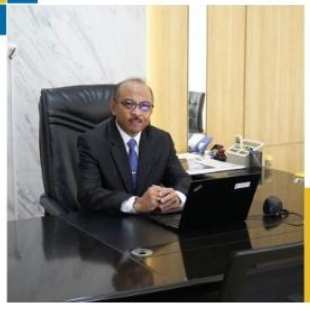
Pada tahun 2025 target indikator kinerja nilai kualitas pelaporan keuangan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) ditetapkan sebesar 97. Nilai capaian UAKPA diukur berdasarkan enam indikator yaitu jumlah transaksi koreksi audit, kesalahan penggunaan akun belanja modal/barang, saldo kas di bendahara akhir tahun, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke entitas pelaporan, hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan ke entitas pelaporan. Realisasi nilai UAKPA Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung tahun 2025 adalah sebesar 100 dari target yang telah ditentukan, sehingga capaian sebesar **103.09%**.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT senantiasa kami panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, yang berfungsi sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja selama satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini memuat berbagai informasi terkait kondisi dan pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung, khususnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Lampung. Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung di seluruh wilayah Provinsi Lampung, serta memberikan manfaat sebagai sumber informasi yang akuntabel dan transparan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Lampung Selatan, 31 Maret 2025



Muhammad Takdir
Kepala Balmon SFR Kelas II Lampung

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif iii
Kata Pengantar vii
Daftar Isi viii

BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3
1.3. Potensi dan Permasalahan Strategis 4
1.4. Sistematika Pelaporan 5

BAB II Perjanjian Kinerja
2.1. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 7
2.2. Sasaran Program 7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 7

BAB III Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi 10
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi 11
IKSK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota 11
IKSK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) 22
IKSK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan spektrum Frekuensi Radio 29
IKSK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital 39
IKSK-5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT 46
IKSK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif 52
IKSK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan 57
IKSK-8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) 62
IKSK-9 Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL 73
IKSK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik 80
IKSK-11 Persentase (%) Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) 86
IKSK-12 Persentase (%) Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) 91
IKSK-13 Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) 96
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien
IKSK-1 Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Tahun 2025 102
IKSK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) 106

BAB IV Penutup
Penutup 114



BALMON Lampung

2025

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Potensi dan Permasalahan Strategis
Sistematika Pelaporan

LATAR BELAKANG

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan pondasi utama dalam mendukung percepatan transformasi dan digitalisasi nasional. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur TIK perlu dijamin agar dapat diakses secara merata hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, sehingga berbagai aplikasi dan konten digital yang bermanfaat dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur TIK, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memprioritaskan penyediaan layanan internet cepat dan berkualitas, khususnya pada desa-desa yang belum terlayani serta pada berbagai lokasi layanan publik. Selain itu, upaya lain yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan digitalisasi penyiaran melalui program *Analog Switch Off* (ASO), pelaksanaan farming dan refarming spektrum frekuensi radio untuk mendukung penyediaan layanan internet yang lebih cepat dan berkualitas, serta penyusunan rencana implementasi teknologi 5G secara nasional.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital. Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan di bidang infrastruktur digital, pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur digital, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur digital, UPT Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas (*limited natural resources*) namun memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi, yaitu spektrum frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terencana, sistematis, dan terukur untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui penyampaian informasi secara komprehensif terkait proses dan hasil pelaksanaan kegiatan. Proses tersebut meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga evaluasi, sedangkan hasil yang dicapai lebih diarahkan pada pencapaian *outcome*.

Laporan Kinerja (Lakin) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, kegiatan, serta pengelolaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pemantauan, evaluasi, serta peningkatan kinerja organisasi, sekaligus menjadi media dalam menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan guna mendukung peningkatan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung di masa yang akan datang.



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALMON SFR KELAS II LAMPUNG

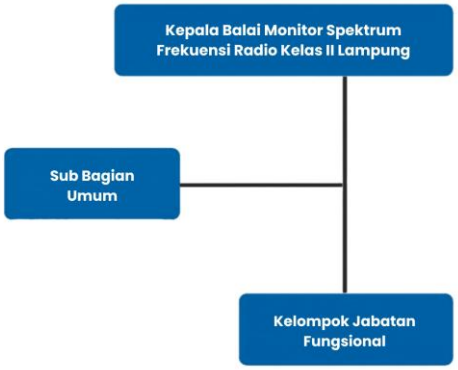
1. Balmon SFR Kelas II Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.
2. Balmon SFR Kelas II Lampung secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital dan Direktur Layanan Infrastruktur Digital.
3. Balmon SFR Kelas II Lampung mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi / perangkat telekomunikasi.

B. BALMON SFR KELAS II LAMPUNG MENYELENGGARAKAN FUNGSI

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
3. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
4. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
5. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio;
6. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
7. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
8. Pelaksanaan ujian amatir radio, dan
9. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

C. STRUKTUR ORGANISASI BALMON SFR KELAS II LAMPUNG

1. Kepala Balai Monitor
   Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio
2. Kepala Subbagian Umum
   Mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.
3. Ketua Tim Kerja
   Bertanggung jawab dalam merencanakan kegiatan, membagi tugas kepada anggota tim, memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil kerja tim.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
   Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang strategis sebagai gerbang utama Pulau Sumatera bagian selatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Posisi ini memberikan potensi besar bagi pengembangan infrastruktur digital, khususnya dalam mendukung konektivitas data, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi. Infrastruktur telekomunikasi yang terus berkembang juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam mempercepat transformasi digital di wilayah tersebut.

Dari sisi ketersediaan infrastruktur jaringan, pembangunan menara *Base Transceiver Station* (BTS) oleh operator telekomunikasi terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaringan telekomunikasi di Lampung secara umum telah menjangkau sebagian besar wilayah dan mendukung aktivitas digital masyarakat, termasuk sektor ekonomi, pariwisata, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, ketersediaan infrastruktur jaringan seluler juga didukung oleh penyediaan menara telekomunikasi di tingkat kabupaten.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur digital di Provinsi Lampung masih menghadapi sejumlah permasalahan strategis. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses jaringan telekomunikasi antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan atau daerah terpencil. Keterbatasan akses tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi, memasarkan produk, serta mengakses berbagai layanan publik berbasis digital.

Selain keterbatasan infrastruktur jaringan, tantangan lainnya berkaitan dengan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi data. Perkembangan teknologi jaringan bergerak seperti 4G dan 5G memerlukan alokasi spektrum frekuensi yang semakin besar dan efisien. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan spektrum yang optimal agar tidak menimbulkan interferensi frekuensi serta dapat menjamin kualitas layanan telekomunikasi di wilayah Lampung.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur digital karena didukung oleh posisi geografis yang strategis, pertumbuhan aktivitas digital masyarakat, serta ekspansi jaringan telekomunikasi oleh operator seluler. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian, antara lain ketimpangan akses jaringan di wilayah perdesaan, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertentu, serta kebutuhan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis melalui sinergi antara pemerintah pusat, UPT, pemerintah daerah, dan penyelenggara telekomunikasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur digital, meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi, serta memastikan pengelolaan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung transformasi digital di Provinsi Lampung.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam mendukung pengawasan dan pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai bagian dari infrastruktur digital nasional.

Adapun ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung meliputi:

1. Pendahuluan, yang memuat gambaran umum organisasi, aspek strategis, serta isu dan permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.
2. Perencanaan Kinerja, yang berisi ringkasan Perjanjian Kinerja pada tahun pelaporan.
3. Akuntabilitas Kinerja, yang menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
4. Penutup, yang memuat kesimpulan capaian kinerja serta langkah strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung penguatan infrastruktur digital.



Lampung
BALMON

2025

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis
Sasaran Program
Perjanjian Kinerja 2025

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang monitoring spektrum frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan rencana strategis tahun 2025–2029. Dukungan tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan yang selaras dengan misi Asta Cita serta program-program prioritas, dalam rangka mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Sejalan dengan mandat peraturan perundang-undangan serta arah kebijakan pembangunan nasional di bidang konektivitas digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berperan dalam mendukung peningkatan ketersediaan dan kualitas spektrum frekuensi radio. Upaya tersebut dilakukan untuk menunjang percepatan transformasi digital serta mendorong tersedianya perangkat digital nasional yang memenuhi standar teknis dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan spektrum frekuensi radio diharapkan dapat berjalan secara tertib, efisien, dan mampu mendukung penyelenggaraan infrastruktur digital yang andal dan berkelanjutan.

SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program pembangunan infrastruktur digital nasional pada periode 2025–2029. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, serta pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio secara efektif dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berkomitmen untuk memastikan pemanfaatan spektrum frekuensi radio berlangsung tertib, efisien, dan bebas dari gangguan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya sasaran program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, khususnya dalam mendorong meningkatnya *coverage broadband* yang menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga konektivitas digital dapat diakses secara merata oleh masyarakat serta memperkuat ekosistem transformasi digital nasional.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki peran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan infrastruktur digital. Peran tersebut diwujudkan melalui kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, sasaran kegiatan, serta target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada tahun 2025.

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio menjadi bagian penting dalam mendukung ketersediaan dan kualitas layanan jaringan telekomunikasi sebagai fondasi infrastruktur digital nasional. Adapun indikator kinerja sasaran kegiatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
		5. Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
		13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2025	86,95 (Nilai)
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97 (Nilai)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 5.739.075.000,-



Lampung BALMON

2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi
Sasaran Kegiatan 1
Sasaran Kegiatan 2

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome*, dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka, dan jumlah. Persentase pencapaian, rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan. Pengukuran kinerja Balmon Lampung tahun 2025 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dengan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital.

Seluruh Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang menjadi perjanjian kinerja kepala Balai Monitor SFR Kelas II Lampung di tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Balmon Lampung di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Target Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target 2025	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	100%	125%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	136%	136%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105.26%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133%
		5. Persentase (%) Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	85%	100%	115.2%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	80%	100%	125%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%	108,3%	108,3%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	137,5%	137,5%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
		11 .Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	100%

		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	100%
		13. Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2025	86,95	84,01	96.92%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09%

Sasaran Kegiatan 1.

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.

1. IKSK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Gambar 3.1
Kegiatan Monitoring Frekuensi Radio



1.1. Latar Belakang

Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di bagian paling bawah dari Pulau Sumatera yang memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota. Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melakukan monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di seluruh kabupaten/kota (100%), melampaui target yang ditetapkan sebesar 80% Kabupaten/Kota.

Monitoring frekuensi radio merupakan kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengamatan kepadatan pendudukan pita frekuensi radio sesuai dengan alokasinya baik pita High Frequency (HF), Very High Frequency (VHF), Ultra High Frequency (UHF) maupun super High frequency (SHF) secara rutin.
2. Monitoring penggunaan frekuensi radio pada pita-pita penerbangan, maritim, navigasi, marabahaya dan alokasi penting lainnya.
3. Melaksanakan *drive test* pita penyiaran radio, televisi dan pita seluler 800, 900, 1800, 2100, 2300 MHz (optional).
4. Mengidentifikasi penggunaan frekuensi radio yang berizin dan tanpa izin maupun penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta
5. Melakukan pengukuran okupasi 15 pita frekuensi radio sesuai penugasan.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio untuk melihat karakteristik penggunaan frekuensi radio dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka terciptanya tertib penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui jumlah pendudukan kanal spektrum frekuensi radio pada titik observasi yang diprediksi memiliki tingkat kepadatan frekuensi tinggi disertai dengan mengetahui legalitas dari stasiun pengguna spektrum frekuensi radio yang termonitor.

Didefinisikan sebagai pengukuran tingkat keterlaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio di seluruh kabupaten/kota wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung, mencakup ketercapaian cakupan wilayah dan pemenuhan subindikator monitoring. Tujuannya Mengukur konsistensi dan efektivitas pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio agar ketertiban penggunaan spektrum, kepatuhan izin, serta mitigasi potensi gangguan dapat terjaga di seluruh kabupaten/kota. Capaian IKSK-1 dinilai terpenuhi jika seluruh komponen berikut tercapai:

1. 80% kabupaten/kota termonitor.
2. 15 pita frekuensi radio dilakukan observasi dan identifikasi.
3. 60% ISR termonitor.
4. 80% hasil monitoring spektrum frekuensi radio teridentifikasi.

Penerima manfaat utama dari capaian IKSK-1 meliputi:

- Masyarakat pengguna layanan radio/telekomunikasi yang mendapatkan kualitas layanan lebih stabil.
- Penyelenggara layanan radio (penyiaran, maritim, penerbangan, bergerak darat) yang membutuhkan kepastian kanal dan kepatuhan regulasi.
- Pemerintah daerah dan instansi layanan publik yang membutuhkan komunikasi radio yang aman dan tertib.
- Balai Monitor sebagai pengelola teknis spektrum dalam penguatan pengawasan dan penegakan ketertiban.

1.2. Tabulasi Data Capaian

Penyajian data pada Tabel 3.2 di bawah ini merefleksikan lonjakan performa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung yang secara konsisten menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, fokus utama bukan sekadar pada pemenuhan tugas rutin, melainkan pada optimalisasi Capaian Kinerja yang berhasil menyentuh angka 125%.

Angka capaian 125% ini diperoleh dari realisasi pemantauan yang menjangkau seluruh wilayah kerja (100% atau 15 Kabupaten/Kota), sementara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) adalah sebesar 80%. Pelampauan target ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan telah melampaui standar minimal yang ditetapkan secara nasional.

Beberapa poin krusial yang mendasari tingginya angka capaian ini meliputi:

- Efektivitas identifikasi, berhasil mengidentifikasi 1.493 frekuensi (100%) dari total data yang termonitor, jauh melampaui target identifikasi minimal sebesar 80%.
- Volume pengawasan ISR, realisasi monitoring Izin Stasiun Radio (ISR) mencapai 1.493 stasiun, yang menunjukkan intensitas pengawasan administratif yang sangat tinggi dibandingkan target awal.
- Akselerasi teknologi, penggunaan aplikasi Report Online (ROL) terbukti memangkas waktu birokrasi pelaporan, sehingga proses pemantauan menjadi lebih cepat dan transparan.

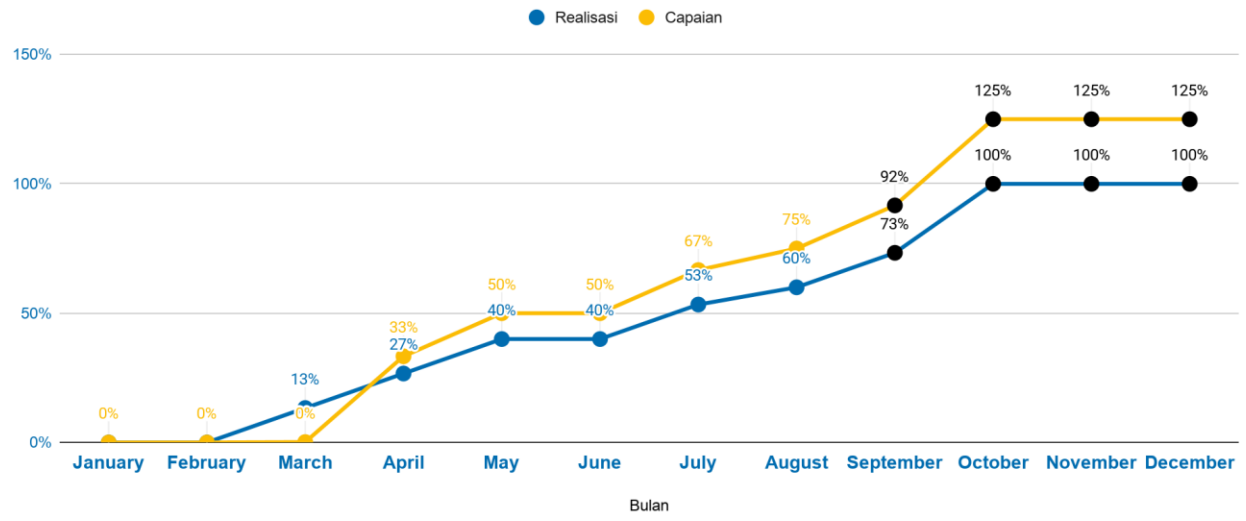
Tabel 3.2
Capaian IKSK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Sasaran kegaiatan	Indikator kinerja	2022		2023		2024		2025		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80 % Kab./ Kota	100 % Kab./Kota	100 % Kab./ Kota	100 % Kab./Kota	100 % Kab./ Kota	100 % Kab./Kota	80 % Kab./Kota	100%	125%

Indikator keberhasilan Balmon Lampung tahun 2025 terlihat pada terlampauinya capaian target monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio pada bulan Januari s.d Desember 2025 sebesar 125% dari target 80%. Trend waktu capaian kegiatan pemantauan frekuensi radio yang semakin efektif, cepat, dan transparan dengan adanya pengembangan dan sosialisasi penggunaan aplikasi Report Online (ROL).

Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan 18 kegiatan pemantauan frekuensi radio, adapun capaian PK pemantauan frekuensi radio di kabupaten/kota selama tahun 2025 terlihat pada grafik 3.1 berikut ini

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-1
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota



Perhitungan capaian indikator kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di suatu Kab/Kota, terdiri dari dua komponen. Komponen pertama adalah monitoring SFR di Kab/Kota yang terpenuhi jika tiga kriteria subindikator terlampaui, yaitu:

1. **Monitoring 15 pita frekuensi radio**
   Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor 334/DJID.6 /PR.01.02/03/2025 tanggal 03 Maret 2025 perihal Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Bidang Pengendalian Infrastruktur Digital dan Penjelasan terkait Pencapaian PK UPT Tahun 2025, terdapat 15 *subservice* / pita frekuensi radio yang harus dimonitor yaitu seperti terlihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
15 Subservice / Pita Frekuensi Radio Penugasan

No	Subservice	Pita Frekuensi (MHz)	Stepwidth		Measurement Time	Durasi
			R&S (Maks. Data Sampling 200.000)	R&S (Maks. Data Sampling 65.000)		
1	Radio FM, DRM *INS04	87 - 108	6.25 kHz	6.25 kHz	1 s	2 Jam
2	Penerbangan VHF *INS36	108 - 137				
3	Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik *INS04A *INS04B, Maritim VHF *INS36	137 - 174				
4	DRM, DAB *INS05	174 - 230				
5	Tetap *INS08B, Bergerak *INS08 *INS08A *INS08C *INS0D, Marabahaya *INS36	300 - 430				
6	Komrad UHF *INS11 *INS08C *INS08D	430 - 460				
7	Tetap, Bergerak *INS11 *INS12	460 - 470				
8	Televisi UHF *INS13B *INS13C, IMT *INS13	478 - 806		6.25 kHz		
9	Trunking *INS14, Downllink Seluler 800 *INS15	806 - 880				
10	Downlink Seluler 900 *INS16	925 - 960	100 kHz	100 kHz	1 s	10 Menit
11	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS17A	1427 - 1518				
12	Downlink Seluler 1800 *INS19	1805 - 1880				
13	Downlink Seluler 2100 *INS21A	2110 - 2170				
14	International Mobile Telecommunications (IMT) *INS22	2170 - 2200				
15	Seluler, Broadband 2.3 GHz *INS24	2300 - 2400				

Manual Pengukuran

I. Monitoring Pita Frekuensi Radio yang dilaksanakan menggunakan SMFR Tetap/Transportable dan/atau SMFR Jinjing/Bergerak di Kabupaten/Kota, dengan perhitungan capaian :

$$Capaian = \frac{Jumlah\ Kabupaten\ atau\ Kota\ Termonitor}{Total\ Kabupaten\ atau\ Kota\ di\ Wilayah\ Kerja\ UPT}$$

Dengan komponen perhitungan sebagai berikut :

1. 80% Kab/Kota Termonitor;
2. 15 Pita Frekuensi Radio Dilakukan Observasi dan Identifikasi;
3. 60% ISR Termonitor; dan
4. 80% Hasil Monitor SFR harus teridentifikasi

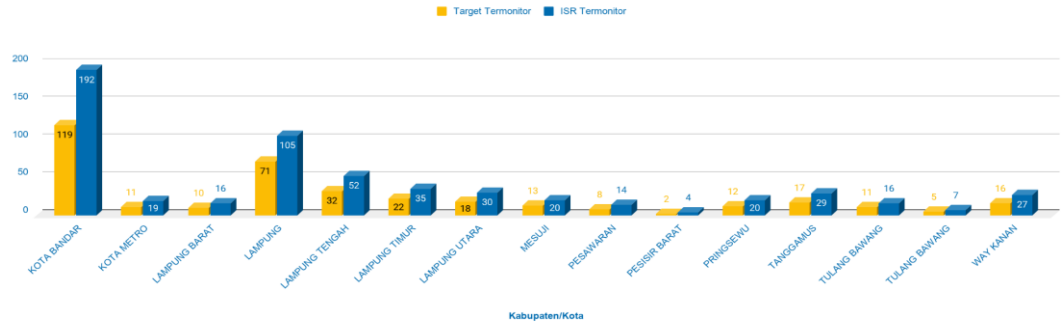
2. **Identifikasi 80% Pendudukan Frekuensi Radio yang termonitor**
   Target perjanjian kinerja terhadap hasil monitoring yang harus teridentifikasi adalah 80%. Sesuai hasil monitoring frekuensi radio yang dilaksanakan terdapat 1493 frekuensi radio yang termonitor dengan target teridentifikasi sebanyak 1194 frekuensi radio (80% x 1493). Data teridentifikasi sebanyak 1493 sehingga capaian tercapai 100%.

3. **Monitoring 60% Target ISR di Kab/Kota**
   Target jumlah ISR yang harus dimonitor adalah 60% dari 586 ISR, lokasi pengguna ISR ini tersebar di seluruh wilayah provinsi Lampung. Jumlah target tiap kabupaten/kota dan jumlah ISR yang termonitor dapat dilihat pada grafik 3.2. ISR yang menjadi target monitor dikhususkan pada ISR untuk layanan siaran dan bergerak darat.

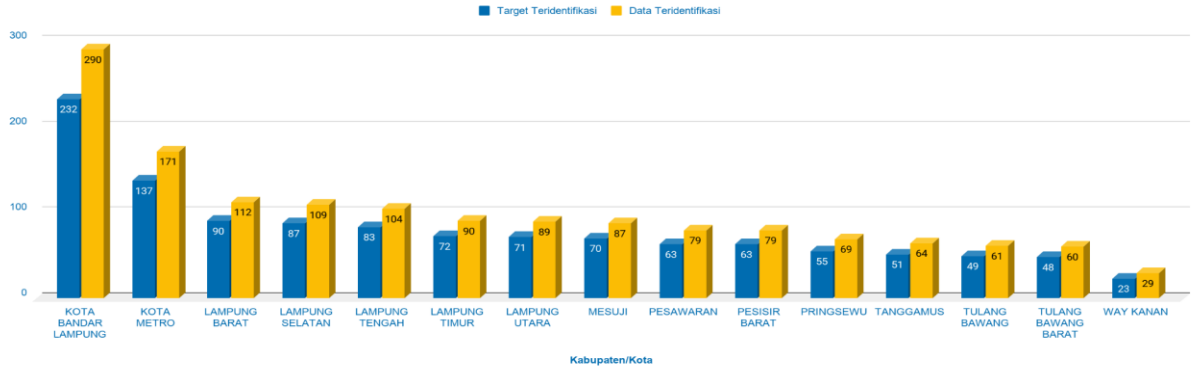
   Dengan berbagai keterbatasan baik dari sisi alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi stasiun radio pengguna ISR, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berhasil memonitor 1493 data ISR atau sebesar 100%.

Presentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota terdiri dari:

Grafik 3.2
Perbandingan Jumlah ISR Termonitor vs Target Monitoring



Grafik 3.3
Perbandingan Jumlah Frekuensi Teridentifikasi vs Target Identifikasi



1.3. Analisis Pencapaian Target Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
   Keberhasilan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio Tahun 2025 didukung oleh kompetensi dan profesionalisme SDM Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Personel yang terlibat mampu mengoperasikan perangkat monitoring, melakukan observasi, identifikasi, serta analisis penggunaan spektrum frekuensi radio secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dari keberhasilan memonitor sebanyak 1.493 stasiun radio dengan tingkat legalitas mencapai 98,19%.

2. Ketersediaan dan Keandalan Sarana dan Prasarana Monitoring
   Ketersediaan peralatan monitoring yang memadai dan berfungsi dengan baik, seperti spektrum analyzer, portable monitoring receiver, sistem monitoring ARGUS, serta stasiun monitor transportable dan stasiun bergerak, sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut memungkinkan pelaksanaan monitoring dilakukan secara efektif pada 18 kegiatan monitoring yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3. Dukungan Data dan Sistem Informasi yang Terintegrasi
   Pemanfaatan data perizinan frekuensi radio melalui database ISR, website ROL, serta sistem informasi pendukung lainnya berperan penting dalam mempercepat proses identifikasi dan analisis legalitas stasiun radio yang termonitor. Dukungan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan seluruh 1.493 data termonitor (100%) berhasil teridentifikasi, melampaui target identifikasi minimal sebesar 80%.

4. Perencanaan dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan yang Sistematis
   Pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio dilakukan berdasarkan perencanaan yang terstruktur, meliputi penentuan lokasi prioritas, waktu pelaksanaan, serta pita frekuensi yang dimonitor. Strategi ini mendukung pencapaian indikator kinerja utama, di mana realisasi ISR termonitor mencapai 586 ISR dari target 367 ISR (60%), atau mencapai lebih dari 140% dari target yang ditetapkan.

5. Koordinasi dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan
   Koordinasi yang baik dengan penyelenggara telekomunikasi, pengguna spektrum frekuensi radio, serta instansi terkait di daerah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring. Kerja sama ini mempermudah proses klarifikasi, verifikasi data, serta penanganan terhadap 27 temuan pelanggaran yang teridentifikasi selama Tahun 2025.

6. Komitmen terhadap Kepatuhan Regulasi dan Peningkatan Kinerja
   Komitmen seluruh jajaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi faktor utama keberhasilan kegiatan monitoring. Evaluasi hasil kegiatan secara berkelanjutan mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring dan tercapainya seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran objektif mengenai posisi capaian Balmon Lampung di tingkat nasional, dilakukan tinjauan komparatif dengan Balmon Manado sebagai mitra benchmark yang memiliki tipologi performa serupa. Berdasarkan evaluasi capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dan Balai Monitor Kelas II Manado menunjukkan performa strategis yang solid dengan melampaui target nasional sebesar 80%. Keduanya berhasil melakukan monitoring di seluruh wilayah kerja masing-masing (100% Kabupaten/Kota) dengan nilai capaian akhir mencapai 125%. Meskipun secara persentase identik, terdapat perbedaan tipis pada fokus operasional; Balmon Lampung unggul dalam volume pengawasan Izin Stasiun Radio (ISR) yang mencapai 1.493 stasiun, sementara Balmon Manado mencatatkan angka identifikasi pancaran frekuensi yang lebih padat yakni sebanyak 7.424 frekuensi.

Secara operasional, Balmon Lampung menitikberatkan pada validasi legalitas penggunaan spektrum melalui sistem monitoring ARGUS dan stasiun transportable untuk memastikan kepatuhan 1.493 ISR. Di sisi lain, Balmon Manado menghadapi tantangan geografis kepulauan dengan melakukan efisiensi personel lapangan (3 orang per tim) namun tetap mampu menindaklanjuti 62 temuan pelanggaran. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Balmon Lampung memiliki beban administratif ISR yang lebih besar, sedangkan Balmon Manado menghadapi dinamika pendudukan kanal frekuensi yang lebih kompleks di lapangan.

Parameter Indikator (IK-1)	Balai Monitor Lampung	Balai Monitor Manado
Target Wilayah (Kab/Kota)	15 Wilayah	15 Wilayah
Realisasi Monitoring	100% (15 Kab/Kota)	100% (15 Kab/Kota)
Persentase Capaian IK-1	125%	125%
Jumlah ISR Termonitor	1.493 ISR	415 ISR
Frekuensi Teridentifikasi	1.493 Frekuensi	7.424 Frekuensi
Tindak Lanjut Pelanggaran	27 Temuan	62 Temuan
Pita Frekuensi (Subservice)	15 Subservice	15 Subservice

1.4. Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

Dalam pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menghadapi sejumlah tantangan dinamis yang menuntut penyesuaian strategi di lapangan. Berikut adalah identifikasi kendala serta langkah percepatan yang telah diambil:

A. Kendala dan Hambatan

- Disparitas volume target dan beban kerja. Terdapat beban kerja yang sangat tinggi dalam melakukan validasi dan identifikasi terhadap 1.493 data ISR di 15 Kabupaten/Kota. Jumlah ini jauh melampaui rata-rata beban kerja wilayah lain dengan klasifikasi yang sama, sehingga menekan kapasitas sumber daya manusia dan operasional.
- Kondisi geografis dan aksesibilitas. Luasnya wilayah kerja di Provinsi Lampung dengan karakteristik geografis yang beragam seringkali menghambat mobilitas tim stasiun transportable untuk mencapai titik observasi optimal, terutama pada wilayah-wilayah dengan infrastruktur jalan yang terbatas.
- Ketergantungan infrastruktur teknologi. Kompleksitas sistem pemantauan (ARGUS dan perangkat spectrum analyzer) memerlukan pemeliharaan rutin yang ketat. Kendala teknis kecil pada perangkat keras atau perangkat lunak di lapangan berpotensi mengganggu ritme pengumpulan data yang terjadwal.
- Tingkat pelanggaran di lapangan. Masih ditemukannya 27 temuan pelanggaran menunjukkan bahwa edukasi regulasi kepada pengguna frekuensi belum sepenuhnya merata. Proses klarifikasi dan penindakan terhadap temuan ini menyerap alokasi waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk akselerasi pemantauan rutin.

B. Upaya Percepatan Capaian Target

- Digitalisasi pelaporan melalui Report Online (ROL). Mengakselerasi birokrasi pelaporan dengan memangkas waktu entri data secara manual. Hal ini memungkinkan data hasil monitoring langsung terintegrasi dan siap divalidasi secara real-time.
- Optimasi manajemen rute monitoring. Melakukan pemetaan ulang rute perjalanan dinas berdasarkan kepadatan ISR. Dengan pengelompokan titik pantau yang strategis, tim mampu menjangkau lebih banyak lokasi dalam satu siklus perjalanan, sehingga capaian mampu menembus angka 125%.
- Peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi tim. Melakukan pembagian peran yang spesifik dalam tugas identifikasi dan observasi. Fokus pada spesialisasi ini terbukti meningkatkan kecepatan proses identifikasi frekuensi hingga mencapai 100% dari total data yang termonitor.
- Preventif melalui monitoring jarak jauh. Memaksimalkan penggunaan stasiun pemantau tetap (fixed station) untuk melakukan observasi awal sebelum tim terjun ke lapangan, sehingga kegiatan lapangan menjadi lebih terarah dan efisien.

C. Dampak Langsung

Tindak lanjut dan inovasi yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio Tahun 2025 meliputi:

- Meningkatnya kualitas layanan komunikasi radio dan telekomunikasi karena penggunaan frekuensi radio menjadi lebih tertib dan sesuai peruntukannya.
- Berkurangnya potensi interferensi atau gangguan frekuensi yang dapat menghambat komunikasi penting, khususnya pada layanan penerbangan, maritim, keselamatan, dan komunikasi publik.
- Meningkatnya kepastian hukum dan kepatuhan penggunaan frekuensi radio melalui identifikasi serta penindakan terhadap penggunaan frekuensi tanpa izin maupun yang tidak sesuai ketentuan.
- Terjaganya keandalan komunikasi pada instansi layanan publik dan pemerintah daerah yang menggunakan sistem komunikasi radio dalam operasional sehari-hari.
- Meningkatnya rasa aman masyarakat terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi karena adanya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan alat/perangkat yang tidak sesuai regulasi.

D. Dampak Tidak Langsung

Selain dampak langsung, kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio juga memberikan dampak tidak langsung yang mendukung pembangunan sektor komunikasi dan pelayanan publik secara berkelanjutan, antara lain:

- Mendorong terciptanya ekosistem penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Lampung.
- Mendukung stabilitas layanan telekomunikasi yang menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, dan pelayanan masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna spektrum frekuensi radio terhadap pentingnya kepatuhan regulasi dan legalitas penggunaan frekuensi radio.
- Mendukung proses transformasi digital dan konektivitas daerah melalui pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio yang optimal.
- Memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap peran pemerintah dalam menjaga keteraturan serta kualitas layanan komunikasi radio dan telekomunikasi.
- Menjadi dasar data dan informasi bagi pengambilan kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

1.5. Tindak Lanjut dan Inovasi dari Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut dan inovasi yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio Tahun 2025 meliputi:

1. Evaluasi Hasil Monitoring Secara Berkelanjutan
   Dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan berikutnya. Evaluasi ini mencakup analisis capaian kegiatan monitoring di 15 kabupaten/kota, efektivitas pelaksanaan 18 kegiatan monitoring, serta kesesuaian hasil monitoring dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan Efektivitas Identifikasi dan Analisis Spektrum Frekuensi Radio
   Upaya inovasi dilakukan melalui optimalisasi proses observasi dan identifikasi spektrum frekuensi radio dengan memanfaatkan perangkat monitoring dan sistem informasi yang tersedia. Pendekatan ini berhasil meningkatkan akurasi identifikasi, yang ditunjukkan dengan capaian 100% data termonitor berhasil teridentifikasi (1.493 data), melampaui target minimal sebesar 80%.

3. Optimalisasi Pemantauan dan Pengendalian ISR
   Tindak lanjut terhadap pemantauan Izin Stasiun Radio (ISR) dilakukan dengan memperkuat pengendalian dan validasi data ISR pada setiap kegiatan monitoring. Hasilnya, realisasi 586 ISR termonitor berhasil dicapai dari target 367 ISR (60%), atau mencapai lebih dari 140%, dengan seluruh kabupaten/kota berstatus “Tercapai”.

4. Penyempurnaan Tindak Lanjut terhadap Temuan Pelanggaran
   Terhadap 27 temuan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yang teridentifikasi selama Tahun 2025, dilakukan tindak lanjut berupa klarifikasi, pembinaan, serta penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan persuasif dan edukatif diterapkan guna meningkatkan kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio.

5. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
   Koordinasi dan kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi, pengguna frekuensi radio, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya terus diperkuat sebagai bagian dari tindak lanjut hasil monitoring. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan serta memastikan rekomendasi hasil monitoring dapat ditindaklanjuti secara efektif.

6. Pengembangan Inovasi Administrasi dan Pelaporan Monitoring
   Inovasi juga dilakukan dalam aspek administrasi dan pelaporan hasil monitoring spektrum frekuensi radio melalui penyempurnaan format dokumentasi dan penyajian data hasil monitoring. Penyusunan laporan yang lebih sistematis dan berbasis data diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi serta mendukung evaluasi dan pengambilan kebijakan pada kegiatan monitoring di tahun berikutnya.

1.6. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun target melampaui angka 125%, terdapat beberapa area krusial yang memerlukan perbaikan sistematis agar performa tinggi ini tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas teknis maupun kesejahteraan sumber daya manusia:

- Kalibrasi dan eskalasi target kinerja. Mengingat realisasi monitoring mencapai 125% dan identifikasi mencapai 100%, Balai Monitor perlu melakukan kaji ulang terhadap baseline target tahun 2026. Target minimal 80% terbukti terlalu "aman" bagi kapabilitas tim saat ini, sehingga diperlukan eskalasi target yang lebih menantang untuk mencegah stagnasi produktivitas.
- Penguatan program sosialisasi preventif. Adanya 27 temuan pelanggaran sepanjang tahun 2025 mengindikasikan perlunya pergeseran strategi dari sekadar penindakan (reaktif) menjadi edukasi regulasi yang lebih masif (preventif) kepada pengguna spektrum frekuensi di wilayah Lampung.
- Modernisasi manajemen aset dan pemeliharaan. Dengan volume kerja yang sangat tinggi (memonitor 1.493 stasiun dibandingkan target awal 367 ISR), beban kerja perangkat ARGUS dan stasiun transportable meningkat drastis. Rekomendasinya adalah menyusun jadwal pemeliharaan preventif yang lebih ketat guna menghindari kegagalan sistem di tengah padatnya jadwal operasional.
- Peningkatan kualitas identifikasi mandiri. Meskipun identifikasi mencapai 100%, disarankan untuk terus memperbarui database lokal dan melakukan pelatihan analisis sinyal digital guna menghadapi dinamika teknologi frekuensi yang semakin kompleks di masa depan.

1.7. Efisiensi (Efisiensi Sumber Daya yang Berhasil Dilakukan)

Selama periode 2025, Balai Monitor Lampung berhasil melakukan efisiensi operasional yang signifikan dengan mengubah pendekatan kerja dari konvensional menjadi berbasis teknologi dan pemetaan strategis. Efisiensi ini diukur melalui parameter kuantitatif sebagai berikut:

- Efisiensi output vs input (SDM & perangkat). Dengan sumber daya yang ada, Balmon Lampung mampu memonitor 1.493 ISR, yang berarti mencapai 406% dari target awal sebesar 367 ISR. Sebagai perbandingan, volume ini jauh lebih tinggi dari Balmon Manado yang memonitor 415 ISR dengan tipologi wilayah yang setara.
- Efisiensi waktu melalui inovasi digital. Implementasi aplikasi Report Online (ROL) berhasil memangkas proses birokrasi pelaporan manual. Dampaknya, data hasil 18 kegiatan monitoring dapat terintegrasi secara real-time, memungkinkan identifikasi 1.493 frekuensi (100%) dilakukan dengan durasi yang lebih singkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Optimasi jangkauan wilayah. Melalui manajemen rute yang sistematis, cakupan monitoring berhasil mencapai 100% wilayah (15 Kabupaten/Kota) hanya dengan 18 kali pelaksanaan kegiatan lapangan. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan logistik kendaraan dan bahan bakar per titik observasi dibandingkan jika dilakukan tanpa pemetaan rute yang terstruktur.
- Kualitas capaian akhir. Efisiensi sistem manajemen terbukti dengan raihan Capaian Kinerja 125% dan penghargaan Juara 1 Nasional DIGIWAVE 2025. Pencapaian ini membuktikan bahwa efisiensi proses tidak mengurangi kualitas output, melainkan justru memperkuat akuntabilitas kinerja instansi.

1.8. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Implementasi nilai-nilai BerAKHLAK dalam kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio Tahun 2025 diwujudkan melalui:

1. Berorientasi Pelayanan

   Pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna spektrum frekuensi radio. Petugas memberikan penjelasan yang informatif dan edukatif terkait ketentuan perizinan, penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, serta standar alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, khususnya pada pelaksanaan 18 kegiatan monitoring di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

2. Akuntabel

   Seluruh tahapan kegiatan monitoring dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan didukung dengan dokumentasi, pencatatan hasil monitoring, serta penyusunan laporan berbasis data, termasuk rekapitulasi hasil monitoring terhadap 1.493 stasiun radio dan tindak lanjut atas 27 temuan pelanggaran yang teridentifikasi selama Tahun 2025.

3. Kompeten

   Personel yang terlibat dalam kegiatan monitoring memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi yang memadai dalam penggunaan spektrum frekuensi radio. Kompetensi tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja, antara lain realisasi 586 ISR termonitor dari target 367 ISR, serta capaian identifikasi data termonitor sebesar 100%, melampaui target yang ditetapkan.

4. Harmonis

   Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, terjalin hubungan kerja yang harmonis antaranggota tim serta dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati mendukung kelancaran pelaksanaan monitoring di lapangan dan meminimalkan potensi hambatan selama kegiatan berlangsung.

5. Loyal

   Seluruh personel menunjukkan loyalitas dengan menjunjung tinggi integritas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta komitmen dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio secara profesional demi kepentingan organisasi dan negara.

6. Adaptif

   Petugas monitoring mampu beradaptasi terhadap dinamika lapangan, kondisi geografis yang beragam, serta perkembangan teknologi dan penggunaan spektrum frekuensi radio. Kemampuan adaptif ini mendukung optimalisasi pelaksanaan monitoring di berbagai wilayah dan situasi sepanjang Tahun 2025.

7. Kolaboratif

   Pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar unit kerja, dengan penyelenggara telekomunikasi, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini berperan penting dalam mendukung proses identifikasi, klarifikasi, serta tindak lanjut hasil monitoring secara efektif dan berkelanjutan

1.9. Bukti Dukung

Capaian kinerja monitoring spektrum frekuensi radio Tahun 2025 semakin diperkuat dengan diraihnya Juara 1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Terbaik di ajang DIGIWAVE 2025 pada. Penghargaan ini mencerminkan konsistensi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam menjaga cakupan monitoring 100% kabupaten/kota, ketepatan identifikasi hasil monitoring, serta tindak lanjut temuan

yang efektif. Pencapaian ini juga menjadi bukti bahwa proses kerja, kompetensi SDM, dan dukungan sarana prasarana telah berjalan optimal dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Gambar 3.2
Pencapaian Balmon Lampung dalam Monitoring Penggunaan SFR



Gambar 3.3
Kegiatan Pemantauan SFR Kab/Kota



2. IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

2.1 Latar Belakang

Kegiatan pemeriksaan stasiun radio (Inspeksi) penggunaan frekuensi radio merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan bahwa data pengguna frekuensi radio yang digunakan di lapangan sesuai dengan ketentuan/memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan pada Izin Stasun Radio (ISR). Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi, untuk mewujudkan terciptanya tertib penggunaan frekuensi radio dan tertib perangkat telekomunikasi. Selain itu dengan ditemukan pelanggaran, maka dapat berakibat pada timbulnya gangguan yang merugikan terhadap pengguna frekuensi radio lainnya bahkan dapat menyebabkan kerugian negara berupa penggunaan frekuensi radio tanpa izin, penggunaan daya pancar dan lebar pita yang melebihi ketentuan, sehingga tidak sesuainya pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang merupakan Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP). Ada tiga sub indikator pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio, yaitu pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link*, pengukuran stasiun penyiaran radio dan televisi, serta kegiatan pemantauan alat/perangkat telekomunikasi

2.2 Tabulasi Data Capaian

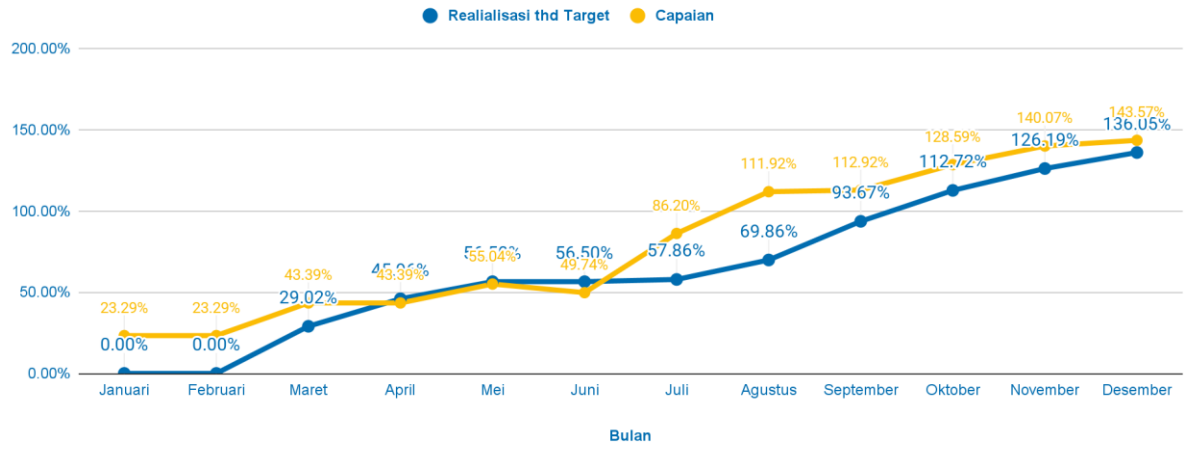
Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Capaian IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pemeriksaan Stasiun Radio	98%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	136%

Pada tahun 2025, indikator pemeriksaan stasiun radio telah tercapai target 100 % pada bulan Oktober 2025. Persentase realisasi tahun 2025 adalah 136.05%.

Grafik 3.4
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)



Persentase (%) pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio diukur dengan menghitung persentase kegiatan *remote site*, inspeksi *open shelter* dan juga stasiun siaran, dengan rumusan perhitungannya sebagai berikut:

$$\%\ Inspeksi\ MWLink = \frac{Jumlah\ pemeriksaan\ stasiun\ radio + Data\ tindak\ lanjut\ temuan\ pelanggaran\ dikenakan\ sanksi}{Total\ data\ target\ pemeriksaan + total\ data\ pelanggaran\ pemeriksaan\ stasiun\ radio}\ x\ 100\%$$

Target kinerja remote site adalah 80% dari target data sampling dan open shelter 60% dari target data sampling yang ditetapkan Dit Pengendalian Ditjen ID.

$$\%\ Stasiun\ Siaran\ FM = \frac{Jumlah\ stasiun\ siaran\ FM\ yang\ diperiksa + data\ tinjut\ pelanggaran\ yang\ dikenakan\ sanksi}{Total\ data\ target\ pemeriksaan\ stasiun\ radio\ FM + Total\ data\ pelanggaran}\ x\ 100\%$$

Target kinerja pemeriksaan stasiun radio siaran FM adalah seluruh radio untuk UPT dengan ISR < 50, dan minimal 50 stasiun radio FM untuk UPT dengan ISR > 50.

$$\%\ Stasiun\ Siaran\ Mux\ TV\ Digital = \frac{Jumlah\ stasiun\ Mux\ TV\ Digital\ yg\ diperiksa + data\ tinjut\ pelanggaran\ yang\ dikenakan\ sanksi}{Total\ data\ target\ pemeriksaan\ Mux\ TV\ Digital + Total\ data\ pelanggaran}\ x\ 100\%$$

Target kinerja pemeriksaan stasiun Mux TV Digital adalah seluruh Mux TV Digital untuk UPT dengan ISR < 20, dan minimal 20 stasiun radio FM untuk UPT dengan ISR > 20.

Perhitungan capaian Pemeriksaan Stasiun Radio menggunakan rumus berikut:

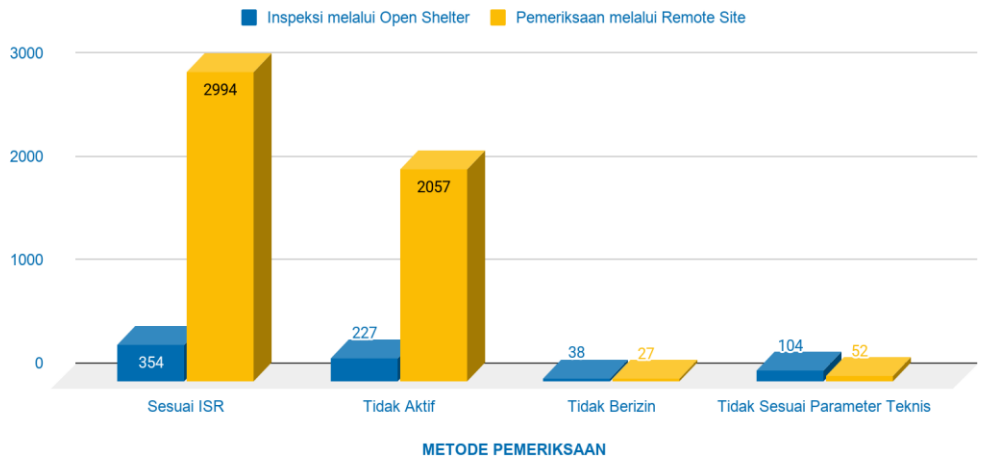
$$\%\ Capaian\ Pemeriksaan\ Stasiun\ Radio = \frac{\%\ Remote\ Site + \%\ Open\ Shelter + Stasiun\ Siaran\ FM + Stasiun\ Siaran\ Mux\ TV\ Digital}{4}$$

Perhitungan capaian masing - masing bagian dari komponen pemeriksaan stasiun radio adalah sebagai berikut:

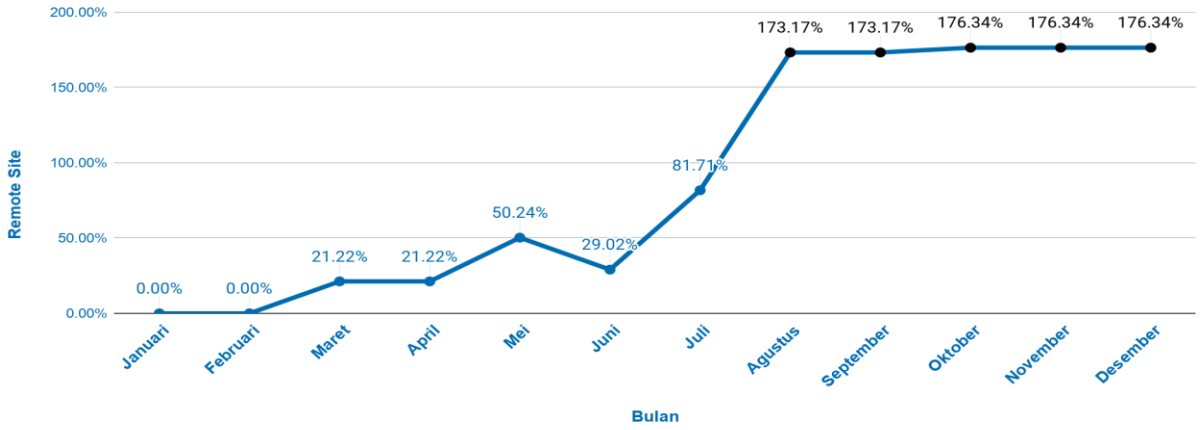
A. Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link

Rekapitulasi hasil pemeriksaan stasiun radio microwave link yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.6, 3.7, dan 3.8 berikut ini:

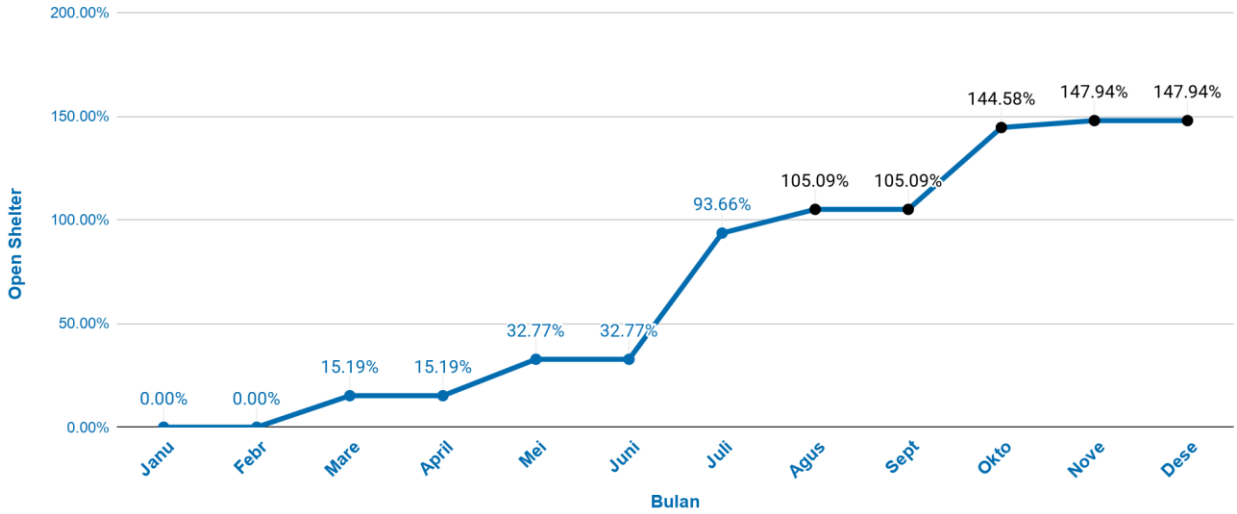
Grafik 3.5
Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link



Grafik 3.6
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (Remote Site)
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)



Grafik 3.7
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2 (Open Shelter)
Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)



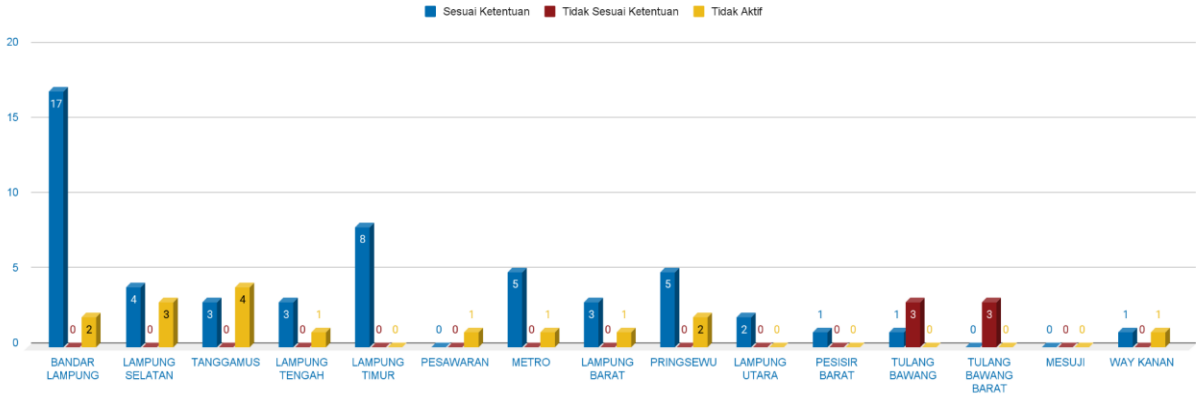
Gambar 3.4
Kegiatan Pemeriksaan Microwave Link



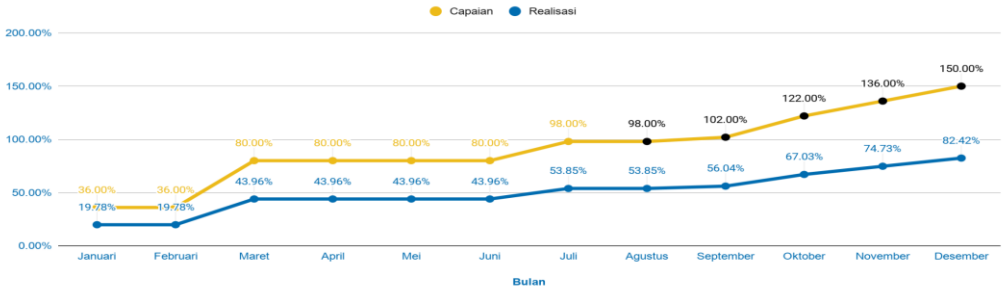
B. Komponen Pengukuran Stasiun Siaran

Pengukuran stasiun radio dinas siaran bertujuan untuk memastikan kesesuaian parameter teknis dan administrasi stasiun radio dengan data ISR. Hasil pengukuran stasiun radio dinas siaran di Lampung dapat dilihat pada Grafik 3.9

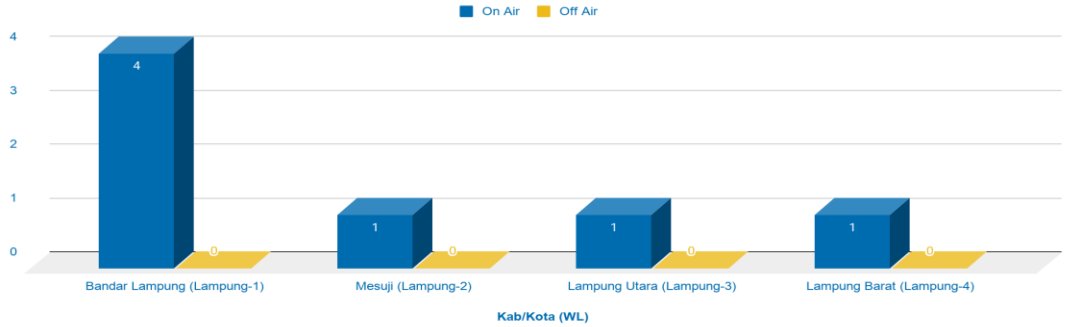
Grafik 3.8
Rekapitulasi Hasil Pengukuran Stasiun Siaran di Provinsi Lampung



Grafik 3.9
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2
Komponen Pemeriksaan Stasiun Radio Bagian Pengukuran Stasiun Siaran



Grafik 3.10
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-2
Hasil Pengukuran TV Digital wilayah Provinsi Lampung



Pada tahun 2025 ini, telah tercapai target pengukuran stasiun siaran FM sebesar 50 ISR stasiun siaran pada bulan Juli 2025. Sedangkan untuk target pengukuran stasiun siaran TV Digital tercapai 100% pada bulan November 2025.

2.3 Analisis Pencapaian Target

Pada tahun 2025, capaian indikator kinerja IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 136,05%, sehingga capaian kinerja mencapai 143% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio tidak hanya berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampaui target tersebut secara signifikan.

Tingginya capaian kinerja ini dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio, khususnya pada pemeriksaan microwave link yang berhasil merealisasikan pemeriksaan sebanyak 5.923 ISR dari target 3.925 ISR. Selain itu, kegiatan pengukuran parameter teknis stasiun siaran radio FM dan televisi digital juga berhasil dilaksanakan terhadap seluruh target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan yang terencana dengan baik, dukungan kompetensi personel, ketersediaan data ISR yang memadai, serta koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya kinerja tersebut.

a. Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Berikut contoh benchmarking IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) Tahun 2025 antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado:

Aspek Perbandingan	Balmon SFR Kelas II Lampung	Balmon SFR Kelas II Manado
Target Indikator Kinerja	100%	100%
Capaian Kinerja	143% (realisasi 136%)	Melampaui target 100%
Target ISR Microwave Link	3.925 ISR	2.349 ISR
Realisasi Pemeriksaan ISR Microwave Link	5.923 ISR	2.749 ISR
Status ISR Microwave Link	3.348 sesuai ISR, 2.284 tidak aktif, 156 tidak sesuai parameter teknis, 135 tidak berizin	858 sesuai ISR, 1.891 tidak aktif
Pemeriksaan Radio FM	75 stasiun terukur (53 on air, 16 off air, 6 tidak sesuai ketentuan)	37 stasiun dari 37 target (100%)
Pemeriksaan TV Digital	4 dari 4 stasiun TV Digital terukur (100%)	8 dari 8 MUX terukur (100%)

Capaian ini juga menunjukkan posisi kinerja yang kompetitif apabila dibandingkan dengan UPT lainnya, sebagaimana disajikan pada bagian benchmarking. Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung memiliki jumlah pemeriksaan ISR yang lebih tinggi dibandingkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado, yaitu 5.923 ISR dibandingkan 2.749 ISR. Selain itu, Balmon Lampung juga mengidentifikasi variasi status ISR yang lebih beragam, termasuk temuan perangkat yang tidak sesuai parameter teknis serta perangkat yang tidak berizin, yang menunjukkan tingkat kedalaman verifikasi lapangan yang lebih komprehensif.

Sementara itu, pada pemeriksaan stasiun radio siaran, kedua UPT berhasil merealisasikan 100% pengukuran terhadap seluruh target stasiun radio dan TV digital. Balmon Manado melakukan pengukuran terhadap 37

stasiun radio FM dan 8 MUX TV Digital, sedangkan Balmon Lampung melakukan pengukuran terhadap 75 stasiun radio FM serta 4 stasiun TV digital. Secara keseluruhan, hasil benchmarking menunjukkan bahwa Balmon Lampung unggul dari sisi jumlah pemeriksaan ISR dan variasi temuan, sedangkan Balmon Manado menunjukkan konsistensi pencapaian target pemeriksaan pada seluruh stasiun siaran yang menjadi sasaran pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan frekuensi radio di masing-masing wilayah kerja.

2.4 Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio antara lain:

1. Kompetensi Personel
   Personel yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio memiliki keahlian dan kemampuan teknis yang memadai serta memahami standar dan regulasi yang berlaku.

2. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan
   Pelaksanaan kegiatan inspeksi melibatkan berbagai pihak seperti operator, regulator, maupun pemilik stasiun radio. Koordinasi yang baik dengan para pihak tersebut mempermudah proses pemeriksaan dan verifikasi data teknis.

3. Ketersediaan Data dan Informasi
   Data dan informasi yang lengkap, seperti database SIMS/ISR, data parameter teknis stasiun radio, serta spesifikasi teknis perangkat pemancar, sangat membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.

B. Strategi Pelaksanaan Kegiatan

Strategi kegiatan meliputi perencanaan yang matang, persiapan peralatan dan bahan yang diperlukan, pembagian tugas personel, penentuan lokasi pemeriksaan dan pengukuran, serta evaluasi kegiatan untuk mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang.

C. Dampak Langsung

- Diperolehnya data teknis faktual dari stasiun Microwave Link (frekuensi Tx/Rx, lebar pita, daya pancar, polarisasi, dan perangkat) melalui metode remote site dan open shelter, serta parameter stasiun siaran FM (frekuensi tengah, bandwidth kanal 300 kHz, deviasi frekuensi ≤ 75 kHz, toleransi frekuensi 2000 Hz, dan kuat medan).
- Penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih tertib dan sesuai peruntukannya, sehingga secara langsung menaikkan kualitas layanan komunikasi radio dan telekomunikasi di masyarakat.
- Potensi tabrakan frekuensi (interferensi) antara lembaga penyiaran (swasta, publik, komunitas) maupun pengguna Microwave Link dapat langsung dipetakan dan dicegah.
- Berkurangnya gangguan frekuensi secara signifikan pada sektor-sektor krusial yang menyangkut keselamatan jiwa dan layanan publik, khususnya pada layanan penerbangan, maritim, keamanan/keselamatan, dan komunikasi kebencanaan.
- Ditemukannya ketidaksesuaian antara data pengguna di lapangan dengan kriteria yang ditetapkan pada Izin Stasiun Radio (ISR) maupun Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR).
- Terdeteksinya penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin, serta penggunaan daya pancar dan lebar pita yang melebihi batas ketentuan teknis.
- Tersinkronisasinya data teknis eksisting di lapangan dengan basis data SIM-S, sehingga data perizinan menjadi valid dan mutakhir.

D. Dampak Tidak Langsung

- Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen para pengguna spektrum frekuensi radio (baik instansi, swasta, maupun komunitas) mengenai pentingnya legalitas perizinan serta pemenuhan standar teknis operasional.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap peran aktif pemerintah (Kementerian Kominfo melalui Balai Monitor) dalam kapasitasnya sebagai regulator yang menjaga

keteraturan, keadilan, serta kualitas ruang komunikasi publik.

- Hasil pengukuran teknis dan temuan valid di lapangan menjadi aset data yang berharga. Data ini berfungsi sebagai referensi penilaian otentik bagi pengambilan keputusan, dasar tindakan penegakan hukum, serta instrumen formulasi kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
- Terciptanya kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat bagi para penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran karena semua pihak beroperasi pada standar teknis dan penjatahan kanal yang sesuai aturan hukum (Permenkominfo No. 5 Tahun 2023 dan Kepmenkominfo No. 246 Tahun 2024).
- Bebasnya frekuensi udara dari interferensi yang merugikan memastikan bahwa masyarakat di wilayah jangkauan (blanket area) mendapatkan kualitas layanan penyiaran (informasi, pendidikan, hiburan, dan kebudayaan) yang jernih, optimal, dan tidak terganggu.
- Hasil pengukuran teknis dan temuan lapangan yang akurat menjadi dasar hukum dan landasan yang kuat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan, memberikan sanksi administratif, atau melakukan tindakan penertiban lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang melanggar.

2.5 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja pada indikator IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja. Data dan narasi kegiatan yang dihasilkan dari pemeriksaan stasiun radio, baik pada kegiatan pemeriksaan microwave link, pengukuran stasiun siaran radio FM, maupun televisi digital, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan kegiatan inspeksi pada periode berikutnya. Selain itu, laporan tersebut juga dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas lokasi pemeriksaan, pemetaan potensi pelanggaran penggunaan frekuensi radio, serta peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun berjalan melalui peningkatan pemanfaatan data ISR dan database terkait sebagai referensi dalam kegiatan pemeriksaan, optimalisasi perencanaan lokasi inspeksi berdasarkan potensi penggunaan frekuensi radio, serta penyempurnaan mekanisme pelaporan kegiatan agar lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Apabila terdapat indikator yang tidak lagi tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka hasil tindak lanjut atas rekomendasi tersebut tetap dilaksanakan dan dicatat sebagai kinerja lainnya, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keberlanjutan perbaikan kinerja organisasi dan peningkatan kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio.

2.6 Rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan IKSK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) pada tahun berikutnya, diperlukan penguatan perencanaan kegiatan dengan memanfaatkan data ISR dan database pengawasan secara lebih optimal. Dengan demikian, lokasi pemeriksaan dapat diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi pelanggaran atau tingkat penggunaan frekuensi radio yang tinggi.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti operator dan penyelenggara penyiaran, guna mempermudah proses verifikasi data teknis serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu terus dilakukan melalui pelatihan teknis dan penguatan kompetensi personel dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran parameter teknis pemancar. Optimalisasi pemanfaatan peralatan monitoring dan pengukuran frekuensi radio juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas kegiatan di lapangan.

2.7 Efisiensi

Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dilakukan melalui optimalisasi penggunaan anggaran dan sumber daya dengan menggabungkan kegiatan pengukuran parameter teknis stasiun siaran Radio FM dan TV Digital pada beberapa kabupaten/kota dalam satu rangkaian kegiatan lapangan. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan pengukuran di beberapa lokasi dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu

kegiatan perjalanan dinas sehingga kebutuhan biaya operasional, transportasi, serta waktu pelaksanaan menjadi lebih efisien. Strategi ini memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengukuran, serta tetap mendukung tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

2.8 Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio (inspeksi) dan pengukuran frekuensi radio dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

1. Berorientasi Pelayanan: Dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio, pengukuran frekuensi radio serta mensosialisasikan perizinan spektrum frekuensi radio maupun sosialisasi mengenai standarisasi perangkat komunikasi yang digunakan.
2. Akuntabel: Personel memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio. Selain itu, personel mampu menjalankan tugasnya dengan transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggung jawabkan hasil kerjanya.
3. Kompeten: Personel memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio. Personel telah mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan berkompeten dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
4. Harmonis: Personel mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, pemilik stasiun radio, dan rekan kerja lainnya. Personel mampu bekerja sama dengan baik agar dapat mencapai tujuan bersama.
5. Loyal: Personel setia dan patuh pada aturan yang berlaku dalam melakukan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran frekuensi radio. Personel mampu menghindari konflik kepentingan dan selalu berpegang pada kode etik profesi.
6. Adaptif: Personel mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda-beda dan dapat menghadapi permasalahan yang muncul dengan cepat dan tepat. Personel mampu mengubah strategi dan taktik kerja sesuai dengan keadaan yang dihadapi.
7. Kolaboratif: Personel mampu bekerja sama dengan tim dan membangun kerja sama yang baik dengan masyarakat dan pemilik stasiun radio. Personel mampu berkomunikasi dengan baik dan membangun relasi yang positif dengan para pihak yang terkait. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut di atas, personel dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat serta dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas dan kualitas layanan.

2.9 Data Dukung

Gambar 3.5
Kegiatan Pengukuran Parameter Teknis Radio siaran



3. IKSK-3 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

3.1.Latar Belakang

Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Layanan pengaduan masyarakat terkait dengan gangguan SFR merupakan bagian dari 9 (sembilan) program prioritas nawacita pemerintah yang harus diprioritaskan untuk segera ditangani sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan melalui kegiatan penanganan gangguan SFR bagi pengguna frekuensi dari seluruh dinas yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*Harmful Interference*) pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa (dinas penerbangan dan dinas maritim) maka wajib mendapatkan respon penanganan dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Penanganan gangguan spektrum frekuensi

radio membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang handal untuk mencari sumber pancaran pengganggu, melokalisir gangguan, serta menganalisis penyelesaian gangguan SFR dengan menggunakan perangkat monitoring SFR.

Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya laporan pengaduan masyarakat tersebut antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi yang terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan pengguna frekuensi yang meningkat mengakibatkan potensi gangguan spektrum frekuensi radio semakin besar. Meskipun jumlah pengaduan masyarakat terjadi fluktuasi setiap tahunnya, laporan masyarakat tersebut masih tergolong tinggi dan harus ditangani dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan masyarakat luas yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan (*Harmful Interference*).

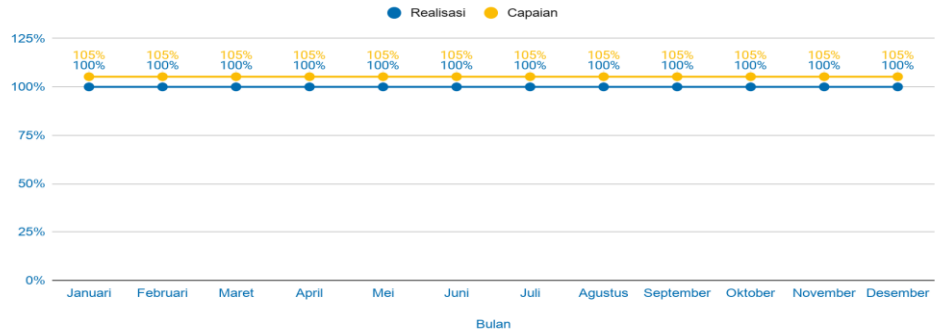
3.2.Tabulasi Data Capaian

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yaitu mengurangi potensi terjadinya gangguan SFR di seluruh dinas frekuensi dan mewujudkan tertib dalam penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan izin dan peruntukannya sehingga tercipta layanan publik yang prima. Capaian realisasi penanganan gangguan pada periode tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian IKSK-3 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	98 %	100 %	99 %	100%	100%	100%	95%	100%

Grafik 3.11
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-3
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio



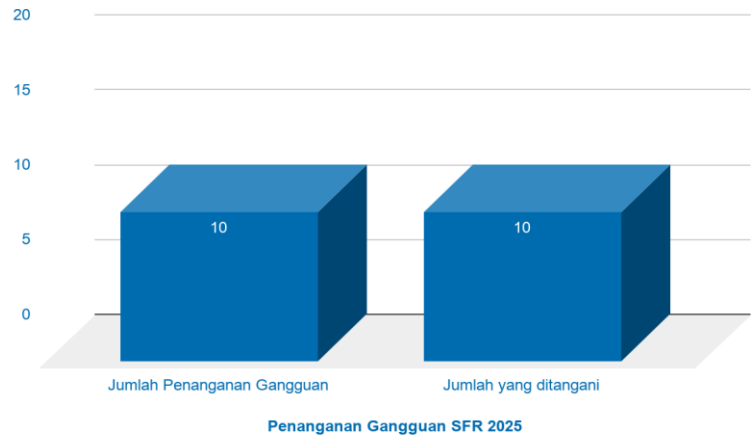
Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Layanan pengaduan masyarakat terkait dengan gangguan SFR merupakan bagian dari 9 (sembilan) program prioritas nawacita pemerintah yang harus diprioritaskan untuk segera ditangani sehingga pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan melalui kegiatan penanganan gangguan SFR bagi pengguna frekuensi dari seluruh dinas yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) khususnya dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*Harmful Interference*) pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa (dinas penerbangan dan dinas maritim) maka wajib mendapatkan respon penanganan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang handal untuk mencari sumber pancaran pengganggu, melokalisir gangguan, serta menganalisis penyelesaian gangguan SFR dengan menggunakan perangkat monitoring SFR.

Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya laporan pengaduan masyarakat tersebut antara lain pertumbuhan industri telekomunikasi yang terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan pengguna frekuensi yang meningkat mengakibatkan potensi gangguan spektrum frekuensi radio semakin besar. Meskipun jumlah pengaduan masyarakat terjadi fluktuasi setiap tahunnya, laporan masyarakat tersebut masih tergolong tinggi dan harus ditangani dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan masyarakat luas yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan (*Harmful Interference*).

Indikator keberhasilan Balmon Lampung tahun ini terlihat pada terlampauinya capaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada bulan Januari s.d Desember 2025 sebesar 100% dari target 95%. Trend waktu penanganan gangguan SFR yang semakin efektif, cepat dan transparan dengan adanya pengembangan dan sosialisasi penggunaan aplikasi trouble ticket karena durasi progres penanganan gangguan yang dilakukan oleh UPT yang dapat dilihat secara real time oleh pelapor/masyarakat pengguna frekuensi. Peningkatan pemahaman bagi pengguna/masyarakat melalui branding image melalui media publikasi akan pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan menggunakan alat/perangkat telekomunikasi yang sudah tersertifikasi.

Selama tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah menerima 10 pengaduan gangguan penggunaan frekuensi radio. Grafik penanganan gangguan selama tahun 2025 terlihat pada grafik 3.14 dan 3.15 berikut ini :

Grafik 3.12
Penanganan Gangguan Tahun 2025



Grafik 3.13
Penanganan Gangguan Tahun 2025



3.3 Analisa Pencapaian Target

Keberhasilan capaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sepanjang tahun 2025 mencapai target hingga 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

a. Adanya SLA (*Service Level Agreement*) durasi progres penanganan gangguan yang dilakukan oleh Balmon Lampung dapat dilihat secara real time oleh pelapor/masyarakat pengguna frekuensi melalui aplikasi.
b. Alat perangkat monitoring yang dimiliki oleh Balmon Lampung sangat menunjang dalam mempercepat menemukenali sumber pancaran frekuensi pengganggu.
c. Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Ditjen Infrastruktur Digital dengan jabatan fungsional tertentu yaitu Pengendali Frekuensi yang memiliki kompetensi serta keahlian khusus dalam melakukan observasi dan monitoring frekuensi hingga inspeksi ke sumber pancaran frekuensi pengganggu.
d. Pelaksanaan sosialisasi baik skala regional yang dilakukan oleh UPT maupun skala nasional dengan menghadirkan audiens dari beberapa instansi maupun asosiasi serta stakeholder terkait yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio.
e. Pelaksanaan kegiatan penertiban rutin dan penertiban nasional sebagai bagian edukasi dan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio agar tertib menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita HF (*High Frequency*).

Tabel 3.6 Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Aspek Perbandingan	Balmon SFR Kelas II Lampung	Balmon SFR Kelas II Manado
Target IKSK-3 (2025)	95%	95%
Realisasi	100%	100%
Capaian Kinerja	105,26%	105,26%
Jumlah Aduan	10 Aduan	3 Aduan
Inovasi Utama	Digitalisasi melalui *Trouble Ticket* terintegrasi SIMS dan notifikasi *real-time* kepada pelapor	*Early Screening* berbasis data monitoring dan analisis parameter teknis jarak jauh sebelum tindakan lapangan
Efisiensi SDM	Melibatkan tim fungsional Pengendali Frekuensi yang kompeten	Pengurangan personel lapangan dari 4-5 orang menjadi 2-3 orang melalui pembagian peran yang lebih efektif
Efisiensi Waktu	Respon layanan keselamatan wajib ditangani dalam 1x24 jam	Pemangkasan durasi penanganan dari rata-rata 2 hari menjadi 1 hari (Efisiensi 40-50%)

Aspek Edukasi	Fokus pada *branding image* media publikasi dan sosialisasi regional/nasional untuk meningkatkan *awareness* masyarakat	Fokus pada pembinaan regulasi; tetap menangani gangguan secara teknis meski izin (ISR) pelapor kedaluwarsa, namun menjadikannya momen edukasi perpanjangan izin
Dampak Operasional	Transparansi progres penanganan yang dapat dipantau langsung oleh masyarakat	Penghematan waktu penanganan hingga 50% dan efisiensi anggaran operasional yang lebih terkendali

Berdasarkan data laporan kinerja tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado sama-sama menunjukkan performa yang sangat baik dalam penanganan gangguan SFR dengan mencapai realisasi 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Meskipun keduanya mencapai target maksimal, terdapat perbedaan signifikan dalam volume beban kerja dan strategi efisiensi yang diterapkan.

Balmon Lampung menangani beban kerja yang lebih padat dengan total 10 aduan gangguan sepanjang tahun 2025, yang mencakup berbagai sektor mulai dari navigasi penerbangan, maritim, hingga layanan seluler dan penyiaran. Inovasi utama Lampung terletak pada pengembangan Aplikasi Trouble Ticket yang terintegrasi dengan data perizinan SIMS, sehingga memungkinkan pelapor memantau progres penanganan secara real-time.

Di sisi lain, Balmon Manado menangani 3 aduan gangguan dengan fokus pada efisiensi operasional yang sangat tinggi. Manado berhasil memangkas durasi penanganan gangguan dari rata-rata 2 hari menjadi hanya 1 hari melalui mekanisme screening dini dan koordinasi jarak jauh. Selain itu, Manado melakukan efisiensi SDM dengan mengurangi jumlah petugas lapangan dari 4-5 orang menjadi hanya 2-3 orang per kasus tanpa menurunkan kualitas analisis teknis.

3.4 Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

a. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target

Meskipun Balmon Lampung berhasil mencapai target penanganan gangguan sebesar 100%, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi ritme kerja di lapangan. Narasi berikut menjelaskan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang diambil untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.

Tantangan utama yang dihadapi adalah pesatnya pertumbuhan industri telekomunikasi di wilayah Lampung, yang secara langsung meningkatkan kepadatan penggunaan frekuensi. Hal ini berdampak pada tingginya potensi interferensi atau gangguan antar pengguna frekuensi. Secara teknis, hambatan yang sering ditemui adalah sulitnya melokalisir sumber gangguan yang bersifat intermiten (hilang-timbul) atau yang berasal dari perangkat telekomunikasi ilegal yang tidak memiliki sertifikasi resmi. Selain itu, keterbatasan jumlah personel ahli dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang harus dijangkau sering kali menjadi tantangan dalam menjaga kecepatan respon (SLA) 1 x 24 jam, terutama untuk gangguan pada sektor krusial seperti navigasi penerbangan dan maritim.

b. Upaya Percepatan dalam mencapai Target

Untuk mengatasi kendala tersebut dan mempercepat pencapaian target, Balmon Lampung telah menerapkan beberapa langkah terobosan:

1. Transformasi Digital melalui Aplikasi *Trouble Ticket*: Guna memangkas birokrasi, Balmon Lampung mengoptimalkan penggunaan aplikasi *Trouble Ticket* yang terintegrasi dengan database perizinan SIMS nasional. Inovasi ini memungkinkan tim untuk memvalidasi data pelapor secara instan dan memberikan transparansi kepada masyarakat, di mana pelapor dapat memantau setiap tahapan penanganan gangguan secara *real-time*.
2. Peningkatan Kapasitas Teknis dan Alat: Percepatan penanganan di lapangan dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan perangkat monitoring spektrum yang memiliki akurasi tinggi. Tim teknis juga dibekali dengan pelatihan berkala untuk memperdalam kemampuan analisis parameter frekuensi, sehingga sumber gangguan dapat ditemukan dan dihentikan dengan lebih cepat dan tepat.
3. Strategi Edukasi Preventif: Selain tindakan teknis, dilakukan upaya percepatan melalui jalur edukasi. Balmon survei Lampung aktif melakukan sosialisasi dan pembangunan *branding image* kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya penggunaan perangkat yang tersertifikasi. Upaya preventif ini bertujuan untuk menekan jumlah gangguan sejak dari sumbernya, sehingga beban kerja penanganan gangguan di masa depan dapat lebih terkendali.
4. Penguatan Koordinasi Lintas Sektoral: Melalui nilai kolaboratif, Balmon Lampung memperkuat sinergi dengan operator seluler dan instansi keamanan untuk menciptakan sistem pelaporan yang lebih responsif. Hal ini memastikan bahwa setiap ancaman gangguan pada frekuensi keselamatan jiwa dapat dideteksi dan ditangani sebelum berdampak luas.

Dengan kombinasi antara inovasi teknologi dan penguatan kompetensi SDM, Balmon Lampung tidak hanya mampu menyelesaikan aduan yang

masuk, tetapi juga berhasil meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

c. Dampak yang dihasilkan dari pencapaian target

Keberhasilan pencapaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sebesar 100% pada tahun 2025 memberikan berbagai manfaat yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, pengguna frekuensi radio, serta para pemangku kepentingan.

a. Dampak Langsung

- Meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan telekomunikasi masyarakat.
- Penanganan gangguan frekuensi yang cepat dan tepat memastikan layanan komunikasi, penyiaran, serta jaringan telekomunikasi dapat beroperasi secara optimal tanpa gangguan yang merugikan masyarakat. Hal ini mendukung kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan yang sangat bergantung pada layanan telekomunikasi.
- Meningkatnya keselamatan layanan penerbangan dan maritim
- Gangguan pada frekuensi penerbangan dan maritim berpotensi menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi. Dengan terselesaikannya seluruh laporan gangguan yang masuk, keamanan komunikasi pada sektor keselamatan jiwa dapat terjaga sehingga mengurangi risiko kecelakaan akibat terganggunya komunikasi radio.
- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Kehadiran sistem pelaporan digital melalui aplikasi Trouble Ticket memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aduan serta memantau progres penanganan secara real time. Transparansi layanan tersebut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
- Menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat gangguan komunikasi
- Penanganan gangguan yang cepat membantu meminimalkan gangguan operasional pada sektor usaha, transportasi, penyiaran, dan layanan publik lainnya yang menggunakan frekuensi radio sebagai sarana komunikasi utama.

b. Dampak Tidak Langsung

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan legal.
- Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakan perangkat telekomunikasi

yang tersertifikasi serta mematuhi ketentuan penggunaan frekuensi radio sesuai peruntukannya.
- Terwujudnya ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dan tertib
- Tingkat kepatuhan pengguna frekuensi yang semakin baik akan menurunkan potensi gangguan di masa mendatang sehingga tercipta tata kelola spektrum frekuensi radio yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- Meningkatnya kepercayaan investor dan pelaku usaha
- Ketersediaan layanan telekomunikasi yang andal dan minim gangguan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kondisi ini dapat mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Mendukung transformasi digital nasional
- Spektrum frekuensi radio merupakan infrastruktur penting dalam pengembangan teknologi digital. Pengelolaan dan penanganan gangguan yang efektif berkontribusi pada keberhasilan transformasi digital, peningkatan konektivitas, serta pemerataan akses informasi bagi masyarakat.
- Meningkatnya efektivitas pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio
- Pemanfaatan data gangguan dan pengembangan sistem digital memberikan basis informasi yang lebih kuat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pengawasan, dan mitigasi potensi gangguan pada masa mendatang sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

3.5 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja pada indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) tahun 2025 disusun sebagai kelanjutan strategis dari capaian 100% penanganan gangguan pada tahun 2024, di mana seluruh 12 aduan yang diterima telah berhasil diselesaikan sepenuhnya. Seluruh data yang tertuang di dalamnya telah bertransformasi menjadi basis data strategis yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan di sektor penanganan gangguan, terutama dalam memitigasi laporan gangguan masyarakat yang masih tergolong tinggi dan fluktuatif. Sebagai wujud pemanfaatan data yang konkret, kegiatan penanganan gangguan sepanjang tahun 2024 dan awal 2025 telah diolah kembali menjadi Peta Kerawanan Interferensi Regional. Melalui pemetaan koordinat dan klasifikasi jenis gangguan yang terekam secara digital, Balmon Lampung kini memiliki acuan yang lebih akurat dalam menentukan prioritas wilayah patroli monitoring. Hal ini memastikan bahwa langkah antisipasi dilakukan secara proaktif di titik-titik rawan, sehingga potensi gangguan pada frekuensi krusial seperti navigasi penerbangan dan maritim dapat dideteksi sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang luas bagi keselamatan masyarakat.

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi tersebut, capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil langsung dari tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tahun 2024. Inovasi Aplikasi Trouble Ticket yang mulai dikembangkan pada tahun 2024 kini telah diimplementasikan sepenuhnya dan terintegrasi dengan database perizinan SIMS nasional. Keberadaan inovasi ini merupakan jawaban langsung atas kendala lambatnya validasi data pelapor yang menjadi catatan evaluasi sebelumnya. Dengan otomatisasi sistem ini, proses birokrasi dapat dipangkas secara signifikan sehingga mampu mempercepat waktu respon penanganan hingga 50% dari standar waktu biasanya.

Pada tahun 2025 ini telah dilakukan pengembangan inovasi pada aplikasi pelaporan aduan gangguan yaitu Aplikasi *Trouble Ticket*. Melalui Aplikasi *Trouble Ticket* apabila pengguna frekuensi dari seluruh dinas yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) mengalami gangguan SFR, maka dapat melaporkan aduan gangguan SFR. Beberapa hal utama dalam pengembangan aplikasi *Trouble Ticket* pada tahun 2025 adalah:

- Aplikasi *Trouble Ticket* sudah terintegrasi dengan data perizinan maritim dan penerbangan pada SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum) sehingga user/pelapor cukup menginput nomor ISR (Izin Stasiun Radio) maka data user/pelapor akan muncul secara otomatis.
- Progress/perkembangan status penanganan gangguan SFR dapat terpantau secara real time oleh user internal Infrastruktur

Digital dan pelapor melalui notifikasi via email dan notifikasi pada aplikasi *trouble ticket* sehingga perlu diperhatikan untuk dilakukan penanganan sesegera mungkin khususnya terkait dengan aduan keselamatan (penerbangan dan maritim) agar terciptanya kualitas pelayanan yang efisien dan transparan.

- Menyediakan informasi jumlah aduan gangguan SFR, bukan hanya berdasarkan jumlah titik gangguan SFR sehingga Unit Pusat Ditjen Infrastruktur Digital dapat memonitoring kinerja UPT dalam menangani gangguan SFR.

3.6 Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap capaian kinerja tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah mengidentifikasi beberapa area strategis yang memerlukan penguatan sistemik guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan publik di masa mendatang. Fokus utama perbaikan pada tahun anggaran berikutnya diarahkan pada tiga pilar utama: transformasi teknologi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, dan perluasan jangkauan edukasi preventif.

Pertama, dari sisi infrastruktur digital dan metodologi kerja, Balmon Lampung merekomendasikan pengembangan fitur Early Screening pada sistem monitoring otomatis. Belajar dari efisiensi yang dilakukan oleh unit kerja lain, integrasi sistem deteksi dini ini diproyeksikan mampu memangkas waktu identifikasi gangguan secara signifikan. Dengan kemampuan analisis parameter teknis jarak jauh sebelum tim diterjunkan ke lapangan, durasi penyelesaian gangguan diharapkan dapat ditekan lebih rendah dari rata-rata saat ini, sehingga efisiensi operasional dan anggaran dapat tercapai secara maksimal tanpa mengurangi akurasi hasil analisis di lapangan.

Kedua, seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri telekomunikasi yang meningkatkan kompleksitas spektrum, peningkatan kapasitas SDM fungsional Pengendali Frekuensi menjadi hal yang mutakhir. Rekomendasi perbaikan mencakup penyelenggaraan pelatihan teknis berkelanjutan yang berfokus pada teknologi nirkabel generasi terbaru dan teknik melokalisir sumber gangguan pada pita frekuensi tinggi. Penguatan kompetensi ini sangat krusial agar personel tetap adaptif dalam menghadapi dinamika teknologi perangkat telekomunikasi yang semakin beragam dan canggih, yang berpotensi menimbulkan jenis interferensi baru di masa depan.

Ketiga, dalam upaya menekan angka pengaduan melalui pendekatan preventif, Balmon Lampung memandang perlu adanya rekayasa strategi komunikasi publik. Sosialisasi terkait tertib penggunaan frekuensi dan sertifikasi perangkat perlu diperluas jangkauannya dengan menyasar komunitas-komunitas pengguna frekuensi di sektor maritim dan penerbangan secara lebih intensif. Selain itu, penguatan kolaborasi lintas instansi melalui pembentukan forum koordinasi teknis dengan stakeholder terkait (seperti operator seluler dan instansi keselamatan) diharapkan dapat menciptakan ekosistem penggunaan spektrum yang lebih harmonis. Dengan langkah-langkah strategis ini, Balmon Lampung optimis dapat terus mewujudkan tata kelola spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.7 Efisiensi

Dalam pencapaian target kinerja penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung mengimplementasikan strategi efisiensi yang berfokus pada optimalisasi waktu, anggaran, serta pemanfaatan sumber daya manusia. Efisiensi ini bukan sekadar upaya pengurangan biaya, melainkan sebuah transformasi proses bisnis yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pengguna frekuensi melalui respons yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Efisiensi Waktu dan Proses menjadi capaian yang paling signifikan. Melalui pemanfaatan Aplikasi *Trouble Ticket* yang terintegrasi secara *real-time* dengan sistem perizinan SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum), Balmon Lampung berhasil memangkas birokrasi pelaporan manual dan mempercepat proses validasi data pelapor. Integrasi ini memungkinkan tim teknis untuk melakukan analisis awal terhadap legalitas dan parameter teknis stasiun radio sesaat setelah aduan diterima. Hasilnya, durasi penanganan

gangguan dapat dipangkas hingga 50% dibandingkan periode sebelumnya, terutama pada kategori gangguan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa (*safety services*), di mana standar pelayanan 1x24 jam dapat terpenuhi secara konsisten tanpa mengorbankan kualitas analisis teknis di lapangan.

Efisiensi Sumber Daya Manusia dan Anggaran dilakukan melalui penugasan personel yang berbasis kompetensi teknis yang spesifik. Balmon Lampung mengoptimalkan peran Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio yang memiliki sertifikasi keahlian dalam melokalisir sumber gangguan secara akurat. Dengan menempatkan personel yang tepat pada setiap kasus, tim lapangan dapat bekerja secara lebih efektif dengan jumlah personel yang proporsional, namun tetap mampu menghasilkan solusi teknis yang tuntas. Efektivitas kerja ini secara langsung berdampak pada pengendalian anggaran operasional kantor, di mana penggunaan kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas lapangan menjadi lebih efisien karena setiap pergerakan tim didasarkan pada data awal yang akurat dari sistem monitoring otomatis. Sinergi antara kecanggihan perangkat monitoring dengan keahlian personel ini memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara dialokasikan secara produktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban ruang udara frekuensi di wilayah Lampung.

3.8. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Dalam proses pencapaian target persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan sejumlah 10 (sepuluh) aduan gangguan SFR tercapai 100%, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK.

a) Berorientasi Pelayanan, melalui kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tim mensosialisasikan mengenai perizinan dan masalah penanganan jika terjadi gangguan frekuensi radio khususnya yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).
b) Akuntabel, Proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan jujur dalam pelaksanaan serta penanganan gangguan yang maksimal.
c) Kompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
d) Harmonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama yang sinergis
e) Loyal, pelaksanaan kinerja tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalarn mencapai serta mewujudkan capaian kinerja yang maksimal yang telah diamanahkan.
f) Adaptif, dalam pelaksanaan kegiatan tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan-perubahan baik itu dari sisi internal maupun eksternal.
g) Kolaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan kolaboratif baik dengan internal kantor maupun eksternal dengan para stakeholder terkait khususnya yang mengalami gangguan frekuensi radio.

3.9 Data Dukung

Gambar 3.6
Kegiatan Penanganan Gangguan 2025





PENANGANAN GANGGUAN 2025

1 DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PRIOK

156.8 MHz
20 Februari - 04 Maret 2025

Hasil monitoring Balmon SFR Kelas II Lampung menunjukkan frekuensi VTS 156.800 MHz terinterferensi oleh pancaran **repeater BASARNAS** di site Padang Cermin, sehingga dilakukan penghentian pancaran karena lokasi stasiun tidak sesuai izin dengan selisih 7,65 km.

2 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A.YANI

151.2 MHz
19 Maret - 24 Maret 2025

Gangguan disebabkan terjadinya kerusakan pada salah satu perangkat komunikasi Merk Baofeng Model UV82

3 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

5625 MHz
17 Aprill - 21 April 2025

Berdasarkan pemetaan dan simulasi switch off, gangguan radar BMKG 5625 MHz berasal dari perangkat point to point Cambium Force200 milik **ISP Nusanet** di area PT Freeman Carbon Indonesia (±750 meter dari radar) akibat masalah teknis kelistrikan, dan setelah perangkat dimatikan (off air) gangguan dinyatakan clear.

4 DISTRIK NAVIGASI KELAS I TANJUNG PRIOK

156.8 MHz
08 Juli - 12 Juli 2025

Saat terjadi gangguan pada frekuensi VTS Panjang 156,8 MHz, Balmon SFR Kelas II Lampung berkoordinasi dengan **BASARNAS dan RAPI** karena diduga adanya trial transmisi pada frekuensi yang sama, dan setelah monitoring ulang di beberapa wilayah Kota Bandar Lampung, gangguan dinyatakan clear.

5 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

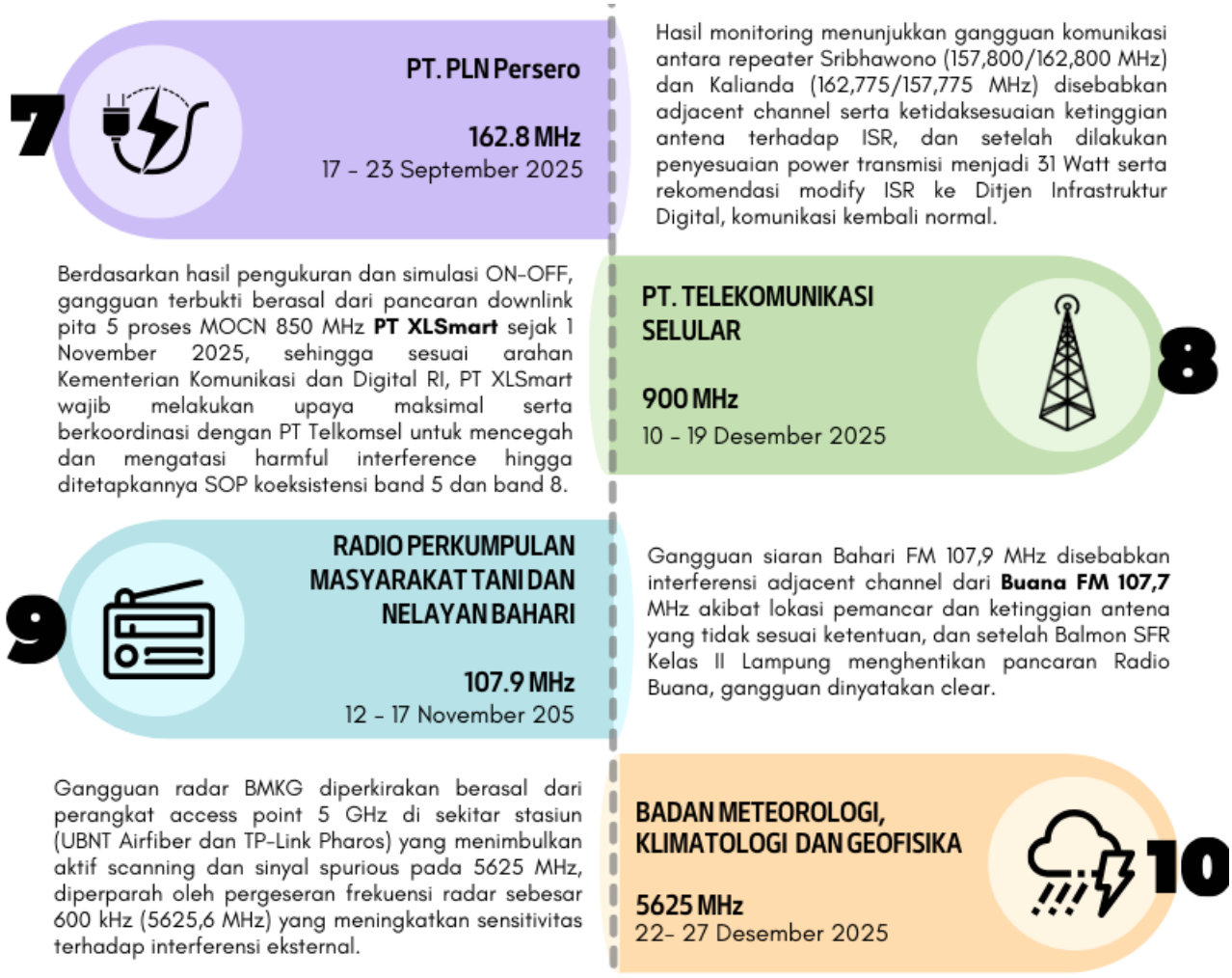
900 MHz
26 - 29 Agustus 2025

Gangguan disebabkan oleh permasalahan internal pada antena sektoral milik PT. Telekomunikasi Selular

6 PLN NUSANTARA POWER, PT.

160.475 MHz
03 - 15 September 2025

Hasil monitoring menunjukkan gangguan pada frekuensi 165,475 MHz berasal dari sinyal fundamental 165,3275 MHz yang merupakan efek spurious/spletteran dari repeater 155,55 MHz dan 173,85 MHz milik **PT PLN UP2D**, dan setelah dilakukan simulasi on/off salah satu repeater (155,55 MHz) serta penyesuaian teknis, gangguan dinyatakan clear oleh PT PLN Power Nusantara UP Tarahan.



4. IKSK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

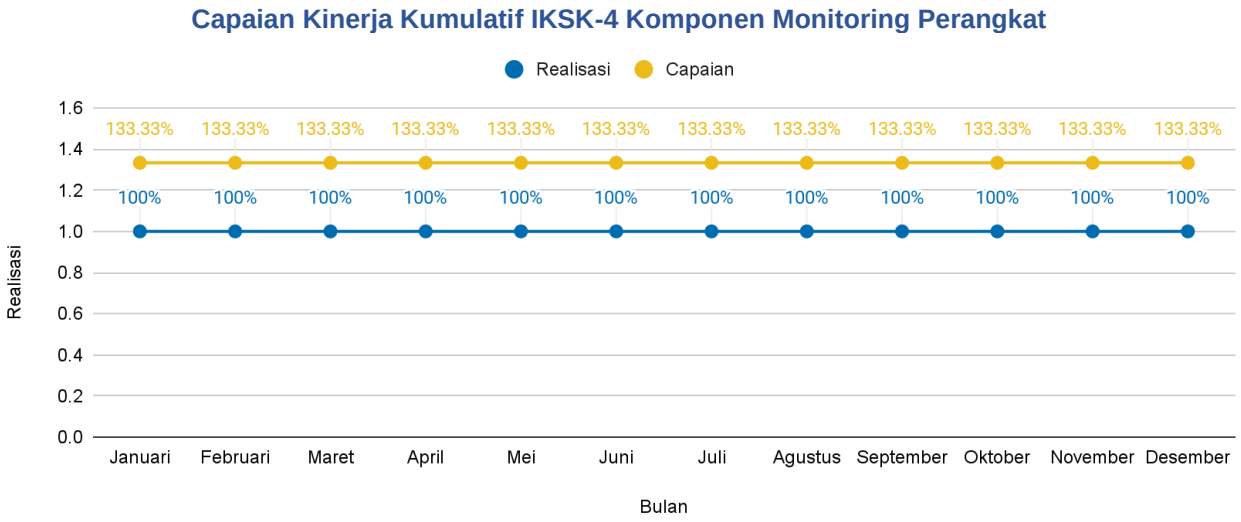
4.1.Latar Belakang

Dasar Kegiatan Pemantauan Standar Perangkat Pos Dan Informatika adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 32 Ayat (1) yang diamanatkan bahwa setiap perangkat Telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan / atau digunakan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, setiap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau diimpor untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Standar Teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1), alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi standar teknis berdasarkan hasil pengujian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus dibuktikan dengan Sertifikat Pemenuhan Standar Teknis. Kemudian Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dengan merek dan tipe yang sama, tetapi berasal dari negara yang berbeda, wajib memiliki sertifikat yang berbeda. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat yang digunakan di Indonesia memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.

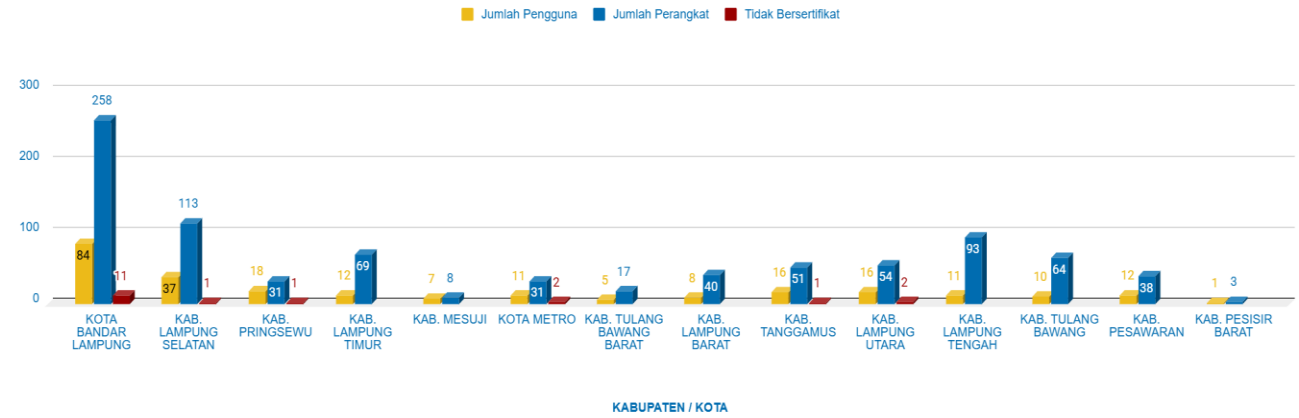
4.2.Tabulasi Data Capaian

Capaian realisasi kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada periode tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini. Adapun hasil monitoring dari bulan januari 2025 sampai dengan desember 2025 terpantau 7 dari 16 jenis perangkat prioritas yaitu : HT, Pemancar FM, MWlink (IDU/ODU), Mobile Transceiver/Radio Rig, Optical Line Terminal (OLT), Wireless Access Point), Optical Network Terminal (ONT), jumlah perangkat prioritas yang termonitor dapat dilihat pada Grafik 3.15.

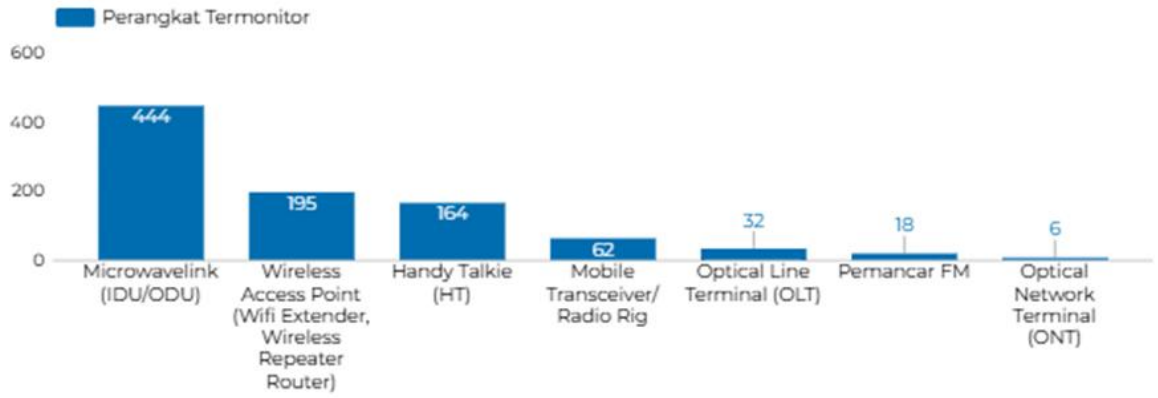
Sasaran kegaiatan	Indikator kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya persentase monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai target yang ditetapkan	Persentase monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (IKSK-3).	100%	98 %	100 %	100%	100%	100%	75%	100%



Grafik 3.14
Rekapitulasi Hasil Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi



Grafik 3.15
Rekapitulasi Alat/Perangkat Telekomunikasi yang termonitor berdasarkan jenisnya



4.3.Analisis Pencapaian Target

Secara umum, pelaksanaan indikator kinerja IKSK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi di wilayah kerja telah berjalan secara efektif dalam memastikan kesesuaian perangkat dengan ketentuan standar teknis dan sertifikasi yang berlaku.

Melalui kegiatan monitoring yang dilaksanakan secara sistematis, perangkat telekomunikasi yang beredar dan digunakan di lapangan dapat diidentifikasi status kepatuhannya sehingga potensi penggunaan perangkat yang tidak memenuhi standar teknis dapat diminimalkan. Dengan demikian, kegiatan monitoring ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menjaga tertib penggunaan perangkat telekomunikasi di masyarakat.

Secara holistik, keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan data dan informasi perangkat yang memadai, serta koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, integrasi kegiatan monitoring standar teknis perangkat dengan kegiatan pengawasan spektrum frekuensi radio juga menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

a. Branchmarking Capaian Kinerja dengan UPT

Berikut merupakan contoh analisis benchmarking berdasarkan tabel perbandingan antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado:

	Balmon SFR Kelas II Lampung	Balmon SFR Kelas II Manado
Target Indikator	75%	75%
Jumlah Kabupaten/Kota Wilayah Kerja	15 kabupaten/kota	15 kabupaten/kota
Cakupan Monitoring Wilayah	15 dari 15 kabupaten/kota (100%)	15 dari 15 kabupaten/kota (100%)

Realisasi Perangkat Termonitor	912 merek/tipe perangkat	442 merek/tipe perangkat
Temuan Pelanggaran	18 perangkat tidak bersertifikasi	3 perangkat tidak bersertifikasi
Tindak Lanjut Pelanggaran	18 ditindaklanjuti (100%)	3 ditindaklanjuti (100%)
Capaian Kinerja	133%	133%

Berdasarkan hasil perbandingan kinerja, kedua UPT memiliki target indikator yang sama yaitu 75% serta cakupan wilayah kerja yang setara, yakni 15 kabupaten/kota. Pelaksanaan monitoring di kedua UPT juga telah menjangkau seluruh wilayah kerja (15 dari 15 kabupaten/kota atau 100%), sehingga menunjukkan komitmen yang sama dalam memastikan pengawasan perangkat telekomunikasi dilakukan secara menyeluruh.

Dari sisi jumlah perangkat yang dimonitor, Balmon SFR Kelas II Lampung mencatat realisasi yang lebih tinggi yaitu 912 merek/tipe perangkat, sedangkan Balmon SFR Kelas II Manado merealisasikan 442 merek/tipe perangkat. Pada aspek pengawasan kepatuhan, Balmon Lampung menemukan 18 perangkat tidak bersertifikasi, sementara Balmon Manado menemukan 3 perangkat tidak bersertifikasi, dan seluruh temuan pada kedua UPT telah ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi sebesar 100%. Secara keseluruhan, kedua UPT menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian indikator yang sama, yaitu 133%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan perangkat telekomunikasi dan digital telah berjalan efektif serta melampaui target yang ditetapkan.

4.4. Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

a. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target

Pelaksanaan kegiatan monitoring tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital pada tahun 2025 secara umum berjalan dengan baik dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan ke depannya.

Salah satu tantangan utama adalah tingginya perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital yang menyebabkan semakin beragamnya jenis perangkat yang beredar di masyarakat. Kondisi ini menuntut pelaksanaan monitoring yang lebih luas dan komprehensif agar seluruh perangkat yang digunakan tetap memenuhi standar teknis dan ketentuan sertifikasi yang berlaku. Selain itu, luasnya wilayah kerja yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kegiatan monitoring dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Hambatan lainnya adalah masih ditemukannya perangkat telekomunikasi yang belum memiliki sertifikasi atau tidak memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan. Pada tahun 2025, hasil monitoring menemukan 18 perangkat yang tidak bersertifikasi sehingga memerlukan tindak lanjut dan pengawasan lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan monitoring juga menghadapi keterbatasan dukungan anggaran khusus sehingga diperlukan strategi pelaksanaan yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan.

b. Upaya Percepatan Pencapaian Target

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut serta memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Optimalisasi integrasi kegiatan monitoring perangkat dengan monitoring spektrum frekuensi radio, sehingga pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan waktu pelaksanaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
- Pemanfaatan database sertifikasi perangkat telekomunikasi melalui sistem informasi sertifikasi perangkat dan aplikasi pendukung untuk mempercepat proses verifikasi status kepatuhan perangkat yang dimonitor.
- Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemilik perangkat, distributor, penyelenggara telekomunikasi, dan instansi terkait, sehingga proses pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap temuan perangkat tidak bersertifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
- Penguatan kompetensi personel monitoring, melalui peningkatan pemahaman terhadap perkembangan teknologi perangkat telekomunikasi, standar teknis, serta regulasi yang berlaku sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.

Penerapan pendekatan pengawasan berbasis risiko, dengan memprioritaskan jenis perangkat yang memiliki tingkat penggunaan tinggi di masyarakat dan berpotensi menimbulkan gangguan apabila tidak memenuhi standar teknis yang telah diatur.

c. Dampak yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital sebesar 100% dari target 75% memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, pemerintah, maupun ekosistem telekomunikasi secara keseluruhan.

a. Dampak Langsung

- Monitoring dan pengawasan yang dilakukan memastikan bahwa perangkat yang digunakan masyarakat telah memenuhi standar teknis dan sertifikasi yang dipersyaratkan sehingga lebih aman digunakan serta memiliki kualitas layanan yang lebih baik.
- Perangkat yang tidak memenuhi standar teknis berpotensi menimbulkan interferensi dan gangguan terhadap layanan komunikasi. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan perangkat, kualitas layanan telekomunikasi menjadi lebih stabil dan andal bagi masyarakat.
- Penggunaan perangkat yang sesuai standar teknis mendukung kinerja jaringan telekomunikasi secara optimal sehingga masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi, internet, dan layanan digital lainnya dengan kualitas yang lebih baik.
- Pengawasan yang dilakukan mendorong distributor, importir, dan pengguna perangkat untuk mematuhi ketentuan sertifikasi perangkat sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan sesuai regulasi.

b. Dampak Tidak Langsung

- Kepatuhan terhadap standar teknis perangkat telekomunikasi mendukung terciptanya tata kelola penggunaan perangkat yang lebih baik sehingga risiko gangguan jaringan dan penggunaan perangkat ilegal dapat diminimalkan.
- Masyarakat memperoleh jaminan bahwa perangkat yang digunakan telah memenuhi standar keselamatan, kompatibilitas, dan kualitas yang ditetapkan pemerintah sehingga meningkatkan rasa aman dalam memanfaatkan teknologi digital.
- Infrastruktur telekomunikasi yang didukung oleh perangkat yang memenuhi standar teknis akan meningkatkan keandalan jaringan dan memperkuat fondasi transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan ekonomi digital.
- Kegiatan monitoring yang disertai edukasi dan sosialisasi secara tidak langsung meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menggunakan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi standar teknis dan memiliki sertifikasi resmi.
- Pengawasan yang konsisten terhadap kepatuhan standar teknis menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan mendorong produsen maupun distributor untuk menyediakan perangkat yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan capaian monitoring sebesar 100% dan tindak lanjut seluruh temuan perangkat tidak bersertifikasi, Balmon SFR Kelas II Lampung telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga

kualitas perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat, sehingga tercipta layanan telekomunikasi yang aman, stabil, dan mendukung pembangunan digital yang berkelanjutan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung turut berpartisipasi dalam kegiatan Digivave 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sebagai ajang apresiasi terhadap kinerja Unit Pelaksana Teknis dalam pengawasan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Dalam kegiatan tersebut, Balmon SFR Kelas II Lampung berhasil meraih nominasi Juara 3 pada kategori Monitoring dan Penertiban Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen Balmon Lampung dalam melaksanakan pengawasan, monitoring, serta penertiban terhadap penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah kerjanya. Selain itu, penghargaan tersebut juga menjadi bentuk pengakuan atas upaya peningkatan kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio serta kepatuhan terhadap standar teknis perangkat telekomunikasi, sekaligus memotivasi Balmon Lampung untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.

Gambar 3.7
Pencapaian Balmon Lampung dalam Acara Digiwave 2025



4.5.Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja pada indikator **I**KSK 4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan penguatan pelaksanaan kegiatan monitoring perangkat telekomunikasi di wilayah kerja. Hasil laporan berupa data perangkat yang dimonitor, tingkat kepatuhan terhadap sertifikasi, serta temuan perangkat yang tidak sesuai ketentuan digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengawasan, meningkatkan efektivitas kegiatan monitoring, serta memperkuat koordinasi internal dalam pelaksanaan pengawasan perangkat telekomunikasi.

Selain itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya telah dilaksanakan melalui optimalisasi pelaksanaan monitoring perangkat telekomunikasi dengan mengintegrasikan kegiatan monitoring standar teknis perangkat dengan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus memastikan kegiatan pengawasan tetap berjalan optimal meskipun tidak terdapat alokasi mata anggaran khusus untuk kegiatan monitoring kepatuhan standar teknis perangkat telekomunikasi dan digital. Upaya tersebut turut mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan serta pencapaian indikator kinerja pada tahun berjalan.

4.6.Rekomendasi perbaikan ditahun selanjutnya

Pada tahun berikutnya, pelaksanaan IKSK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital perlu terus ditingkatkan melalui penguatan strategi monitoring yang lebih terarah dan berbasis risiko. Kegiatan monitoring dapat difokuskan pada jenis perangkat telekomunikasi yang memiliki tingkat peredaran tinggi di masyarakat serta berpotensi menimbulkan gangguan apabila tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengawasan diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan tingkat kepatuhan perangkat telekomunikasi di wilayah kerja.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan pemanfaatan hasil monitoring sebagai basis data

pengawasan perangkat telekomunikasi untuk mendukung perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Data perangkat yang telah dimonitor, termasuk temuan perangkat yang tidak bersertifikasi atau tidak sesuai ketentuan, dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan prioritas kegiatan monitoring lanjutan serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Penguatan dokumentasi dan pelaporan kegiatan juga perlu terus dilakukan agar hasil monitoring dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan kegiatan pengawasan perangkat telekomunikasi di masa mendatang.

4.7.Efisiensi

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital, efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan tersebut dengan pelaksanaan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di lapangan. Integrasi ini dilakukan karena tidak tersedia mata anggaran khusus untuk kegiatan monitoring kepatuhan standar teknis perangkat telekomunikasi. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya seperti waktu pelaksanaan, personel, serta sarana dan prasarana monitoring dapat dilakukan secara lebih optimal dalam satu rangkaian kegiatan. Melalui pendekatan ini, kegiatan monitoring tetap dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menambah beban anggaran, sekaligus memastikan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan kepatuhan standar teknis perangkat telekomunikasi tetap berjalan dengan baik.

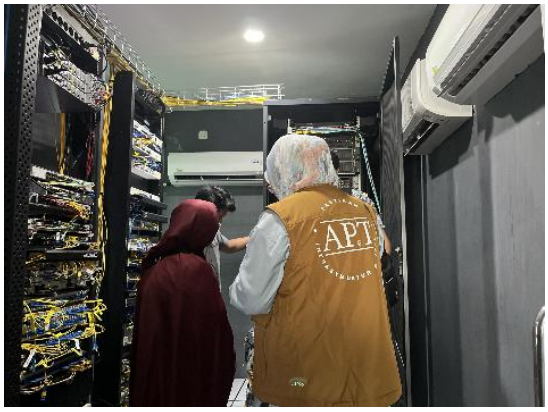
4.8.Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Implementasi nilai-nilai BerAKHLAK dalam kegiatan monitoring alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi Tahun 2025 diwujudkan melalui:

1. Berorientasi Pelayanan
   Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemilik perangkat melalui pelaksanaan monitoring yang informatif, edukatif, serta disertai sosialisasi mengenai ketentuan perizinan dan standar perangkat telekomunikasi.
2. Akuntabel
   Melaksanakan kegiatan monitoring secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompeten
   Personel memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai dalam melakukan monitoring alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta terus meningkatkan kompetensi seiring perkembangan teknologi.
4. Harmonis
   Menjalin hubungan kerja yang baik dengan masyarakat, pemilik perangkat, serta sesama personel guna menciptakan suasana kerja yang kondusif.
5. Loyal
   Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga integritas, serta menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan kegiatan monitoring.
6. Adaptif
   Mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, perubahan teknologi, serta kondisi lingkungan kerja yang beragam.
7. Kolaboratif
   Membangun kerja sama yang efektif dengan tim internal maupun pihak eksternal terkait guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan monitoring

4.9.Data Dukung

Gambar 3.8
Kegiatan Monitoring Perangkat



5. IKSK-5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

5.1.Latar Belakang

Balmon SFR Kelas II Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dilengkapi Perangkat Utama dan pendukung SMFR untuk kegiatan monitoring/pengukuran yang terdiri dari perangkat *portable* (jinjing), stasiun monitor bergerak, dan stasiun monitor tetap (*Transportable*).

Untuk memastikan fungsi perangkat monitoring tetap berjalan dengan baik, diperlukan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin disertai dengan perbaikan apabila ditemukan adanya kendala pada perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kondisi perangkat agar tetap optimal dan siap digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
Melalui pemeliharaan dan perbaikan tersebut, diharapkan perangkat monitoring dapat beroperasi secara maksimal. selain itu kondisi perangkat yang terjaga dengan baik juga dapat meminimalkan potensi gangguan teknis yang dapat mempengaruhi kinerja sistem monitoring.

5.2.Tabulasi data capaian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Penilaian terhadap capaian kegiatan dalam menjaga operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio dinilai dari kondisi perangkat utama dan perangkat pendukung yang mempengaruhi operasional stasiun monitor, serta kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan kerusakan perangkat dan penyampaian data monitoring okupansi frekuensi radio secara berkala melalui aplikasi SMSN (Sistem Monitoring Spektrum Nasional). Selain itu, ketepatan waktu dalam pengiriman data hasil okupansi sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan menjadi bagian penting dalam proses penilaian sesuai dengan ketentuan pelaporan yang berlaku.

Untuk mencapai target Service Level Agreement (SLA) pada stasiun monitor tetap/transportable maupun stasiun monitor

bergerak dan perangkat portable Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung
Pada Tahun 2025, kegiatan pengukuran okupansi spektrum frekuensi dilaksanakan secara rutin sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dengan durasi selama 30 menit pada 3 (tiga) site transportable dan Okupansi selama 4 (empat) Jam menggunakan perangkat *transportable* untuk di Upload ke Report Online (ROL). Selain itu, pengukuran juga dilakukan menggunakan Stasiun Monitor Bergerak dengan durasi 2 jam 10 menit yang mencakup pemantauan terhadap 15 pita frekuensi dan dilaporkan pada aplikasi SMSN. Penilaian tidak hanya okupansi saja melainkan penilaian fungsi kondisi perangkat utama dan perangkat pendukung, serta kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan kerusakan perangkat

Pengukuran Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT Lampung :

$$\% = \frac{\left(\frac{\sum \text{SLA Stasiun Monitor Tetap/Transportable}}{\sum \text{Stasiun Monitor Tetap/Transportable}}\right) + \left(\frac{\sum \text{SLA Stasiun Bergerak}}{\sum \text{Stasiun Bergerak}}\right)}{2}$$

Tabel 3.7
IKSK-5 Realisasi Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

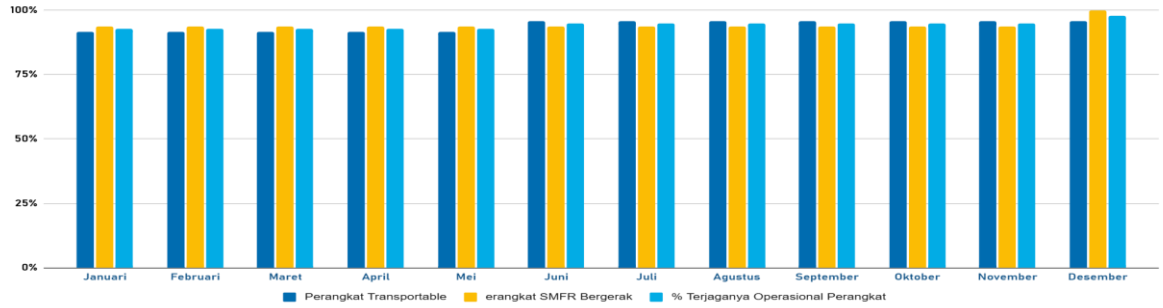
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban, serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	100%	95%	98.09%	95%	98.14%	95%	100%	85%	115.2%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Lampung Tahun 2025, persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT sebesar 85%. Dari tabel capaian terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT di atas dapat terlihat bahwa persentase rata–rata berfungsinya terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Sehingga diperoleh capaian kinerjanya adalah sebesar 115.2%.

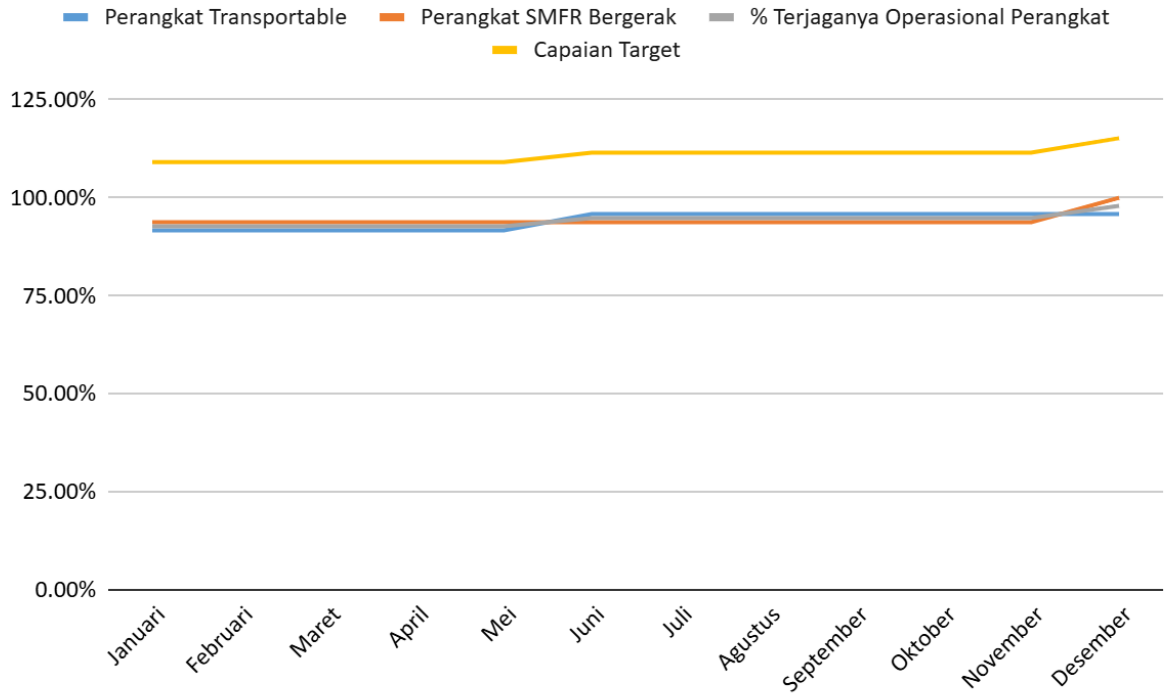
Tabel 3.8 Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

No	Bulan	Perangkat Transportable	Perangkat SMFR Bergerak	% Terjaganya Operasional Perangkat	Capaian Target
1	Januari	91.67%	93.75%	92.71%	109.07%
2	Februari	91.67%	93.75%	92.71%	109.07%
3	Maret	91.67%	93.75%	92.71%	109.07%
4	April	91.67%	93.75%	92.71%	109.07%
5	Mei	91.67%	93.75%	92.71%	109.07%
6	Juni	95.83%	93.75%	94.79%	111.52%
7	Juli	95.83%	93.75%	94.79%	111.52%
8	Agustus	95.83%	93.75%	94.79%	111.52%
9	September	95.83%	93.75%	94.79%	111.52%
10	Oktober	95.83%	93.75%	94.79%	111.52%
11	November	95.83%	93.75%	94.79%	111.52%
12	Desember	95.83%	100.00%	97.92%	115.20%

Tabel 3.9 Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT



Grafik 3.16
Capaian Kinerja Kumulatif IKSK-5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT



5.3. Analisis Pencapaian Target

Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio merupakan bagian penting dalam pengelolaan spektrum frekuensi agar dapat perangkat dapat digunakan secara optimal. Menurut *International Telecommunication Union* (ITU), sistem monitoring frekuensi radio perlu didukung oleh perangkat yang selalu dalam kondisi baik melalui pemeliharaan rutin, kalibrasi secara berkala, serta perbaikan yang cepat apabila terjadi gangguan teknis.

Beberapa faktor yang membuat target Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di Balai Monitor (Balmon) dapat tercapai jika dibandingkan dengan negara lain adalah lebih dipengaruhi oleh pendekatan kerja dan pengelolaan sumber daya yang tepat guna.

Keberhasilan Pencapaian Target terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT tahun 2025 karena adanya beberapa inovasi, antara lain:

a) Stasiun monitor tetap/transportable yang dimiliki oleh Balmon Lampung termonitor oleh aplikasi Sistem Monitoring Spektrum Nasional (SMSN) dan *Report Online* (ROL).
b) Sinergi dan kerjasama yang baik antar anggota tim kerja yang dilakukan secara efektif sehingga seluruh rangkaian kegiatan pemeliharaan perangkat SMFR dapat dilakukan dan diselesaikan sesuai dengan prosedur operasional standar dengan hasil yang memuaskan.
c) Stasiun Monitor telah mengimplementasikan aplikasi yang mengelola dan mengontrol perangkat secara jarak jauh, yaitu menggunakan aplikasi *Ewelink.*
d) Telah dipasang genset otomatis pada site *Transportable* Lampung Utara yang berfungsi untuk menyediakan pasokan listrik cadangan ketika terjadi pemadaman listrik. Genset otomatis juga dikenal dengan nama *Automatic Transfer Switch* (ATS).

Balai Monitor SFR Kelas II Lampung menjadikan Balai Monitor SFR Kelas II Manado sebagai pembanding (benchmark) dalam upaya menjaga operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio. Hal ini didasarkan pada kesamaan klasifikasi sebagai UPT Kelas II serta jumlah kabupaten/kota yang relatif sebanding,

sehingga kondisi wilayah kerja memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

Berdasarkan data yang tersedia, persentase (%) capaian kinerja dalam menjaga operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT menunjukkan hasil yang sangat baik. Balai Monitor SFR Kelas II Lampung berhasil mencapai nilai sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, sehingga telah melampaui target kinerja dengan nilai capaian 115.2%

Sementara itu, Balai Monitor SFR Kelas II Manado menunjukkan capaian yang lebih tinggi, yaitu sebesar 117,6% dari target yang sama, Nilai capaian ini menunjukkan bahwa kedua UPT telah mampu melaksanakan kegiatan dengan baik dalam menjaga operasional dan fungsi perangkat monitoring.

Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja kedua UPT dalam menjaga operasional Stasiun Monitor Frekuensi Radio telah berjalan secara optimal dan melebihi target yang ditetapkan.

IKSK	UPT DJID	Target	Realisasi	Capaian
Presentase (%) **Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT**	Balmon Lampung	85%	100%	115.2%
	Balmon Manado	85%	100%	117.6%

5.4.Hambatan dan Upaya Pencapaian Target

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target.

Dalam upaya menjaga operasional dan fungsi Stasiun Monitor Frekuensi Radio, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kondisi sebagian peralatan yang telah berusia lama dan memiliki tingkat penggunaan yang tinggi (lifetime pemakaian yang sudah sering digunakan), sehingga memerlukan pemeliharaan lebih intensif dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap operasional.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi, sehingga proses perbaikan belum dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya upaya peningkatan kinerja perangkat secara keseluruhan.

B. Upaya Percepatan dalam mencapai target

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain dengan meningkatkan pemeliharaan preventif secara terjadwal, memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, serta menetapkan prioritas dalam pengadaan dan pembaruan peralatan berdasarkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kondisi perangkat tetap terjaga dan operasional dapat berjalan dengan baik serta berkesinambungan.

C. Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target

Pada Tahun 2025, kegiatan Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan dampak positif baik bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai instansi penyelenggara maupun bagi masyarakat sebagai pengguna spektrum frekuensi radio.

a. Dampak Langsung

Dampak nyata dalam jangka pendek yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas di Provinsi Lampung dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari:

- Kondisi stasiun monitor yang selalu siap siaga (always-on) meminimalkan potensi gangguan teknis dalam mendeteksi interferensi sinyal. Dampak langsungnya, masyarakat umum di Lampung dapat menikmati layanan internet seluler yang stabil, bebas dari risiko panggilan putus (dropped calls), serta dapat menerima siaran TV Digital dan Radio FM dengan kualitas gambar dan audio yang jernih sebagai pemenuhan hak atas informasi dan hiburan.
- Performa perangkat monitoring yang prima mempercepat kemampuan Balmon dalam melokalisir sumber gangguan secara real-time. Jika terjadi gangguan sinyal publik di suatu wilayah (akibat penggunaan booster ilegal, HT yang tidak sesuai parameter, atau radio gelap),

Balmon dapat segera menindaknya sehingga durasi hilangnya sinyal (blank spot buatan) yang merugikan aktivitas harian warga dapat ditekan seminimal mungkin.

- Optimalnya fungsi monitoring memastikan frekuensi radio yang digunakan oleh fasilitas pelayanan publik masyarakat—seperti ambulans rumah sakit, pemadam kebakaran, dan instansi keamanan—terbebas dari interupsi. Dampak langsungnya, masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan darurat dapat terlayani secara cepat karena koordinasi petugas lapangan melalui radio komunikasi berjalan tanpa hambatan.
- Sterilnya frekuensi navigasi penerbangan dan pelayaran rakyat memberikan jaminan keselamatan langsung bagi masyarakat umum Lampung yang bepergian menggunakan transportasi publik (seperti di Bandara Radin Inten II dan Pelabuhan Bakauheni), termasuk memberikan ruang komunikasi yang aman bagi nelayan tradisional saat melaut.

b. Dampak Tidak Langsung

Dampak jangka panjang atau efek domino (multiplier effect) terhadap kenyamanan sosial, perlindungan ekonomi, dan ketahanan masyarakat di Provinsi Lampung:

- Ekosistem frekuensi yang kondusif menjamin keandalan jaringan komunikasi yang menopang infrastruktur perbankan dan gerbang pembayaran elektronik. Secara tidak langsung, hal ini melindungi perputaran ekonomi masyarakat umum dan pelaku UMKM dari risiko kegagalan transaksi finansial (seperti mobile banking, QRIS, dan mesin EDC) akibat distorsi sinyal.
- Frekuensi radio yang bersih dari gangguan mendukung stabilitas konektivitas internet yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah di Lampung. Dampak tidak langsungnya adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu layanan publik digital, seperti kelancaran pengurusan administrasi kependudukan daring (KTP/KK), pendaftaran sekolah (PPDB), hingga layanan kesehatan.
- Terjaganya fungsi monitoring memastikan jalur komunikasi cadangan berbasis radio (seperti yang dikelola oleh ORARI, RAPI, maupun jaringan komunikasi perhotelan/wisata) selalu siap dan bersih. Secara tidak langsung, masyarakat Lampung memiliki jaring pengaman sosial yang kokoh, di mana informasi tanggap darurat dapat disebarluaskan dengan cepat jika infrastruktur komunikasi utama lumpuh akibat bencana.
- Pemeliharaan preventif yang konsisten memperpanjang usia pakai (lifecycle) perangkat monitoring kedinasan yang bernilai investasi tinggi. Secara tidak langsung, hal ini menghemat anggaran belanja negara (APBN) dari biaya perbaikan besar atau pengadaan alat baru yang prematur, sehingga alokasi dana negara dapat dioptimalkan untuk program pembangunan fasilitas publik lainnya yang lebih dibutuhkan masyarakat.

5.5 Tindak Lanjut dan Inovasi Tahun Sebelumnya

Melalui pelaksanaan inspeksi rutin, pemeliharaan, serta perbaikan perangkat SMFR yang disertai dengan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan secara tertib, diperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja perangkat yang telah berjalan dengan baik selama ini. Kegiatan tersebut juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, sekaligus menilai inovasi yang telah dilakukan dalam upaya pemeliharaan perangkat SMFR.

Perbedaan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dari beberapa aspek. Pada tahun sebelumnya, kegiatan inspeksi, pemeliharaan, dan perbaikan perangkat SMFR lebih berfokus pada pelaksanaan rutin serta penanganan gangguan yang terjadi. Sementara itu, pada tahun berjalan, kegiatan tersebut telah disertai dengan pencatatan dan pelaporan yang lebih sistematis sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap kondisi dan kinerja perangkat. kegiatan ini akan terus ditingkatkan agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Upaya perbaikan akan disesuaikan dengan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya, termasuk capaian yang telah diraih serta kendala yang masih dihadapi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelaksanaan inspeksi dan pemeliharaan perangkat pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

Dengan demikian, target capaian kegiatan inspeksi dan pemeliharaan perangkat diharapkan dapat terpenuhi secara lebih maksimal serta

mendukung keberlangsungan operasional perangkat secara berkesinambungan.

5.6 Rekomendasi perbaikan selanjutnya

Sebagai langkah selanjutnya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung, membuat Rencana pelaksanaan kegiatan kalibrasi perangkat bekerja sama dengan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan perangkat tetap terjaga sesuai standar yang berlaku.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keandalan operasional perangkat monitor frekuensi radio dapat terus meningkat dan mampu mendukung pelaksanaan tugas secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3.10
Rencana kegiatan kalibrasi perangkat



DATA KALIBRASI DAN KONDISI PERALATAN SFR UPT BALAI MONITOR PROVINSI LAMPUNG

No	Jenis Stasiun	Tahun Rakitan	Receiver / Direction Finder	Spesifikasi	Kondisi	Kalibrasi Terakhir	Rencana Kalibrasi	Jenis Pengujian
1	Transportable	2021	TCI 709	9 kHz - 8.5 GHz (Mon) TODA	Baik	2024	2024	Uji Laboratorium
2	Transportable	2021	TCI 709	9 kHz - 8.5 GHz (Mon) TODA	Baik	2024	2024	Uji Laboratorium
3	Transportable	2021	TCI 709	9 kHz - 8.5 GHz (Mon) TODA	Baik	2024	2024	Uji Laboratorium
5	SPA	2015	ANRITSU MS2720-0732	9 kHz - 32 GHz	Baik	2023	2025	Uji Laboratorium
6	SPA	2015	Keysight 8960A	9 kHz - 32 GHz	Baik	2023	2026	Uji Laboratorium
7	TV Analyzer	2021	Seffram	5 MHz - 5450 MHz	Rusak	2023	2026	Uji Laboratorium
8	Spectrum Analyzer	2019	Agilent PSA6056	10 MHz - 5450 MHz	Baik	2023	2026	Uji Laboratorium
9	Spectrum Analyzer	2020	Keysight N9030A	10 MHz - 61 GHz	Baik	2025	2025	Uji Laboratorium
10	Spectrum Analyzer	2019	Signal Hound SA124B	10 kHz - 12.4 GHz	Baik	2023	2025	Uji Laboratorium
11	Portable Mon	2011	R&S PR100	9 KHz - 7.5 GHz	Rusak	2023	2023	Uji Laboratorium
12	Portable Mon	2012	R&S PR100	9 KHz - 7.5 GHz	Baik	2023	2023	Uji Laboratorium
13	Portable Mon	2014	R&S Bergoma	9 KHz - 8.5 GHz	Baik	2023	2023	Uji Laboratorium
14	Toyota Hilux	2012	DF206 (ESS 70)	10 MHz - 7.5 GHz	Baik	2023	2023	Uji Laboratorium
15	Toyota Hilux	2023	DF205		Rusak	2023	2025	Uji Laboratorium

5.7. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengelola SDM dan anggaran secara tepat dan terarah, sesuai dengan kebutuhan operasional serta skala prioritas kegiatan. Penempatan personel disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki agar setiap tugas dapat dilaksanakan secara optimal.

Sementara itu, penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang bersifat prioritas, seperti pemeliharaan preventif dan pembaruan peralatan yang diperlukan. Di samping itu, pemanfaatan peralatan yang tersedia dioptimalkan, serta perencanaan kegiatan disusun secara terpadu agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan operasional dapat berjalan dengan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas kinerja, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih tepat guna dan berkelanjutan.

5.8.Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK di lingkungan Balai Monitor SFR Kelas II Lampung menjadi salah satu upaya dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan, yaitu menjaga operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT tetap berjalan dengan baik. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga mendorong pegawai untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.

Dengan mengedepankan sikap akuntabel, kompeten, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat dapat dilakukan secara lebih optimal. Selain itu, kerja sama yang harmonis dan kolaboratif antarpegawai juga turut mendukung kelancaran operasional.

Melalui penerapan budaya BerAKHLAK tersebut, diharapkan kinerja organisasi semakin meningkat dan operasional Stasiun Monitor Frekuensi Radio dapat terus terjaga secara efektif dan berkesinambungan.

Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini :

a) Berorientasi Pelayanan, setiap Balai Monitor SFR kelas II Lampung memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada seluruh pengguna spektrum frekuensi radio. Hal ini dilakukan dengan memastikan ketersediaan perangkat monitoring yang dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan secara optimal oleh pengendali

frekuensi radio. pelayanan maupun di sisi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

b) Akuntabel, pemeliharaan perangkat dilakukan secara baik dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh instansi
c) Kompeten, setiap petugas terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
d) Harmonis, proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan agar perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur dapat berfungsi didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama.
e) Loyal, nilai tersebut didukung oleh tim kerja yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi dalam mencapai target pemeliharaan dan perbaikan. Melalui upaya tersebut, perangkat pendukung SMFR serta alat monitoring dan pengukuran dapat terus dijaga kondisinya agar berfungsi secara optimal.
f) Adaptif, Dalam pelaksanaan kegiatan, tim kerja mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan organisasi serta perkembangan teknologi yang terjadi. Hal ini memungkinkan setiap tugas dapat tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat perubahan dalam lingkungan kerja.
g) Kolaboratif, Dalam proses penyusunan rancangan kebijakan, dilakukan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Balai Monitor SFR Kelas II Lampung maupun pihak eksternal. Pihak eksternal tersebut meliputi akademisi dan pemangku kepentingan di bidang telekomunikasi yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kebijakan yang disusun menjadi lebih komprehensif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan yang ada.

5.9 Data Dukung

Gambar 3.9
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Monitor Frekuensi Radio (SMFR)



6. IKSK-6 Penanganan Sanksi Denda Administratif

6.1.Latar Belakang

Penanganan sanksi denda administratif merupakan salah satu indikator kinerja dalam rangka memastikan penegakan ketentuan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat/Perangkat Telekomunikasi (APT) di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Penanganan ini merupakan tindak lanjut dari temuan pelanggaran yang diperoleh dari berbagai kegiatan monitoring, pengukuran, inspeksi, serta penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Penanganan Sanksi Denda Administratif memiliki target sebesar 80%. Penanganan ini dilakukan melalui proses administrasi penagihan denda kepada pihak yang melakukan pelanggaran penggunaan SFR dan APT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, setiap temuan pelanggaran yang telah ditetapkan sanksi administratif berupa denda akan diterbitkan invoice atau tagihan pembayaran denda administratif. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan denda tersebut belum dilakukan pembayaran, maka akan dilakukan tindak lanjut berupa penyampaian Surat Reminder serta klarifikasi oleh UPT kepada pihak yang bersangkutan.

Pada **Tahun 2025**, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menerbitkan sebanyak **54 invoice denda administratif** yang berasal dari **59 temuan pelanggaran spektrum frekuensi radio**. Berdasarkan hasil pemantauan pembayaran, seluruh invoice tersebut telah **dibayarkan sebelum jatuh tempo**, sehingga tidak diperlukan tindak lanjut berupa penyampaian Surat Reminder maupun pelimpahan ke KPKNL.

Dengan kondisi tersebut, realisasi indikator kinerja telah mencapai **100%** dan bahkan **melampaui target yang telah ditetapkan**, yaitu sejak **bulan Maret 2025** seluruh kewajiban pembayaran denda administratif telah diselesaikan oleh pihak terkait. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator **Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif** tercatat sebesar **125% dari target yang ditetapkan**.

6.2.Tabulasi Data Capaian

Pada Tahun 2025, capaian indikator kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan data hasil kegiatan pengawasan, terdapat 59 temuan pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Tabel 3.11
Capaian IKSK-6 Penanganan Sanksi Denda Administratif

Sasaran kegaiatan	Indikator kinerja	2021		2022		2023		2024		2025
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi			90 %	101.1					0 %

6.3. Analisis Pencapaian Target

Capaian indikator kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 80%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 125%.

Dari total 59 temuan pelanggaran yang ditemukan, sebanyak 54 invoice denda administratif diterbitkan. Perbedaan jumlah tersebut disebabkan oleh adanya beberapa temuan pelanggaran pada lebih dari satu frekuensi dalam satu perusahaan/instansi yang sama, sehingga penanganan sanksi administratif dilakukan secara terintegrasi dalam satu invoice. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta memberikan kejelasan dalam proses penagihan kepada pihak pelanggar.

Seluruh invoice yang diterbitkan telah diselesaikan pembayarannya sebelum jatuh tempo, bahkan sejak bulan Maret 2025. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepatuhan perusahaan/instansi terhadap kewajiban pembayaran denda administratif.

Dalam mekanisme penilaian indikator kinerja, bobot tindak lanjut terhadap invoice denda administratif ditentukan berdasarkan tingkat penyelesaian, yaitu Reminder 1 sebesar 0,9, Reminder 2 sebesar 0,8, Reminder 3 sebesar 0,7, dan pelimpahan ke KPKNL sebesar 0,6. Namun pada Tahun 2025 seluruh invoice telah diselesaikan sebelum jatuh tempo, sehingga memperoleh bobot maksimal dalam penilaian kinerja.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum administratif di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan ketertiban penggunaan frekuensi.

Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Balai Monitor Lampung mengambil Balai Monitor SFR Kelas II Manado sebagai benchmark karena keduanya merupakan UPT Kelas II dan Jumlah Kabupaten dan Kota yang hampir sama. Kedua UPT telah mencapai target program Penanganan Sanksi Denda Administratif pada tahun 2025. Tabel berikut menunjukkan capaian kedua UPT :

Tabel 3.12
Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

IKSK	UPT DJID	Target	Capaian	Realisasi
Presentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	Balmon Lampung	80%	100%	125%
	Balmon Manado	80%	100%	125%

Benchmark ini menunjukkan bahwa kedua UPT Kelas II telah melaksanakan seluruh target kegiatan SOR dengan efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan di masing-masing UPT dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk peserta dari komunitas nelayan dan masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sumber daya manusia, mobilisasi petugas, dan penyampaian materi telah diterapkan secara optimal, sekaligus memberikan dasar bagi perencanaan inovasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

6.4. Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Targetdan Upaya Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif pada Tahun 2025, secara umum tidak terdapat hambatan yang signifikan. Seluruh proses penanganan, mulai dari identifikasi pelanggaran hingga penyelesaian pembayaran denda administratif, dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Upaya Percepatan dalam mencapai target

Meskipun demikian, untuk memastikan pencapaian target secara optimal, berbagai upaya strategis tetap dilakukan, antara lain sebagai berikut:

- **Peningkatan Koordinasi antar tim**
  Koordinasi antara tim monitoring, pengukuran, inspeksi, dan penertiban terus ditingkatkan guna memastikan setiap temuan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Sinergi antar tim ini berperan penting dalam mempercepat proses identifikasi pelanggaran serta menentukan jenis penanganan yang tepat, termasuk dalam penetapan sanksi administratif.
- **Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi**
  Kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pengguna spektrum frekuensi radio dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman terkait ketentuan penggunaan frekuensi serta konsekuensi administratif yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Upaya ini terbukti mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna.
- **Percepatan proses administrasi penertiban Invoice**
  Proses administrasi dalam penerbitan invoice denda administratif dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar tagihan dapat segera diterima oleh pihak pelanggar sehingga memberikan waktu yang cukup untuk penyelesaian pembayaran sebelum jatuh tempo.
- **Monitoring dan evaluasi pembayaran secara berkala**
  Monitoring terhadap status pembayaran denda dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh kewajiban dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kendala sejak dini sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipasi apabila diperlukan.

C. Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target

Pada Tahun 2025, kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan dampak positif baik bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai instansi penyelenggara maupun bagi masyarakat sebagai pengguna spektrum frekuensi radio.

a. Dampak Langsung

Dampak nyata dalam jangka pendek yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Provinsi Lampung sebagai pengguna akhir (end-user) layanan telekomunikasi:

- Penegakan sanksi denda administratif terhadap penggunaan alat/perangkat telekomunikasi ilegal (seperti penguat sinyal/booster tidak tersertifikasi) secara langsung mengeliminasi sumber

interferensi merugikan. Dampaknya, masyarakat merasakan keandalan jaringan seluler yang stabil, meminimalisir risiko kegagalan panggilan (dropped calls), serta memastikan kelancaran akses internet dalam pemenuhan kebutuhan komunikasi sehari-hari.

- Melalui penertiban dan pemberian sanksi kepada penyelenggara penyiaran yang melanggar parameter teknis atau tidak berizin, Balmon Kelas II Lampung berhasil menjaga kebersihan spektrum frekuensi radio penyiaran. Dampak langsungnya adalah masyarakat dapat menerima siaran TV Digital dan Radio FM dengan kualitas gambar dan audio yang jernih, bebas dari gangguan tumpang tindih sinyal (co-channel interference).
- Penegakan hukum yang konsisten memastikan pita frekuensi radio penerbangan (Bandara Radin Inten II) dan pelayaran (jalur penyeberangan Bakauheni-Merak) steril dari gangguan. Hal ini memberikan dampak keselamatan langsung bagi masyarakat pengguna transportasi publik, karena sistem komunikasi pemandu lalu lintas udara dan laut dapat berfungsi optimal tanpa interupsi yang berpotensi memicu kecelakaan.

b. Dampak Tidak Langsung

Dampak jangka panjang (multiplier effect) terhadap stabilitas sosial, penguatan ekonomi digital masyarakat, dan tata kelola pemerintahan di daerah:

- Tertibnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio menjamin stabilitas jaringan komunikasi yang menopang infrastruktur perbankan dan gerbang pembayaran elektronik. Secara tidak langsung, hal ini melindungi aktivitas ekonomi masyarakat Lampung, khususnya pelaku UMKM, dalam menggunakan layanan mobile banking, QRIS, dan mesin EDC secara aman tanpa kendala kegagalan sistem akibat distorsi sinyal.
- Ekosistem frekuensi yang kondusif mendukung keandalan konektivitas internet yang digunakan instansi pemerintah daerah di Lampung. Dampak tidak langsungnya adalah meningkatnya mutu pelayanan publik digital yang diakses masyarakat, seperti kelancaran administrasi kependudukan daring, sistem pendaftaran pendidikan (PPDB), hingga jangkauan layanan kesehatan elektronik.
- Seluruh raihan denda administratif yang diproses oleh Balmon Kelas II Lampung disetorkan secara langsung ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kapasitas fiskal negara untuk mendanai pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta program redistribusi kesejahteraan bagi masyarakat luas, termasuk di wilayah perdesaan Provinsi Lampung.

6.5. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran serta mendukung pencapaian indikator kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah melakukan berbagai tindak lanjut dan inovasi yang dikembangkan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya. Inovasi ini difokuskan pada peningkatan kualitas proses administrasi, percepatan penanganan, serta penguatan sistem pengelolaan data penertiban.

Adapun tindak lanjut dan inovasi yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- **Pengembangan aplikasi administrasi penertiban berbasis digital**
  Pengembangan aplikasi dilakukan untuk mendukung pengelolaan seluruh proses administrasi penertiban secara terintegrasi. Melalui sistem ini, proses pencatatan temuan pelanggaran, penerbitan surat teguran, hingga administrasi penanganan sanksi denda administratif dapat dilakukan dalam satu platform yang terstruktur. Hal ini mempermudah pengelolaan data serta meningkatkan kecepatan dalam proses penanganan pelanggaran.
- **Digitalisasi dokumen penertiban**
  Seluruh dokumen penertiban seperti surat teguran, berita acara penghentian, berita acara penyegelan, serta dokumen pendukung lainnya telah mulai dikelola dalam bentuk digital. Penerapan sistem ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik (paperless), tetapi juga meningkatkan keamanan, kemudahan akses, serta keterlacakan dokumen dalam proses administrasi.
- **Integrasi proses penanganan pelanggaran dan penagihan denda**
  Proses penanganan pelanggaran hingga penagihan denda administratif dilakukan secara lebih terintegrasi, sehingga alur dari temuan pelanggaran hingga penerbitan invoice menjadi lebih sistematis dan terkontrol. Integrasi ini juga meminimalisir potensi keterlambatan dalam proses administrasi serta meningkatkan akurasi data.

- **Peningkatan monitoring dan pengendalian proses administrasi**
  Melalui pemanfaatan sistem digital, proses monitoring terhadap tahapan penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih optimal. Setiap tahapan, mulai dari temuan hingga penyelesaian pembayaran, dapat dipantau secara lebih transparan sehingga memudahkan pengendalian serta evaluasi kinerja.
- **Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas**
  Inovasi yang dilakukan juga mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan pelanggaran. Setiap proses terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri kembali, sehingga meningkatkan kepercayaan serta kualitas tata kelola administrasi.

Dengan adanya tindak lanjut dan inovasi tersebut, proses penanganan sanksi denda administratif menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Hal ini turut berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja pada Tahun 2025 yang melampaui target yang telah ditetapkan.

6.6. Rekomendasi Perbaikan Selanjutnya

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat berkelanjutan. Pengembangan sistem digital yang lebih terintegrasi menjadi salah satu prioritas utama, khususnya dalam menghubungkan seluruh tahapan penanganan pelanggaran mulai dari temuan hingga penyelesaian pembayaran. Selain itu, peningkatan fitur monitoring pembayaran secara real-time juga diperlukan untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Kegiatan sosialisasi kepada pengguna spektrum frekuensi radio perlu terus diperkuat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum telekomunikasi dan pengelolaan sistem digital juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

6.7. Efisiensi

Pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif pada Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini tercermin dari seluruh invoice yang diterbitkan dapat diselesaikan tanpa memerlukan tindak lanjut tambahan seperti penyampaian Surat Reminder maupun pelimpahan ke KPKNL.

Selain itu, penerapan sistem administrasi berbasis digital telah mampu mengurangi waktu proses dan biaya operasional yang diperlukan dalam penanganan pelanggaran. Penggunaan dokumen elektronik juga mendukung efisiensi dalam pengelolaan arsip serta mempermudah proses penelusuran data. Optimalisasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan turut berkontribusi terhadap efisiensi yang dicapai, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6.8. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Penanganan Sanksi Denda Administratif

Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sanksi denda administratif, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung juga mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai budaya kerja ASN, yaitu:

a. Berorientasi Pelayanan, Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pelayanan yang informatif dan edukatif kepada pengguna spektrum frekuensi radio mengenai kewajiban perizinan serta konsekuensi administratif apabila terjadi pelanggaran.
b. Akuntabel, Proses penanganan pelanggaran dan penerapan sanksi denda administratif dilakukan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kompeten, Kegiatan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang monitoring spektrum frekuensi radio, inspeksi perangkat telekomunikasi, serta administrasi penegakan hukum di bidang telekomunikasi.
d. Harmonis, Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan serta pengguna spektrum frekuensi radio.
e. Loyal, Seluruh tim kerja menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi.

f. Adaptif, Tim kerja mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan serta perkembangan regulasi terkait pengelolaan spektrum frekuensi radio dan penerapan sanksi administratif.
g. Kolaboratif, Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif baik dengan unit kerja internal maupun dengan pihak eksternal yang terkait, guna memastikan penanganan pelanggaran dan penerapan sanksi administratif berjalan secara optimal

6.9 . Data Dukung

Gambar 3.10
Juara 2 Digiwave 2025 Kategori Pengelolaan Denda Administratif Spektrum Frekuensi Radio & Alat Perangkat Telekomunikasi



7. IKSK-7 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

7.1. Latar Belakang

Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler di Provinsi Lampung dilaksanakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sinyal dan akses internet di lapangan. Indikator kualitas ini penting untuk memastikan bahwa layanan digital yang diterima masyarakat terdata secara objektif, sehingga langkah-langkah percepatan digitalisasi di wilayah Lampung memiliki acuan data yang akurat dan sesuai dengan realitas di lokasi. Melalui pemantauan ini, pemerintah dapat mengidentifikasi titik-titik layanan yang kurang optimal maupun wilayah *blankspot* yang tidak terdeteksi secara administratif, serta menetapkan langkah koordinasi yang lebih tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, Balmon Lampung bersinergi dengan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital melalui *Pusat Monitoring Telekomunikasi* (PMT). Proses pengukuran dilakukan dengan metode pengujian statis di titik keramaian dan pusat pelayanan publik—seperti perkantoran, pasar, serta pusat pendidikan dan kesehatan—serta metode *drive test* di sepanjang jalur transportasi utama. Parameter pengukuran difokuskan pada kekuatan sinyal dan kestabilan akses internet, baik dalam kondisi diam maupun bergerak, untuk memastikan kontinuitas layanan bagi pengguna di berbagai situasi.Hasil dari pengukuran lapangan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan bahan masukan teknis strategis bagi operator seluler. Dengan tersedianya data lapangan yang riil, operator dapat melakukan optimasi dan perbaikan jaringan pada area-area yang membutuhkan perhatian khusus. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas kualitas layanan telekomunikasi di Provinsi Lampung, sehingga mampu mendukung aktivitas digital masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan efektivitas layanan publik secara berkelanjutan.

7.2.Tabulasi Data Capaian

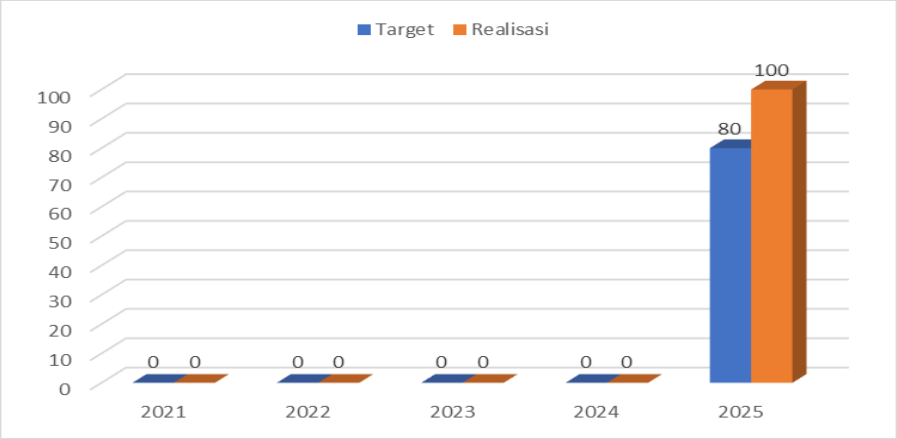
Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung selama Tahun 2025 dengan target capaian 80% (merujuk pada Nota Dinas No. 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025 tanggal 6 Februari 20 03 Maret 2025 24 perihal Penetapan Kinerja (PK) UPT Tahun 2025 adalah pelaksanakan kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan di Wilayah Kerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dengan target 80% wilayah Kabupaten/Kota dari total seluruh kabupaten / kota di wilayah kerja Balmon SFR Kelas II Lampung.

Tabel 3.13

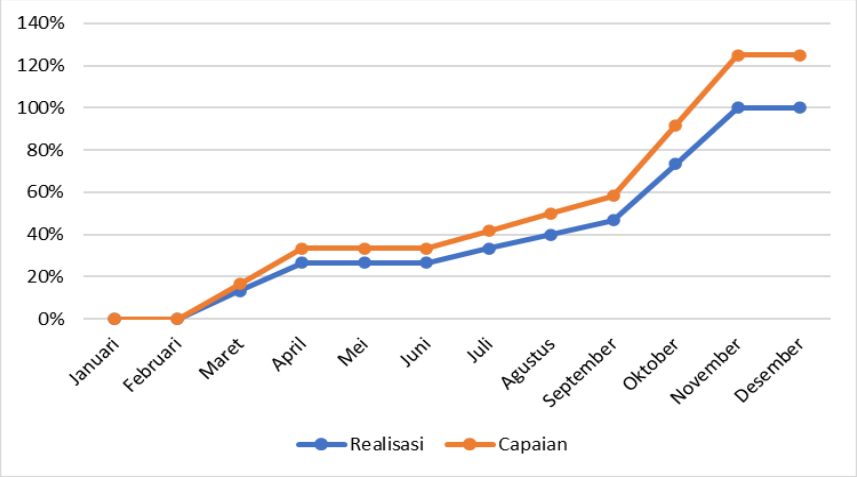
Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	-	-	-	-	-	-	80%	100%

Capaian IKSK-7 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Grafik 3.17
Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan



Grafik 3.18
Persentase Realisasi dan Capaian Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan



Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan Seluler (Static Test dan Drive Test) sebanyak 15 kabupaten/ kota dan telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2025 dari target 80% kabupaten/ kota di Provinsi Lampung terukur..

Dengan demikian, capaian Kinerja Balai Monitor Kelas II Lampung mencapai 125%.

7.3. Analisa Pencapaian Target

Keberhasilan capaian Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan sepanjang tahun 2025 dengan realisasi mencapai 100% dari seluruh kab/kota didukung oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Adanya pembagian tugas yang efektif, di mana Balmon bertanggung jawab penuh pada tahap pengambilan data (pengukuran), sementara PMT fokus pada pengolahan *logfiles* menjadi laporan teknis yang komprehensif.
2. Proses pengiriman *logfiles* dilakukan secara disiplin dalam rentang waktu 1 s.d 3 hari setelah pengukuran, yang memungkinkan tim PMT melakukan pengolahan data tepat waktu (2 s.d 7 hari setelah data diterima)
3. Penggunaan aplikasi seperti Google Maps dan MyMaps membantu tim dalam melakukan plotting awal lokasi pengukuran serta penentuan rute *drive test* yang paling efisien dan efektif di lapangan.
4. Kolaborasi antar tim yang melaksanakan kegiatan pengukuran kualitas layanan di lapangan.

Tabel 3.13
Benchmarking Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Aspek Perbandingan	Balmon SFR Kelas II Lampung	Balmon SFR Kelas II Manado
Target IKSK-7 (2025)	80%	80%
Realisasi	15 Kab/Kota dari 15 kab/kota	13 kab/kota dari 15 kab/kota
Capaian Kinerja	125%	100%

7.4. Kendala/ Hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target.

Meskipun realisasi mencapai 100% (15 Kabupaten/Kota), pelaksanaan kegiatan pada tahun perdana ini menghadapi beberapa tantangan teknis dan operasional sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data pemetaan awal (baseline) mengenai titik koordinat BTS eksisting dan kondisi historis kualitas sinyal di tiap wilayah, sehingga tim harus melakukan analisis buta (blind analysis) sebelum turun ke lapangan.
2. Proses koordinasi dan sinkronisasi alur pengiriman logfiles pasca-pengukuran antara Balmon Lampung dan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) masih dalam tahap penyesuaian di awal tahun anggaran.
3. Dinamika perangkat pengukuran (SmartBenchmarker/QualiPoc) yang terkadang mengalami crash atau malfungsi saat digunakan secara maraton dalam kondisi drive test jarak jauh, berpotensi menyebabkan risiko data korup (corrupted logfiles).
4. Kontur wilayah Provinsi Lampung yang beragam memicu kendala konektivitas real-time saat tim harus melakukan sinkronisasi atau pengiriman data awal dari area pelosok.

B. Upaya Percepatan dalam mencapai Target.

Untuk mengatasi kendala di atas dan memastikan target 80% terlampaui hingga mencapai 125% secara performa, Balmon Lampung menerapkan langkah-langkah strategis:

1. Melakukan plotting awal lokasi objek vital, pusat keramaian, dan penentuan rute drive test secara presisi menggunakan Google MyMaps dan software GIS. Strategi ini memangkas waktu pencarian rute di

lapangan dan memastikan area pengukuran representatif.
2. Melakukan pengecekan berkala pada fungsi hardware (perangkat genggam/penerima) serta pembaruan software ukur sebelum tim berangkat, guna menekan angka kegagalan pengambilan data seminimal mungkin.
3. Memberlakukan target ketat pengiriman logfiles maksimal 1 s.d 3 hari setelah pengukuran lapangan selesai. Hal ini memberikan ruang yang cukup bagi PMT untuk mengolah data secara tepat waktu.
4. Membangun saluran koordinasi intensif dengan tim PMT Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital untuk memitigasi kendala teknis logfiles secara *real-time.*

C. Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target

Tercapainya target IKSK-7 memberikan fondasi data yang kuat bagi pemetaan kualitas infrastruktur digital di Provinsi Lampung. Ketersediaan data yang valid menghilangkan ambiguitas informasi antara laporan administratif di atas kertas dengan realitas performa sinyal seluler yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan.

a. Dampak Langsung

- Tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan (RSRP, RSRQ, SINR, dan Throughput) yang siap divisualisasikan ke dalam peta digital/QGIS untuk 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- Diketahuinya titik-titik layanan yang kurang optimal (poor coverage) serta wilayah blankspot riil yang selama ini tidak terdeteksi oleh data administratif resmi.
- Tersedianya instrumen evaluasi teknis yang valid dan akurat untuk diserahkan kepada para operator seluler sebagai rujukan optimasi jaringan mereka.

b. Dampak Tidak Langsung

- Menjadi acuan strategis bagi Pemerintah Daerah dan Direktorat terkait dalam menentukan arah kebijakan pemenuhan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Lampung.
- Mendorong operator seluler melakukan perbaikan kualitas jaringan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses internet untuk kegiatan ekonomi kreatif, pendidikan, dan pelayanan publik.
- Terbentuknya pola kolaborasi tata kelola data yang solid, efisien, dan berkelanjutan antara UPT (Balmon Lampung) dengan unit pusat (Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital/PMT).

7.5. Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pasca pelaksanaan kegiatan di tahun 2025, Balmon Lampung berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan data hasil pengukuran kualitas layanan jaringan seluler agar tidak sekadar menjadi catatan administratif. Laporan ini akan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memetakan performa infrastruktur digital serta mengidentifikasi dinamika kualitas sinyal seluler di seluruh wilayah Provinsi Lampung secara akurat.

Temuan faktual yang mencakup berbagai parameter teknis akan digunakan menjadi bahan evaluasi sekaligus dipakai sebagai penanda utama dalam menentukan area mana yang memerlukan perhatian khusus. Identifikasi wilayah dengan kualitas layanan di bawah standar ini akan menjadi basis kuat dalam memberikan rekomendasi serta masukan teknis yang objektif kepada para operator seluler. Melalui langkah ini, diharapkan tercipta upaya perbaikan dan optimasi jaringan yang lebih presisi, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari pengawasan yang dilakukan melalui akses komunikasi yang lebih berkualitas dan merata.

7.6. Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Bertitik tolak dari hasil evaluasi terhadap dinamika operasional di tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung merumuskan beberapa langkah strategis sebagai upaya perbaikan ke depan. Pertama, proses pengolahan data pasca-pengukuran perlu dipercepat untuk menghindari penumpukan laporan. Kami menyarankan agar unit pelaksana di daerah (UPT) diberikan kewenangan atau kuasa lebih untuk melakukan pengolahan data secara mandiri. Dengan menyederhanakan alur birokrasi ini, hasil di lapangan dapat segera dianalisis dan menjadi bahan evaluasi yang cepat, baik bagi pimpinan

maupun untuk segera ditindaklanjuti oleh operator..

Kedua, kemampuan teknis petugas di lapangan harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi seluler yang semakin canggih. Selain itu, perawatan alat ukur wajib dilakukan secara rutin dan terjadwal. Hal ini penting untuk memastikan alat selalu akurat dan data yang kita ambil di lapangan benar-benar valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, koordinasi dengan pihak operator seluler perlu ditingkatkan menjadi agenda rutin, bukan hanya dilakukan saat ada masalah saja. Dengan rutin berbagi data hasil ukur, kita bisa mendorong operator untuk lebih cepat memperbaiki kualitas jaringan secara tepat sasaran.

Terakhir, kami menyarankan agar data hasil pengukuran di lapangan digabungkan dengan data aduan masyarakat. Dengan melihat area mana yang paling banyak dikeluhkan, dalam menentukan skala prioritas wilayah pengawasan selanjutnya dapat lebih tepat sasaran. Langkah ini akan memastikan bahwa kehadiran kita di lapangan benar-benar memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan sinyal yang lebih baik.

7.7.Efisiensi

Guna menjamin tercapainya target indikator kinerja terkait ketersediaan data hasil pengukuran kualitas layanan, Balmon Lampung mengimplementasikan strategi efisiensi yang berfokus pada optimalisasi sumber daya manusia serta efektivitas waktu operasional.

Pada aspek Sumber Daya Manusia, efisiensi diwujudkan melalui skema pembagian tugas yang sistematis. Melalui pengorganisasian tim yang tepat, pelaksanaan kegiatan drive test dan static test dapat dilakukan secara simultan tanpa memerlukan penambahan personel. Selain itu, kompetensi teknis personel dalam melakukan mitigasi kendala perangkat secara mandiri di lapangan berperan krusial dalam meminimalisir potensi waktu tunggu, sehingga produktivitas tim tetap terjaga selama masa operasional.

Sementara pada aspek Efisiensi Waktu, Balmon Lampung mengintegrasikan pemanfaatan perangkat lunak berbasis GIS seperti Google MyMaps dalam tahap perencanaan. Digitalisasi penentuan rute dan titik Point of Interest (PoI) ini memungkinkan tim untuk menyusun peta perjalanan yang paling efektif berdasarkan karakteristik geografis dan aksesibilitas wilayah. Melalui perencanaan jalur yang akurat, durasi perjalanan antar lokasi pengukuran dapat dipangkas secara signifikan, sehingga proses pengumpulan data di wilayah Provinsi Lampung menjadi lebih cepat, terukur, dan akuntabel.

7.8.Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

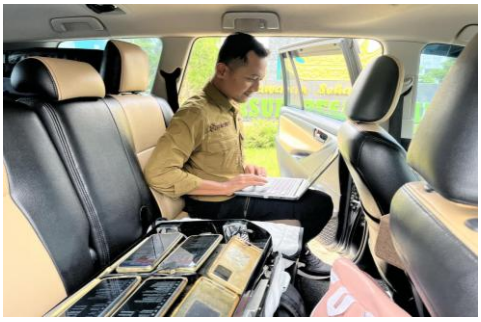
Implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam kegiatan pengukuran kualitas layanan. Berikut adalah beberapa contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan prinsip-prinsip ini:

1. Berorientasi Pelayanan: Tim Kerja berkomitmen memberikan dedikasi penuh dalam melakukan pengukuran yang akurat di lapangan. Fokus kami adalah memastikan ketersediaan data kualitas sinyal yang andal guna mendukung peningkatan layanan seluler bagi masyarakat.
2. Akuntabel: Proses pengambilan data *logfiles* dilakukan secara transparan sesuai dengan alur proses bisnis. Setiap tahapan pengukuran dicatat dengan baik agar data yang dikirimkan ke PMT dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan memiliki validitas teknis yang tinggi.
3. Kompeten: Personel dibekali keahlian teknis dalam teknik pengukuran serta mahir mengoperasikan perangkat lunak pendukung. Penguasaan terhadap tool seperti MyMaps dan Google Maps memastikan analisis data hasil pengukuran serta pemetaan sebaran sinyal dilakukan secara profesional dan sesuai standar teknis.
4. Harmonis: Menjaga koordinasi yang solid antara tim Balmon di lapangan dan tim PMT dalam pengolahan data. Kerja sama yang baik antar unit memastikan hambatan teknis saat pengukuran dapat diselesaikan secara efektif.
5. Loyal: Menjaga integritas dan kerahasiaan data hasil pengukuran milik negara. Tim berkomitmen menjalankan tugas sesuai dengan standar etika profesi dan kode perilaku ASN untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi.

6. Adaptif: Tim proaktif dalam menggunakan teknologi pemetaan digital untuk efisiensi rute dan penentuan Point of Interest (PoI). Kami siap menyesuaikan metode pengukuran jika terdapat perubahan kondisi di lapangan agar data yang dihasilkan tetap berkualitas.
7. Kolaboratif: Membangun sinergi internal yang kuat dalam proses bisnis penyediaan data, mulai dari pengambilan *logfiles* hingga penyusunan laporan akhir, guna mencapai tujuan organisasi dalam memantau kualitas layanan telekomunikasi.

7.9.Data Dukung

Gambar 3.10
Dokumentasi Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Jaringan



8. IKSK-8 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

8.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang sertifikasi dan perizinan operator radio, pemerintah melalui Ditjen Infrastruktur Digital berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 yang mengatur bahwa proses perizinan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dilaksanakan melalui sistem daring guna mewujudkan layanan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan. Sebagai bagian dari proses tersebut, Balmon SFR Kelas II Lampung menyelenggarakan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk seluruh tingkatan kecakapan sebagai persyaratan penerbitan IAR.
Selain itu, Balmon juga melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sertifikasi operator radio maritim melalui Short Range Certificate (SRC) dan Long Range Certificate (LRC) guna meningkatkan kompetensi nelayan dan operator kapal dalam penggunaan perangkat radio, prosedur komunikasi, kepatuhan regulasi frekuensi, serta aspek keselamatan pelayaran.

Pada tahun 2025, kedua layanan tersebut diintegrasikan dalam satu program Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS–IKRAN) sebagai upaya harmonisasi sertifikasi kompetensi dan perizinan dalam satu layanan terpadu. Integrasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan, optimalisasi sumber daya, kemudahan akses layanan, serta mendukung tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang legal, aman, dan berkelanjutan.

8.2.Tabulasi Data Capaian

Target capaian kegiatan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) dibagi menjadi dua, yaitu target pelaksanaan kegiatan UNAR sebanyak 6 kali, Pelaksanaan Kegiatan Bimtek SRC/LRC dan Pelaksanaan kegiatan Bimtek IKRAN sebanyak 1 kali kegiatan.
Kegiatan UNAR pada Balai Monitor SFR Kelas II Lampung diselenggarakan secara reguler dan non reguler (mobile) dengan sistem CAT (Computer Assisted Test), kegiatan UNAR reguler dilaksanakan sebanyak 4 kali di Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Lampung dan UNAR non reguler dilaksanakan 2 kali di Kota Metro, dan 1 kali di Kabupaten Lampung Utara sehingga total keseluruhan pelaksanaan UNAR pada Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada Tahun 2025 sebanyak 7 kali kegiatan UNAR. Sementara untuk Bimbingan Teknis SRC/LRC, dan IKRAN telah dilaksanakan masing-masing 1 kali kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3.14
IKSK-8 - Capaian Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi, dan Infrastruktur Digital	8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%	100%	260 %	100%	109%	100%	103%	100%	108.3%

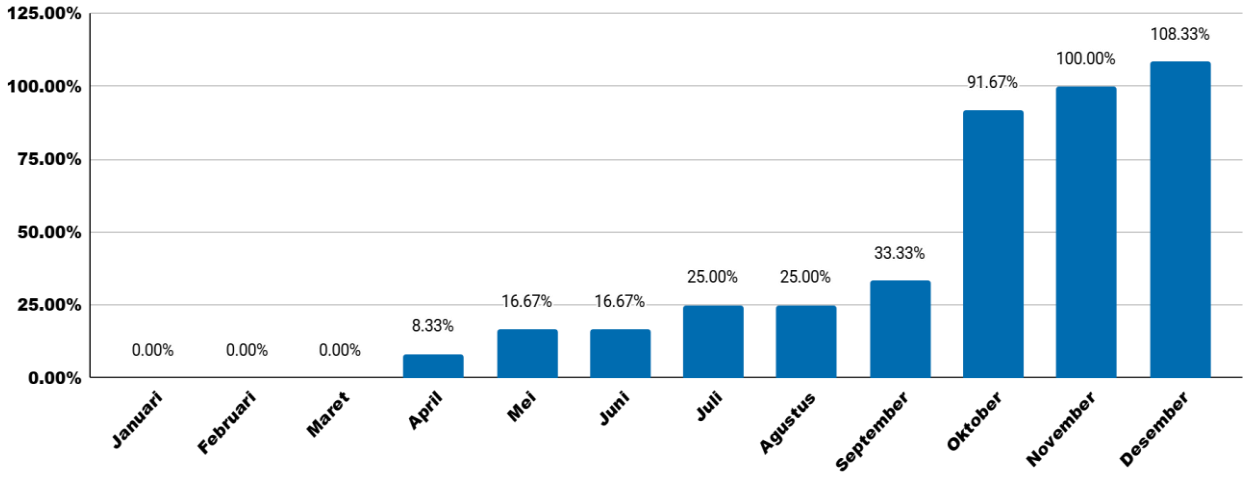
Tabel 3.15
IKSK-8 - Capaian Kegiatan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

IKSK	Jumlah Kegiatan UNAR		Jumlah Kegiatan MOTS-IKRAN	
	Target	Capaian	Target	Capaian
Presentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	**6**	**7**	**1**	**1**

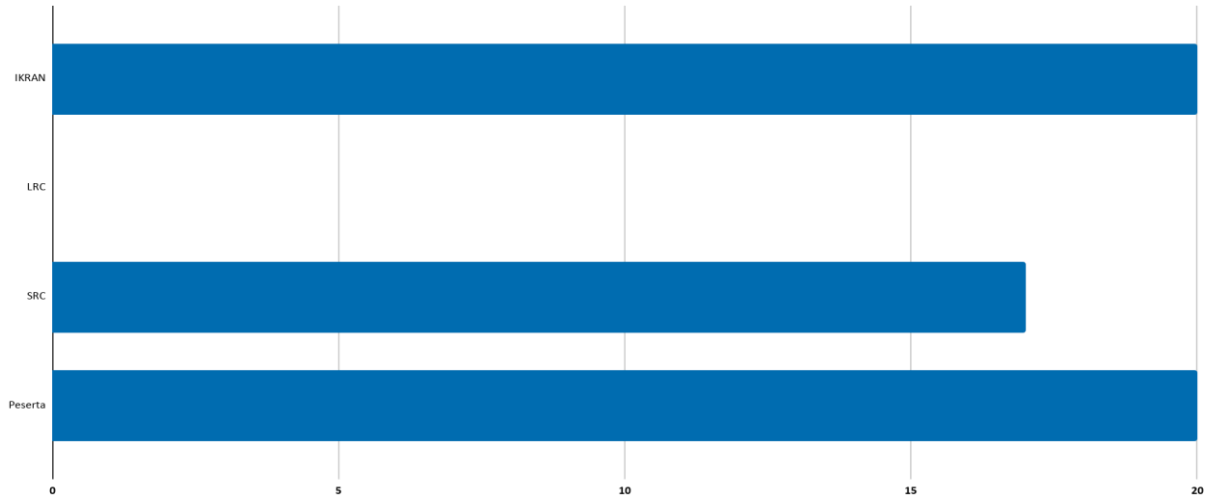
Tabel 3.16
IKSK-8 - Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

No	Bulan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Maret	18 Maret 2025	8	UNAR Reguler
2	Juni	07 Juni 2025	2	UNAR Reguler
3	Juli	10 Juli 2025	8	UNAR Reguler
4	September	24 September 2025	3	UNAR Mobile
5	Oktober	16 Oktober 2025	2	Bimtek SRC
		16 Oktober 2025	17	Bimtek IKRAN
		27 Oktober 2025	20	UNAR Reguler
6	November	11 November 2025	7	UNAR Mobile
7	Desember	24 Desember 2025	6	UNAR Mobile

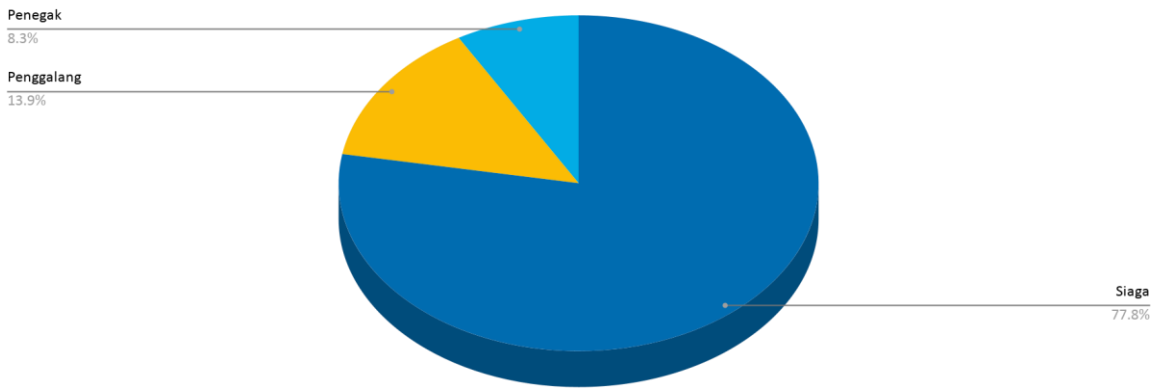
Gambar 3.11
Capaian Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)



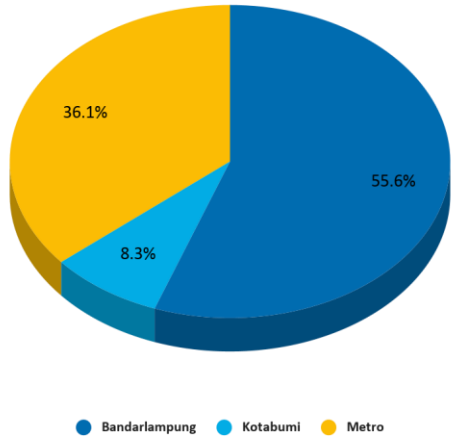
Gambar 3.12
Capaian Penerbitan SRC,LRC dan IKRAN Tahun 2025



Gambar 3.13
Peserta Ujian Negara Operator Radio (UNAR) Tahun 2025 Per Tingkatan



Gambar 3.14
Peserta Ujian Negara Operator Radio (UNAR) Tahun 2025 Per Kabupaten/Kota



8.3. Analisis Pencapaian Target

Program Penyelenggaraan Sertifikasi Operator Radio (SOR) di Indonesia, termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung, menunjukkan pencapaian target yang konsisten dan terukur. Secara global, sertifikasi operator radio amatir dan lisensi pengguna frekuensi radio merupakan indikator penting untuk pengelolaan spektrum frekuensi secara aman dan tertib. Meskipun data spesifik mengenai jumlah operator radio tersertifikasi per penduduk di kawasan Asia Tenggara atau internasional relatif terbatas, tren global menunjukkan bahwa banyak negara berkembang masih menghadapi tantangan terkait akses pelatihan, sertifikasi, dan kesadaran penggunaan frekuensi radio yang tertib.

Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki landasan regulasi dan mekanisme sertifikasi yang relatif matang, melalui bimbingan teknis SRC/LRC, IKRAN, dan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR). Keberhasilan ini tercapai meskipun terdapat tantangan geografis dan karakteristik masyarakat, misalnya sebagian besar nelayan di pelabuhan perikanan belum familiar dengan perangkat radio, dan penyebaran peserta yang tersebar di berbagai wilayah pesisir Lampung.

Dari perspektif inovasi dan strategi, keberhasilan pencapaian target SOR di Balai Monitor Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

A. Optimalisasi Mobilitas Petugas melalui Mobil Pelayanan

Penggunaan mobil pelayanan memungkinkan tim panitia untuk bergerak lebih cepat antara lokasi kegiatan, membawa perlengkapan dan materi, serta menjangkau peserta di wilayah pesisir. Strategi ini meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas pelayanan.

B. Pembagian Tugas yang Mendetail pada Sumber Daya Manusia

Penugasan terstruktur dan spesifik memungkinkan petugas fokus pada tanggung jawab masing-masing, sehingga jumlah petugas yang dibutuhkan dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan.

C. Pemanfaatan Modul dan Materi Digital

Digitalisasi materi bimbingan teknis dan sertifikasi memungkinkan penyampaian informasi lebih efisien, mengurangi redundansi, dan mendukung pemahaman peserta dari berbagai latar belakang, termasuk nelayan dan masyarakat umum.

D. Koordinasi dengan Stakeholder Lokal

Kerja sama dengan pengelola pelabuhan dan komunitas radio amatir membantu meningkatkan partisipasi peserta, terutama di pelabuhan yang belum familiar dengan radio. Hal ini menindaklanjuti kendala geografis dan

sosial yang diidentifikasi pada pelaksanaan sebelumnya.

Secara holistik, strategi-strategi ini membentuk kerangka keberhasilan pencapaian target SOR, memastikan sertifikasi operator radio dapat diakses secara luas, tepat sasaran, dan efisien, serta mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib di Provinsi Lampung.

Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

Balai Monitor Lampung mengambil Balai Monitor SFR Kelas II Manado sebagai benchmark karena keduanya merupakan UPT Kelas II dan Jumlah Kabupaten dan Kota yang hampir sama. Kedua UPT telah mencapai target program SOR, yang meliputi pelaksanaan UNAR 6 kali kegiatan, Bimtek SRC/LRC 1 kali, dan Bimtek IKRAN 1 kali. Tabel berikut menunjukkan capaian kedua UPT :

Tabel 3.17
Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

IKSK	UPT DJID	Target	Capaian	Realisasi
Presentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	Balmon Lampung	100%	100,8%	100,8%
	Balmon Manado	100%	150%	150%

Benchmark ini menunjukkan bahwa kedua UPT Kelas II telah melaksanakan seluruh target kegiatan SOR dengan efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan di masing-masing UPT dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk peserta dari komunitas nelayan dan masyarakat pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sumber daya manusia, mobilisasi petugas, dan penyampaian materi telah diterapkan secara optimal, sekaligus memberikan dasar bagi perencanaan inovasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

8.4. Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target.

Pelaksanaan program kerja Penyelenggaraan Sertifikasi Operator Radio (SOR) di Provinsi Lampung yang meliputi kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), Bimbingan Teknis Sertifikat Radio Elektronika (SRC/LRC), serta kegiatan Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN) dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah, karakteristik masyarakat pengguna, serta tingkat dukungan stakeholder terkait.

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik wilayah yang beragam, meliputi kawasan perkotaan, pedesaan, serta wilayah pesisir yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kondisi tersebut menyebabkan penyebaran informasi mengenai kegiatan sertifikasi operator radio tidak selalu merata di seluruh wilayah. Selain itu, jarak tempuh menuju lokasi pelaksanaan kegiatan pada beberapa daerah memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih besar sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan sertifikasi operator radio.

Dari aspek kondisi masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan komunikasi radio serta pentingnya kepemilikan sertifikat operator radio masih bervariasi. Pada kegiatan radio amatir, sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami peran radio amatir sebagai sarana komunikasi alternatif, pengembangan pengetahuan di bidang teknologi radio, serta sebagai sarana komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara itu pada sektor maritim, khususnya di kalangan nelayan, penggunaan perangkat komunikasi radio masih belum merata karena sebagian nelayan masih mengandalkan komunikasi langsung maupun penggunaan telepon seluler ketika berada pada wilayah yang masih terjangkau jaringan seluler.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat pengguna, khususnya nelayan yang sebagian besar masih

menjalankan usaha perikanan skala kecil dengan teknologi penangkapan yang relatif sederhana. Prioritas pengeluaran nelayan umumnya lebih difokuskan pada kebutuhan operasional melaut seperti bahan bakar, perawatan kapal, dan alat tangkap, sehingga pengadaan perangkat komunikasi radio serta kepemilikan sertifikat operator radio belum sepenuhnya menjadi kebutuhan utama bagi sebagian nelayan.

Selain itu, kondisi pemanfaatan perangkat komunikasi radio juga berbeda pada masing-masing wilayah pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung. Pada beberapa pelabuhan perikanan utama seperti Pelabuhan Perikanan Lempasing, Pelabuhan Perikanan Kota Agung, dan Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai, tingkat pemanfaatan perangkat radio di kalangan nelayan menunjukkan variasi. Nelayan di Pelabuhan Perikanan Lempasing relatif lebih familiar dengan penggunaan perangkat radio komunikasi dan menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis SRC/LRC maupun IKRAN. Sementara itu pada beberapa wilayah lainnya, pemanfaatan perangkat komunikasi radio masih relatif terbatas sehingga diperlukan pendekatan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan komunikasi radio yang tertib dan sesuai ketentuan.

Dari sisi stakeholder, pelaksanaan program sertifikasi operator radio memerlukan sinergi dengan berbagai pihak seperti komunitas radio amatir, pengelola pelabuhan perikanan, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat pengguna radio. Pada beberapa wilayah, proses penyampaian informasi dan mobilisasi peserta kegiatan masih memerlukan koordinasi yang lebih intensif agar kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pelaksanaan ujian dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

B. Upaya Percepatan dalam mencapai target

Penyelenggaraan SOR yang terdiri atas penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Short Range Certificate, Long Range Certificate, dan Izin Komunikasi Radio Perikanan tahun 2025 di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung telah terealisasi dan mencapai target yang direncanakan dengan melakukan berbagai Upaya baik pendekatan ke peserta, stakeholder dan inovasi pelaksanaan sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi dengan ORARI Daerah Lampung dan ORARI Lokal Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan ujian UNAR;
b. Mengarahkan peserta untuk mempelajari materi dan simulasi Try Out UNAR melalui aplikasi SeeNow sebelum pelaksanaan Ujian.
c. Memberikan layanan konsultasi online melalui nomor Hotline Whatsapp Balmon Lampung 0852-6666-6910;
d. Melakukan Asistensi pendaftaran peserta UNAR;
e. Pendekatan Balmon Lampung dengan berbagai stakeholder maritim seperti UPTD Pelabuhan perikanan, Otoritas Kesyahbandaran, UPP Perhubungan, TNI AL, Polairud, HNSI, serta kelompok nelayan lainnya di sekitar pelabuhan perikanan tempat loket MOTS;
f. Pemateri yang diundang untuk mengisi kegiatan Sosialisasi dan Bimtek adalah orang yang berkompeten pada bidangnya, beberapa kali juga materi disampaikan oleh orang dari pusat, sehingga masyarakat lebih berantusias untuk mengikuti kegiatan bimtek;
g. Setiap kegiatan sosialisasi dan bimtek yang dilakukan balmon lampung, selalu menyediakan fasilitas yang memadai baik dari segi peralatan, tempat, dan suasana,dll, sehingga mendukung terciptanya suasana bimtek yang kondusif dan nyaman bagi peserta;
h. Tersedianya perangkat pelayanan mobile berupa mobil pelayanan yang memungkinkan pelayanan SOR baik UNAR maupun MOTS dapat dilakukan secara cepat dan efisien menyesuaikan permintaan dari Stakeholder.

C. Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target

Pada Tahun 2025, kegiatan Penyelenggaraan Sertifikasi Operator Radio yang meliputi pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sebanyak 7 (enam) kali kegiatan serta penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sertifikat Radio Elektronika (SRC/LRC) dan Bimbingan Teknis Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN) masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan dampak positif baik bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai instansi penyelenggara maupun bagi masyarakat sebagai pengguna spektrum frekuensi radio.

a. Dampak Langsung

Secara langsung, pelaksanaan kegiatan sertifikasi operator radio memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah operator radio yang memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui pelaksanaan kegiatan UNAR, masyarakat yang memiliki minat pada bidang komunikasi radio memperoleh kesempatan untuk mendapatkan sertifikat operator radio amatir sebagai bentuk pengakuan terhadap kemampuan dalam mengoperasikan perangkat radio amatir secara legal dan bertanggung jawab.

Sementara itu, melalui kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC dan IKRAN, masyarakat pengguna perangkat komunikasi radio di sektor maritim, khususnya nelayan, memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan perangkat komunikasi radio sebagai sarana komunikasi yang mendukung aktivitas pelayaran dan keselamatan saat melaut. Kegiatan bimbingan teknis juga memberikan pemahaman mengenai tata cara penggunaan frekuensi radio yang tertib serta kewajiban perizinan yang harus dipenuhi oleh pengguna perangkat radio.

b. Dampak Tidak Langsung

Selain memberikan dampak langsung kepada peserta kegiatan, pelaksanaan program Penyelenggaraan Sertifikasi Operator Radio juga memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan spektrum frekuensi radio secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi operator radio dan penggunaan perangkat komunikasi radio yang sesuai ketentuan, potensi terjadinya penggunaan frekuensi radio secara tidak sah maupun penggunaan perangkat radio yang tidak memenuhi standar dapat diminimalkan. Hal ini secara tidak langsung mendukung terciptanya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang lebih tertib, efisien, dan terkoordinasi di wilayah Provinsi Lampung.

Di sektor maritim, peningkatan pemahaman nelayan mengenai penggunaan komunikasi radio juga berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan aktivitas melaut, karena komunikasi radio dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi kondisi cuaca, koordinasi antar nelayan, maupun penyampaian informasi pada kondisi darurat.

8.5. Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Program Sertifikasi Operator Radio Tahun 2024 pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melakukan penguatan strategi pelayanan guna meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan stakeholder. Evaluasi menunjukkan bahwa permohonan Sertifikat Operator Radio (SOR), baik melalui Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) maupun pada sektor maritim yang meliputi Short Range Certificate (SRC), Long Range Certificate (LRC), dan Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN), memiliki sebaran peserta yang cukup luas dan tidak terpusat di wilayah perkotaan.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, pada Tahun 2025 Balai Monitor menghadirkan inovasi berupa mobil pelayanan Sertifikasi Operator Radio (SOR). Mobil pelayanan ini dirancang sebagai unit layanan bergerak yang mendukung dua fungsi utama, yaitu:

A. Fasilitas Penyelenggaraan UNAR (Ujian Negara Amatir Radio)
   Mobil pelayanan dilengkapi dengan sarana pendukung pelaksanaan ujian, sehingga memungkinkan penyelenggaraan UNAR dilaksanakan secara mobile di berbagai kabupaten/kota sesuai kebutuhan dan jumlah peserta. Inovasi ini meningkatkan fleksibilitas penjadwalan serta memperluas jangkauan layanan kepada komunitas amatir radio di wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses.

B. Pelayanan Maritime On The Spot
   Mobil pelayanan dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan langsung di lokasi bagi sektor maritim, khususnya terkait SRC, LRC, dan IKRAN. Pelayanan ini meliputi:

a. Verifikasi dan validasi dokumen permohonan;
b. Fasilitasi konsultasi teknis dan regulasi komunikasi radio maritim;
c. Pendampingan proses administrasi untuk percepatan penyelesaian layanan;
d. Sosialisasi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio pada kapal dan sarana perikanan.

Melalui pendekatan jemput bola, pelayanan dapat dilaksanakan di pelabuhan, sentra nelayan, komunitas amatir radio, serta lokasi strategis lainnya sesuai permintaan stakeholder. Inovasi ini menjadi solusi atas tantangan geografis Provinsi Lampung yang memiliki wilayah pesisir luas serta komunitas amatir radio yang tersebar.

Adapun dampak dan manfaat dari inovasi ini antara lain:

a. Peningkatan Aksesibilitas Layanan, baik untuk peserta UNAR maupun pemohon layanan maritim;
b. Efisiensi Waktu dan Biaya bagi Stakeholder, karena layanan hadir lebih dekat dengan lokasi kegiatan;
c. Percepatan Proses Administrasi, khususnya pada layanan maritim melalui verifikasi awal di lokasi;
d. Peningkatan Kepatuhan Regulasi dan Tertib Spektrum, melalui pembinaan langsung di lapangan;
e. Peningkatan Citra dan Kualitas Pelayanan Publik, yang lebih adaptif, proaktif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan implementasi mobil pelayanan SOR pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menunjukkan komitmen terhadap transformasi pelayanan publik yang lebih efektif dan inklusif. Inovasi ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan jumlah peserta UNAR, optimalisasi pelayanan sektor maritim, serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi dan perizinan komunikasi radio.

8.6. Rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Sertifikasi Operator Radio (SOR) Tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026. Rekomendasi ini mempertimbangkan kondisi geografis Provinsi Lampung, karakteristik masyarakat pengguna perangkat komunikasi radio, tren teknologi komunikasi, serta faktor kendala yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Salah satu upaya utama adalah optimalisasi pemanfaatan mobil pelayanan monitoring spektrum frekuensi radio, yang mulai digunakan beberapa bulan terakhir. Mobil pelayanan dapat menjangkau wilayah pesisir, pelabuhan perikanan, dan daerah terpencil sehingga sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelayanan sertifikasi operator radio dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan lebih efektif, tidak perlu menyewa tempat, dan anggaran dapat difokuskan pada operasional serta peningkatan kualitas layanan.

Peningkatan sosialisasi juga penting untuk menghadapi tren penggunaan internet dan telepon seluler yang mulai menggeser radio konvensional. Sosialisasi perlu menekankan manfaat komunikasi

radio sebagai sarana komunikasi alternatif, terutama di sektor maritim dan situasi darurat, sehingga masyarakat tetap memahami pentingnya sertifikasi operator radio dan penggunaan perangkat komunikasi yang tertib.

Di sektor perikanan, pendekatan pembinaan kepada nelayan perlu diperkuat, khususnya di pelabuhan yang belum familiar dengan radio, seperti Kota Agung dan Labuhan Maringgai. Strategi ini menindaklanjuti kendala sebelumnya terkait ketidakmerataan pemanfaatan perangkat radio di beberapa pelabuhan, melalui mobil pelayanan, koordinasi dengan pengelola pelabuhan, dan sosialisasi intensif kepada kelompok nelayan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan kegiatan SOR Tahun 2026 diharapkan lebih efektif, menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendukung terciptanya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan bertanggung jawab di Provinsi Lampung.

8.7.Efisiensi

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Sertifikasi Operator Radio (SOR) Tahun 2025, berbagai upaya efisiensi sumber daya telah diterapkan untuk mendukung pencapaian target kegiatan secara optimal, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, waktu, maupun materi yang disampaikan.

A. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Panitia kegiatan SOR memanfaatkan tenaga internal Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung secara maksimal. Pembagian tugas dilakukan secara mendetail, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan UNAR, Bimtek SRC/LRC dan IKRAN, hingga evaluasi. Dengan pembagian tugas yang jelas dan terstruktur, setiap petugas dapat fokus pada tanggung jawabnya masing-masing, sehingga jumlah petugas yang terlibat dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan kegiatan.
Selain itu, mobil pelayanan mendukung mobilitas petugas dan pengiriman perlengkapan, sehingga petugas dapat lebih efisien dalam menjalankan tugas di berbagai lokasi kegiatan.

B. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dicapai melalui beberapa strategi, antara lain:

a. Pemanfaatan mobil pelayanan untuk mendukung mobilitas kegiatan, sehingga biaya transportasi petugas dan pengiriman materi dapat ditekan.
b. Pengelolaan anggaran operasional transportasi, konsumsi, dan logistik secara tepat sasaran, sehingga biaya dapat digunakan secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.
c. Kegiatan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN tetap membutuhkan fasilitas yang lebih lengkap dan ruangan yang cukup luas, namun pemilihan lokasi strategis dan pengaturan anggaran yang efisien memastikan biaya tetap terkendali.

C. Efisiensi Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan yang terstruktur memungkinkan pelaksanaan UNAR sebanyak 7 kali dan Bimtek SRC/LRC serta IKRAN masing-masing 1 kali, dengan jadwal yang realistis sesuai kapasitas sumber daya manusia dan lokasi kegiatan.
Mobil pelayanan juga mempermudah pergerakan petugas dan perlengkapan, sehingga waktu perjalanan dan koordinasi dapat diminimalkan, mempercepat proses pelaksanaan, dan waktu panitia maupun peserta dapat digunakan secara optimal.

D. Efisiensi Materi yang Disampaikan

Materi kegiatan disiapkan secara terfokus dan relevan dengan kebutuhan peserta. Penggunaan modul yang sudah tersedia dan digitalisasi materi memungkinkan penyampaian informasi lebih efisien, mengurangi redundansi, dan memudahkan peserta memahami materi sertifikasi operator radio. Materi disesuaikan dengan karakteristik peserta, misalnya nelayan atau masyarakat umum, sehingga efektivitas pembelajaran meningkat tanpa menambah beban materi yang tidak relevan.

Dengan penerapan strategi efisiensi tersebut, pelaksanaan kegiatan SOR Tahun 2025 dapat berjalan secara optimal, tetap memenuhi target

yang telah ditetapkan, meminimalkan pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan bagi Balai Monitor maupun masyarakat sebagai peserta kegiatan.

8.8. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam peserta ujian negara amatir radio berbasis CAT

Dalam proses pencapaian target persentase (%) pelaksanaan SOR di wilayah Lampung, Balai Monitor SFR kelas II Lampung pada tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini :

a) Berorientasi Pelayanan
- Berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat yang mengikuti proses Sertifikasi Operator Radio (SOR);
- Melaksanakan koordinasi dengan organisasi terkait (Stakeholder Amatir Radio dan Maritim) dalam rangka pembinaan dan kerjasama mewujudkan tertib perizinan dan penggunaan frekuensi amatir radio sesuai peraturan;
- Melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan SOR sebagai upaya melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

b) Akuntabel
- Pengawas UNAR dan Bimtek melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai pengawas untuk kepentingan pribadi;
- Penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Negara secara efektif dan efisien sepenuhnya untuk menyukseskan kegiatan SOR;
- mengutamakan sikap tidak tebang pilih dalam hal pelayanan demi mendukung terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

c) Kompeten
- Pengawas, panitia dan Pemateri SOR selalu meningkatkan kompetensi diri untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan SOR melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan;
- Tiap pegawai saling berbagi pengetahuan tentang tata cara penyelenggaraan SOR;
- Balmon lampung selalu menerapkan briefing sebelum acara untuk mencapai zero mistake dan evaluasi setelah acara agar dapat terus meningkatkan performa penyelenggaraan kegiatan SOR di waktu-waktu selanjutnya.

d) Harmonis
- Selalu berusaha menjaga harmonisasi internal agar pelaksanaan SOR dapat terselenggara dengan efektif dan efisien;
- Menghargai setiap peserta apapun latar belakangnya, karena peserta SOR berasal dari beragam profesi, usia dan pendidikan.

e) Loyal

Dalam pelaksanaan kegiatan SOR, Balmon Lampung selaku Instansi pemerintah di bawah Ditjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi selalu memegang teguh peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia, selalu menjaga nama baik ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara, serta selalu menjaga kerahasiaan data yang diperoleh terutama yang berkaitan dengan jabatan dan Negara.

f) Adaptif

Dalam pelaksanaan kegiatan SOR, Balmon Lampung selalu menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Balmon Lampung juga terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas serta selalu bersikap proaktif dalam pelaksanaan SOR demi kesuksesan program Sertifikasi Operator Radio (SOR).

g) Kolaboratif

Dalam pelaksanaan kegiatan SOR, Balmon lampung selalu membuka peluang kerja sama dengan seluruh sektor baik dari pemerintah (kementerian lain), ORARI Daerah maupun Lokal, perkumpulan nelayan, maupun stakeholder lainnya, selain itu juga Balmon Lampung selalu berusaha menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

8.9.Data Dukung

Gambar 3.15
Pelaksanaan UNAR Reguler



Gambar 3.16
Pelaksanaan UNAR Mobile



Gambar 3.17
Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC dan IKRAN



9. IKSK-9 Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

9.1.Latar Belakang

Penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL merupakan salah satu indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Balmon Lampung Tahun 2025 yang bertujuan untuk menghindari keterlambatan pembayaran Biaya Hak Pengguna (BHP) oleh wajib bayar dan untuk mencegah terjadinya pelimpahan piutang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Piutang yang nilainya di atas delapan juta rupiah diserahkan ke KPKNL, sedangkan piutang dengan nilai delapan juta ke bawah tetap dikelola oleh Kementerian/Lembaga.

Upaya pencegahan dan penangan piutang dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara online melalui email, Whats App, telepon juga secara offline dengan mendatangi langsung alamat wajib bayar. Upaya dilakukan agar invoice/surat tagihan dapat sampai dan diterima oleh wajib bayar.

9.2.Tabulasi Data Capaian

Tahun 2025 target Perjanjian Kinerja (PK) 100% dari kegiatan Penanganan Piutang 100% dihubungi, dan Koordinasi Pelimpahan Piutang ke KPKNL 100% yakni sebanyak 4 (empat) kali kegiatan.

Pada Tahun 2025 Balai Monitor SFR kelas II Lampung telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan piutang 100 % terhadap tagihan yang sudah terbit. Dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21.791.000, telah direalisasikan sebanyak Rp21.790.197 (100%) untuk kegiatan klarifikasi tagihan ke lokasi alamat wajib bayar sebanyak 7 kegiatan dengan jumlah wajib bayar didatangi sebanyak 52 wajib bayar. Jumlah tagihan BHP terbit tahun 2025 sebanyak 297, dengan tagihan Annual 215, reminder 58 dan tagihan Renewal 26 tagihan.(Jumlah Penanganan Piutang yang dihubungi)/(Target Piutang di UPT Tahun 2025) x 100 %=100%

Indikator kinerja sasaran kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2025, Balai Monitor Kelas II Lampung melaksanakan 7 kali (melebihi target)

kegiatan Koordinasi Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio berupa Koordinasi Dengan KPKNL termasuk Pelaksanaan Pengumpulan Dokumen Syarat Penghapusan Mutlak (PPNTO). Realisasi kinerja sebesar 175%, sehingga capaian kinerja sebesar 175%.

Tercapainya target penanganan piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL sebesar 137,5% dengan perhitungan rumus sebagai berikut :

$$\%= \frac{Target\ Penanganan\ Piutang\ Dihubungi + Capaian\ Koordinasi\ ke\ KPKNL}{2} \text{ X } 100\%$$

$$\%= \frac{100\% + 175\%}{2} \text{ X } 100\ \% = 137{,}5\%$$

Capaian realisasi Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL pada periode tahun 2023 s.d 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

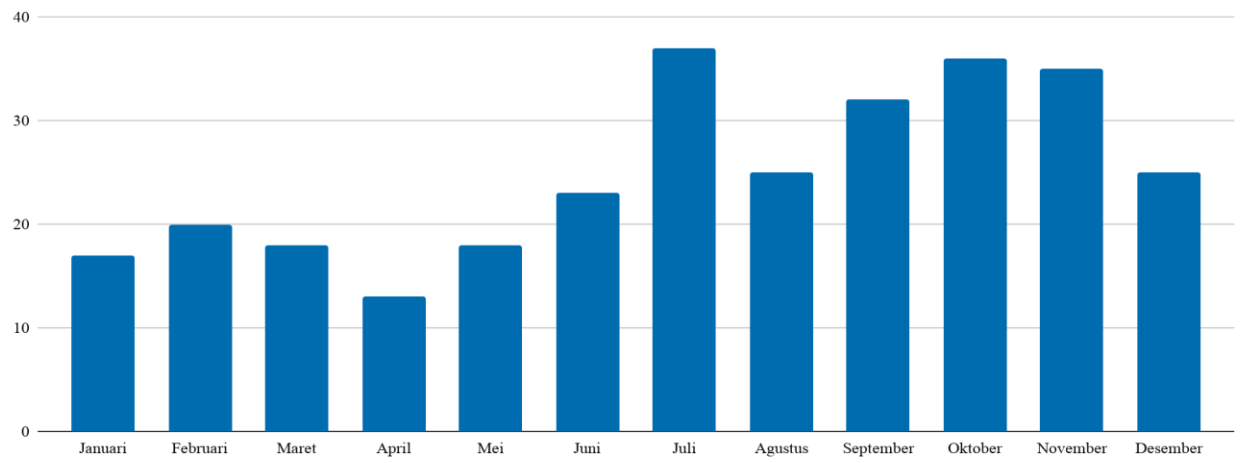
Tabel 3.18

IKSK-7 Capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

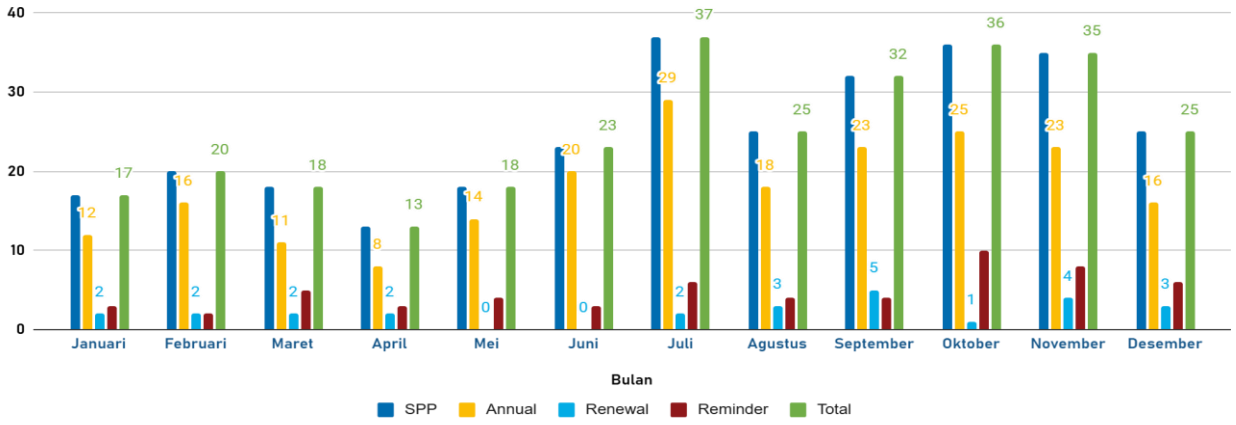
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban, serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	7.Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 3.19

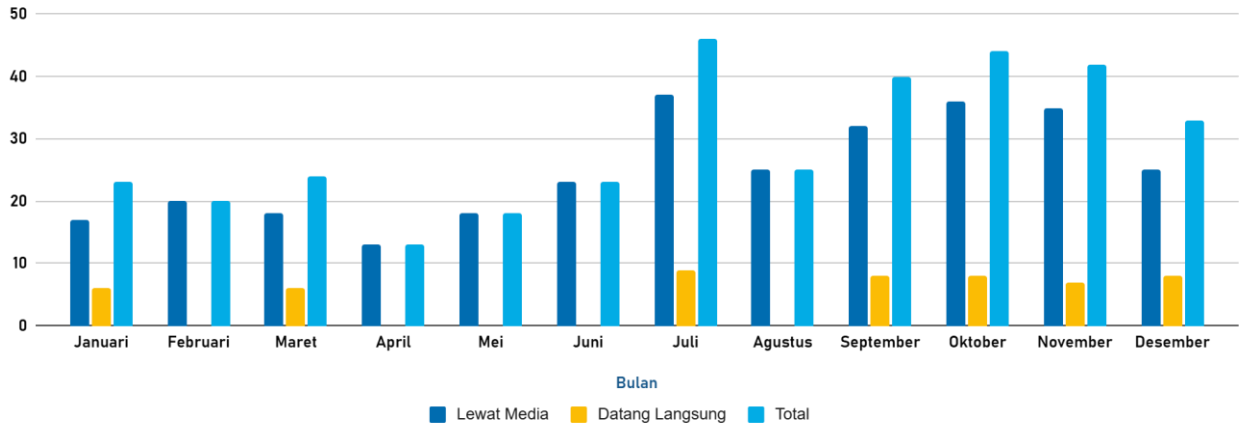
Jumlah Penerbitan Total Tagihan BHP Tahun 2025



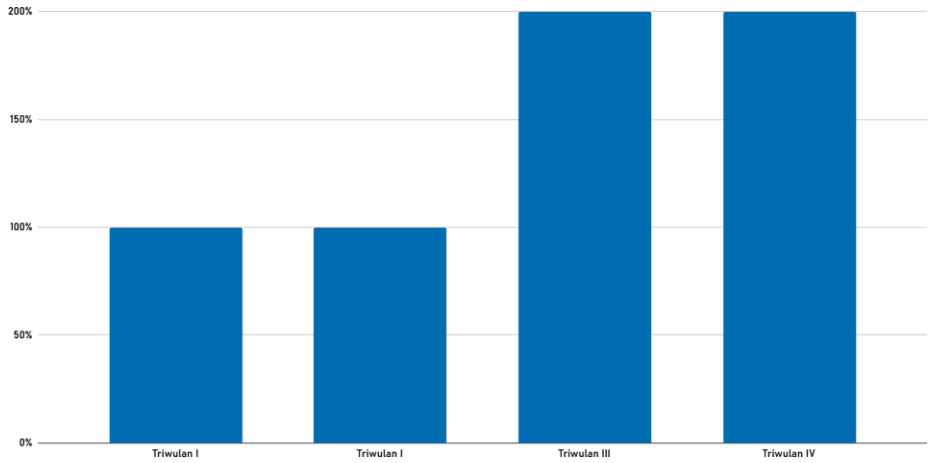
Grafik 3.20
Jumlah Penerbitan Tagihan BHP Tiap Jenis Tagihan 2025



Grafik 3.21
Jumlah Penanganan Piutang Dihubungi Berdasarkan Metode Menghubungi Tahun 2025



Grafik 3.22
Capaian Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL



9.3 Analisis Pencapaian Target

Berdasarkan data realisasi tahun berjalan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas II Lampung telah melaksanakan kegiatan penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio melalui penyampaian tagihan dan penanganan piutang kepada pengguna spektrum frekuensi radio.

Target penanganan piutang pada tahun berjalan ditetapkan sebanyak 297 berkas. Berdasarkan realisasi kegiatan, seluruh berkas tersebut telah dilakukan penanganan melalui penyampaian tagihan tahunan (annual), pembaruan (renewal), maupun pengingat (reminder). Dengan demikian tingkat capaian terhadap target yang ditetapkan mencapai 100%.

Selain itu, sebagai bagian dari penguatan proses penagihan dan penyelesaian piutang negara, Balmon Lampung juga melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait progres penanganan piutang yang telah dilimpahkan. Kegiatan koordinasi tersebut terealisasi sebanyak 7 (tujuh) kali kegiatan, dengan target tahunan sebanyak 4 kegiatan, sehingga tingkat capaian mencapai 175%.

Dengan demikian, capaian kinerja indikator Penanganan Piutang dihitung sebagai rata-rata dari dua indikator kinerja tersebut,

Capaian PK = (100% + 175%) / 2 = 137,50%

Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja penanganan piutang BHP Spektrum Frekuensi Radio pada Balmon Lampung melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL sepanjang tahun 2025 mencapai target 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

a) Distribusi SPP BHP Frekuensi Radio kepada wajib bayar melalui layanan online whatsapp Hotline Balmon Lampung, email dan telepoon .
b) Melakukan monitor status tagihan pembayaran BHP melalui https://billing-isr.kominfo.go.id/ dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran
c) Petugas loket pelayanan balmon lampung menghubungi wajib bayar yang mendekati jatuh tempo pembayaran melalui layanan whatsapp
d) Upaya penagihan langsung ke alamat wajib bayar jika surat tagihan tidak memberikan hasil optimal.

Tabel 3.19
Perbandingan Capaian Kinerja dengan UPT Lainnya

UPT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Lampung	**100%**	**137,5%**	**137,5 %**
Manado	**100%**	**100%**	**100 %**

Capaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penanganan piutang telah berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik ini dapat dipertahankan sebagai standar pengelolaan piutang yang baik dalam mendukung tertib administrasi dan penerimaan negara.

9.4.Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan dalam mencapai target

A. Faktor Kendala/Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan piutang BHP Spektrum Frekuensi Radio, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas distribusi tagihan maupun percepatan penyelesaian kewajiban pembayaran oleh wajib bayar. Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Kondisi Finansial Wajib Bayar
Sebagian wajib bayar mengalami keterbatasan kondisi finansial sehingga belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio tepat waktu. Kondisi ini umumnya terjadi pada perusahaan yang sedang mengalami penurunan aktivitas operasional atau instansi pemerintah yang menunggu pencairan anggaran untuk bisa melakukan melakukan pembayaran.

b. Perusahaan Tidak Lagi Beroperasi (Tutup/Pailit)
Beberapa wajib bayar diketahui telah menghentikan kegiatan usaha atau mengalami kondisi pailit. Hal ini menyebabkan kewajiban pembayaran menjadi sulit ditagihkan karena perusahaan tidak lagi memiliki aktivitas operasional maupun penanggung jawab yang dapat dihubungi.

c. Rendahnya Kesadaran Wajib Bayar dalam Mengakses Sistem Penagihan
Masih terdapat wajib bayar yang belum secara mandiri dan rutin mengakses serta mengunduh dokumen tagihan melalui aplikasi billing ISR pada situs billing-isr.komdigi.go.id. Kondisi ini menyebabkan informasi mengenai kewajiban pembayaran tidak segera diketahui oleh pihak wajib bayar.

d. Permasalahan Akses Akun Sistem Perizinan
Beberapa wajib bayar mengalami kendala dalam mengakses akun pada sistem billing-isr.komdigi.go.id. karena lupa informasi akun atau kata sandi. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam memperoleh dokumen tagihan secara elektronik.

e. Pergantian Penanggung Jawab Perusahaan
Pergantian personil yang bertanggung jawab atas pengelolaan izin frekuensi di dalam perusahaan seringkali tidak disertai dengan proses serah terima akun atau informasi administrasi yang memadai. Akibatnya, pihak yang baru menjabat tidak memiliki akses atau informasi yang diperlukan untuk melakukan pengunduhan tagihan maupun penyelesaian kewajiban pembayaran. Petugas pelayanan juga mengalami kesulitan dalam distribusi tagihan karena perubahan penanggung jawab.

B. Upaya Percepatan dan Langkah Perbaikan

Pada tahun 2025 ini telah dilakukan pengembangan inovasi berupa aplikasi billing ISR yaitu Aplikasi berbasis web untuk pencetakan invoice. Melalui Aplikasi billing ISR pengguna frekuensi radio yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dapat melakukan unduh dan cetak invoice SPP BHP Frekuensi Radio. Beberapa hal utama dalam pengembangan aplikasi Billing ISR pada tahun 2025 adalah:

- Aplikasi Billing ISR sudah terintegrasi dengan data SIMS sehingga wajib bayar dapat melakukan pengecekan terbitnya SPP BHP Frekuensi Radio melalui akun wajib bayar.
- Wajib bayar dan petugas pelayanan dapat mengetahui dan memantau Informasi status pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio yang belum terbayarkan.
- Tersedianya informasi jumlah tagihan dan jatuh tempo pembayaran.
- Terdapat fitur unduh invoice dalam bentuk file pdf.Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut serta memastikan tercapainya target kinerja penanganan piutang.

C. Dampak yang dihasilkan dari pencapaian target

Capaian kinerja indikator Penanganan Piutang sebesar 137,50% pada tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan piutang negara di lingkungan Balai Monitor SFR Kelas II Lampung.

a. Dampak Langsung

Pencapaian target penanganan piutang yang melampaui target menunjukkan bahwa seluruh Seluruh target penanganan piutang sebanyak 297 berkas telah berhasil ditindaklanjuti melalui penyampaian tagihan tahunan (annual), pembaruan (renewal), maupun pengingat (reminder), sehingga memastikan bahwa setiap kewajiban pembayaran yang timbul telah dikomunikasikan kepada wajib bayar secara tepat waktu.

Melalui penyampaian tagihan tahunan (annual), pembaruan (renewal), dan pengingat (reminder) secara aktif, masyarakat dan badan usaha pengguna spektrum frekuensi radio memperoleh informasi kewajiban pembayaran yang lebih jelas, teratur, dan tepat waktu. Kondisi tersebut membantu meminimalkan keterlambatan pembayaran serta mencegah timbulnya piutang negara BHP Frekuensi Radio.

b. Dampak Tidak Langsung

Keberhasilan pencapaian target penanganan piutang juga memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola spektrum frekuensi radio dan optimalisasi penerimaan negara. Pengelolaan piutang yang lebih efektif mendukung peningkatan penerimaan PNBP dari penggunaan spektrum frekuensi radio, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pendanaan pembangunan dan pelayanan publik oleh pemerintah.

Meningkatnya validitas data wajib bayar dan tertib administrasi turut memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kondisi tersebut menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio sebagai aset negara.

Dalam jangka panjang, pengelolaan piutang yang optimal mendukung terciptanya ekosistem telekomunikasi yang lebih sehat, tertib, dan berkelanjutan. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat, karena pengguna frekuensi radio yang patuh dan tertib administrasi akan mendorong penyelenggaraan layanan komunikasi yang lebih andal dan profesional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang negara, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta optimalisasi penerimaan negara yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

9.5 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan tindak lanjut penanganan piutang. Piutang timbul akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai peraturan yang berlaku. Tindak lanjut diperlukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya piutang negara serta penyelesaian penanganan piutang negara.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Lampung sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan Laporan Kinerja sebelumnya adalah pemanfaatan data pengguna frekuensi radio di wilayah Lampung yang memiliki tunggakan BHP SFR. Memastikan pemegang izin,jumlah piutang, dan status jatuh tempo telah tervalidasi secara akurat, penyampaian surat tagihan yang sudah terbit baik secara offline maupun melalui media online. Kemudian upaya penagihan langsung ke alamat wajib bayar jika surat tagihan tidak memberikan hasil optimal. Kegiatan ini didokumentasikan dalam Berita Acara Pengecekan Lapangan. Koordinasi dengan KPKNL di Wilayah Lampung terkait pelimpahan piutang dari Ditjen Infradigi, serta Koordinasi Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) menjadi tugas tambahan untuk Balai Monitor SFR Kelas II Lampung di tahun 2025.

9.6 Rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya

Berdasarkan capaian kinerja penanganan piutang pada tahun 2025 yang telah melampaui target, diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penguatan pada tahun berikutnya guna menjaga

keberlanjutan kinerja serta meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang negara.

- Balai Monitor SFR Kelas II Lampung perlu terus meningkatkan pemutakhiran dan validasi data wajib bayar secara berkala guna memastikan keakuratan informasi alamat, kontak, serta status operasional wajib bayar. Data yang akurat akan mendukung kelancaran proses penyampaian tagihan serta meminimalkan kendala dalam kegiatan penagihan.
- Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sarana komunikasi digital, seperti WhatsApp, surat elektronik (email), telepon dan media komunikasi lainnya, untuk mempercepat penyampaian informasi tagihan kepada wajib bayar, khususnya bagi tagihan yang mendekati jatuh tempo. Pemanfaatan teknologi komunikasi secara maksimal diharapkan dapat meningkatkan responsivitas wajib bayar dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
- Balai Monitor SFR Kelas II Lampung perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam rangka percepatan penyelesaian piutang yang telah dilimpahkan. Koordinasi yang lebih intensif akan mendukung proses tindak lanjut penanganan piutang secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Perlu dilakukan peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pengguna spektrum frekuensi radio mengenai kewajiban pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio, mekanisme penagihan, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib bayar.

Melalui pelaksanaan berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan pengelolaan penanganan piutang pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta terus mendukung optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor penggunaan spektrum frekuensi radio.

9.7 Efisensi

Efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan piutang di Balmon Kelas II Lampung dilaksanakan melalui optimalisasi metode komunikasi dan koordinasi dengan memanfaatkan media daring, seperti WhatsApp Hotline Balmon Lampung dan surat elektronik (email). Pemanfaatan media komunikasi online ini menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kebutuhan penggunaan anggaran operasional, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas dan pertemuan tatap muka dalam proses penanganan piutang.

Melalui penggunaan WhatsApp dan email, penyampaian informasi, konfirmasi data piutang, pengiriman dokumen, serta pengingat kewajiban pembayaran dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien tanpa memerlukan biaya tambahan yang besar. Selain itu, komunikasi secara daring juga memungkinkan proses tindak lanjut terhadap piutang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung efektivitas proses penagihan.

Dengan penerapan mekanisme komunikasi berbasis daring tersebut, penggunaan anggaran kegiatan penanganan piutang dapat lebih dioptimalkan. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk kegiatan yang benar-benar memerlukan kehadiran langsung petugas di lapangan, seperti kunjungan kepada pihak yang belum memberikan respons melalui komunikasi daring atau yang membutuhkan klarifikasi secara langsung terkait penyelesaian kewajiban piutang.

Melalui pendekatan ini, Balmon Kelas II Lampung dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan penanganan piutang. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi online diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan piutang yang lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada penggunaan sumber daya secara tepat guna.

9.8 Implementasi Budaya Nilai Berakhlak Pada Kegiatan

Dalam proses pencapaian target persentase (%) pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2025 telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:

a) Berorientasi pelayanan. Pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilaksanakan untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib

bayar dan stakeholder sebagai wujud pelayanan sebagai ASN yang melayani masyarakat, khususnya pengguna frekuensi radio

b) Akuntabel. Proses pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilakukan dengan transparan dengan melakukan pembayaran SPP BHP Frekuensi Radio melalui Bank Langsung dengan menggunakan Nomor Invoice.
c) Kompeten. Kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilaksanakan oleh tim kerja yang kompeten, yang mampu memberikan solusi jika terjadi kendala sistem pada aplikasi billing ISR dan mampu berkoordinasi dengan baik terhadap KPKNL.
d) Harmonis. Kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dilakukan dengan menjaga komunikasi yang baik, dan memberikan solusi jika terdapat kendala oleh wajib bayar
e) Loyal. melaksanakan kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL dengan menjaga nama baik balmon lampung terhadap wajib bayar dan stakeholder
f) Adaptif. Balmon lampung akan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan.
g) Kolaboratif. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL, Balmon lampung terbuka dalam bekerja sama dengan seluruh sektor baik dari pemerintah daerah (kementerian lain) dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah.

9.9.Data Dukung

Gambar 3.18
Kegiatan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL





10. IKSK-10 Sosialisasi Pelayanan Publik

10.1 Latar Belakang

Dalam upaya terus membangun dan meningkatkan kepatuhan dan ketertiban penggunaan frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi oleh masyarakat, sehingga perlu untuk memperluas sosialisasi pengetahuan dan pemahaman terkait perizinan dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Selama Tahun 2025, Balmon SFR Kelas II Lampung telah melaksanakan dan merealisasikan program kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) kali sesuai target dan jadwal yang direncanakan.

10.2 Tabulasi Data Capaian

Pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio kepada masyarakat, kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan frekuensi

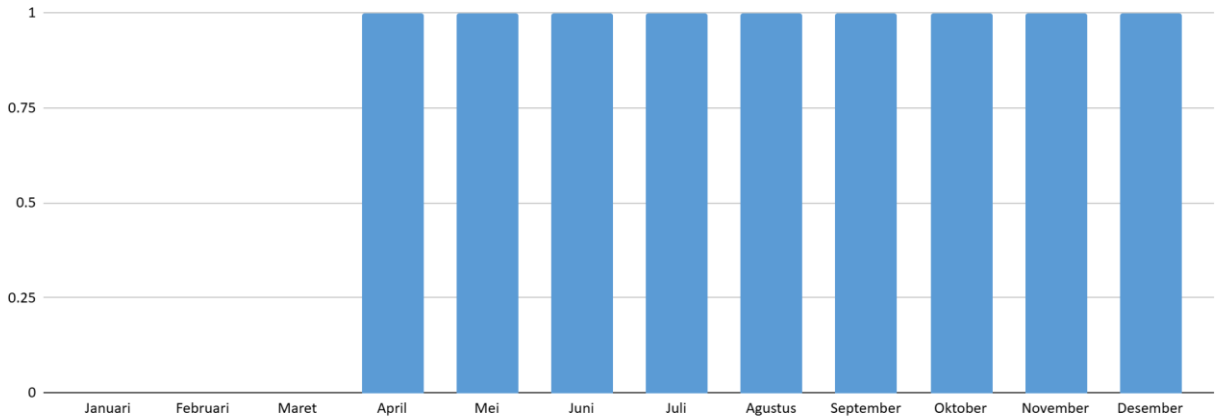
radio secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam kegiatan ini adalah **Persentase Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik**, dengan target yang telah ditetapkan sebesar **100%**. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2025, capaian indikator kinerja tersebut berhasil mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, realisasi kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio kepada masyarakat pada tahun tersebut juga tercatat sebesar **100%**, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengetahuan terkait peraturan dan tata cara/ alur proses perizinan penggunaan frekuensi radio, prinsip penggunaan dan pemanfaatan frekuensi radio yang baik dan benar serta mengenal dan memahami tugas fungsi Balmon SFR Kelas II Lampung dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio.

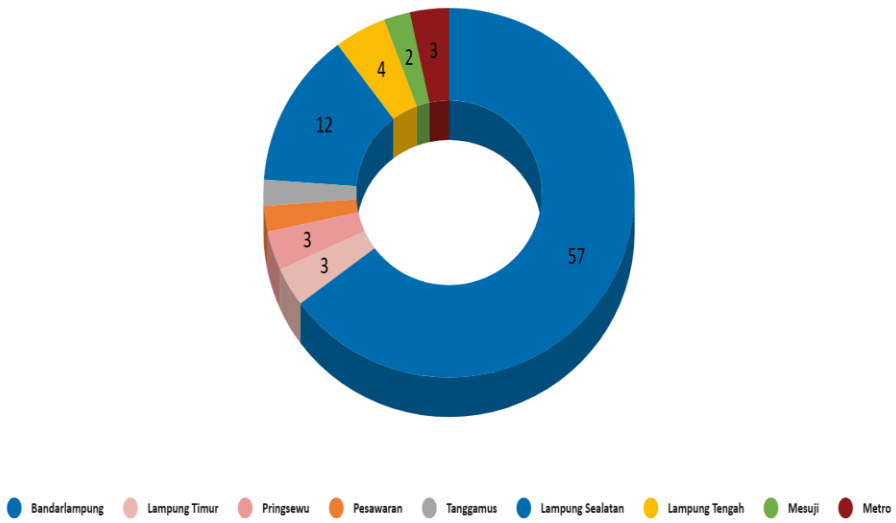
Tabel 3.20
Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024		2025	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban, serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

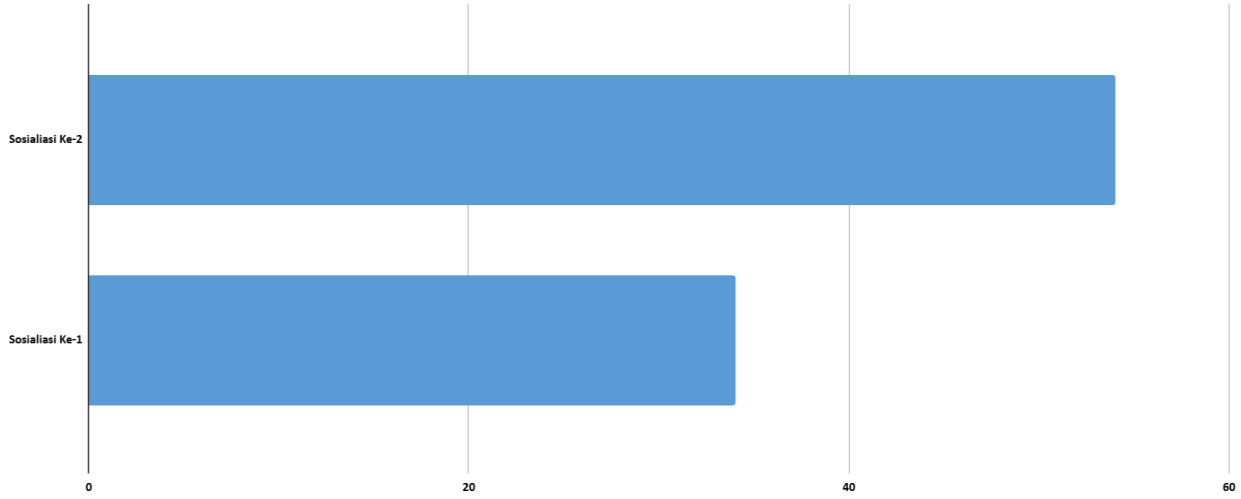
Grafik 3.23
Capaian Sosialisasi Perbulan di Tahun 2025



Grafik 3.24
Persebaran Peserta Sosialisasi Tahun 2025 Per Kabupaten/Kota



Grafik 3.25
Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2025



10.3 Analisis Pencapaian Target

Pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio kepada masyarakat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Indikator Kinerja Persentase terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik target 100%, capaian target 100% dan realisasi kegiatan 100%.

Balai Monitor Lampung mengambil Balai Monitor SFR Kelas II Manado sebagai benchmark karena keduanya merupakan UPT Kelas II dan Jumlah Kabupaten dan Kota yang hampir sama. Kedua UPT telah mencapai target program sosialisasi pelayanan publik, Tabel berikut menunjukkan capaian kedua UPT

Tabel 3.21
Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

IKSK	UPT DJID	Target	Capaian	Realisasi
Presentase (%) Penyelenggara	Balmon Lampung	100%	100%	200%

IKSK	UPT DJID	Target	Capaian	Realisasi
an Sosialisasi Pelayanan Publik	Balmon Manado	100%	100%	200%

Benchmark ini menunjukkan bahwa kedua UPT Kelas II telah melaksanakan seluruh target kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dengan efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan.

10.4 Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan Dalam Mencapai Target

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target.

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio kepada masyarakat Tahun 2025, secara umum kegiatan dapat terlaksana sesuai target. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi selama proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, antara lain:

Kendala/Hambatan:

1. Keterbatasan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian lokasi dan skala pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang harus menyesuaikan dengan jadwal narasumber, peserta, serta agenda instansi terkait.
3. Variasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi penggunaan frekuensi radio yang masih beragam, sehingga membutuhkan pendekatan penyampaian materi yang lebih adaptif.
4. Keterbatasan jangkauan peserta secara tatap muka sehingga tidak seluruh target sasaran dapat hadir secara langsung.

B. Upaya Percepatan/Penyelesaian:

1. Melakukan penyesuaian lokasi kegiatan yang lebih strategis dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan sosialisasi.
2. Melaksanakan sosialisasi secara hybrid (luring dan daring) untuk memperluas jangkauan peserta dan meningkatkan efektivitas penyebaran informasi.
3. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi/komunitas terkait guna memastikan keterlibatan peserta sesuai sasaran.
4. Menyusun materi sosialisasi yang lebih komunikatif, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai latar belakang.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana pendukung penyebarluasan informasi pasca kegiatan sosialisasi.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, seluruh kegiatan sosialisasi dapat tetap terlaksana secara optimal dan target kinerja Tahun 2025 berhasil dicapai sebesar 100%.

C. Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target

Realisasi 100% dari program Sosialisasi Pelayanan Publik sebanyak 2 (dua) kali sepanjang tahun 2025 merupakan langkah strategis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam menjalankan fungsi edukatif dan preventif. Melalui pendekatan yang humanis dan informatif ini, Balmon Lampung tidak hanya berhasil meningkatkan angka kepatuhan administratif, namun secara tidak langsung telah mengikutsertakan masyarakat umum sebagai mitra aktif dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Lampung. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan dampak positif baik bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai instansi penyelenggara maupun bagi masyarakat sebagai pengguna spektrum frekuensi radio.

a. Dampak Langsung

Dampak nyata dalam jangka pendek yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta ekosistem pengguna frekuensi di Provinsi Lampung setelah pelaksanaan sosialisasi:

- Pelaksanaan sosialisasi sebanyak dua kali pada tahun 2025 secara langsung meningkatkan pengetahuan masyarakat umum mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang sah sesuai ketentuan hukum. Masyarakat kini juga memahami alur dan prosedur perizinan secara resmi (seperti pengurusan Izin Stasiun Radio/ISR), sekaligus memiliki pemahaman

yang komprehensif mengenai kewajiban menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah tersandardisasi serta tersertifikasi resmi (memiliki label SDPPI). Melalui edukasi yang integratif ini, masyarakat menjadi lebih cermat dalam mengikuti prosedur hukum dan memilih perangkat yang aman, sehingga meminimalisir pelanggaran atau penggunaan perangkat ilegal akibat ketidaktahuan hukum.

- Melalui kegiatan ini, masyarakat mendapatkan kanal informasi langsung mengenai tata cara pengurusan izin frekuensi radio secara daring dan transparan. Dampak langsungnya adalah terpangkasnya sekat birokrasi, sehingga masyarakat umum, pelaku usaha lokal, maupun komunitas pengguna frekuensi khusus dapat berkonsultasi langsung dan mendapatkan kepastian layanan dari Balmon Lampung.
- Edukasi yang diberikan secara tatap muka langsung memberikan dampak instan berupa meningkatnya kesadaran peserta sosialisasi untuk segera menertibkan perangkat komunikasi mandiri mereka (seperti booster sinyal rumahan atau penggunaan HT/radio komunikasi yang tidak sesuai alokasi kanal). Hal ini secara langsung mencegah terjadinya gangguan interferensi baru di wilayah permukiman warga.

b. Dampak Tidak Langsung

Dampak jangka panjang atau efek domino (multiplier effect) terhadap ketertiban sosial, kepatuhan hukum, reformasi birokrasi, dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung

- Secara tidak langsung, sosialisasi yang konsisten dan terjadwal ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi (RB) pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik. Edukasi interaktif ini mendorong transformasi pelayanan dari yang semula bersifat pasif (waiting) menjadi pelayanan yang proaktif (serving), yang esensinya bermuara pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah.
- Melalui pemaparan prosedur perizinan yang transparan dan berbasis digital, kegiatan ini secara tidak langsung memperkokoh implementasi Zona Integritas di lingkungan Balmon Kelas II Lampung. Dengan mengedukasi masyarakat untuk mengurus perizinan secara mandiri dan resmi, program ini berhasil memitigasi risiko praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, maupun penggunaan jasa perantara (calo), sehingga tercipta ekosistem pelayanan yang bersih dan akuntabel.
- Dalam jangka panjang, dua kali stimulus sosialisasi ini menjadi fondasi dalam membangun budaya kepatuhan hukum kolektif. Masyarakat tidak lagi memandang regulasi frekuensi dan standardisasi perangkat sebagai pembatasan, melainkan sebagai instrumen perlindungan bersama untuk menjaga kenyamanan ruang udara digital di Provinsi Lampung.
- Seiring dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat hasil dari sosialisasi, jumlah penggunaan perangkat ilegal yang memicu polusi frekuensi dapat ditekan. Dampak tidak langsungnya adalah terjaganya kualitas jaringan internet seluler, kebersihan sinyal TV Digital, dan stabilitas frekuensi radio siaran yang dikonsumsi oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari.
- Keberhasilan merealisasikan target sosialisasi sebanyak 2 kali sesuai jadwal yang direncanakan pada tahun 2025 membuktikan komitmen Balmon Lampung dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal ini secara tidak langsung meningkatkan indeks kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Kementerian Komunikasi dan Digital di daerah.

10.5 Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

- Merencanakan kegiatan dengan berdasarkan tema kegiatan dengan konsep penyusunan yang baik.
- Menyiapkan narasumber terkait sesuai dengan tema kegiatan.
- Menentukan target peserta undangan kegiatan sosialisasi sesuai dengan tema kegiatan.
- Menyusun tim kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan tugas dalam kegiatan.

- Menyiapkan sarana dan prasarana pada kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan.

10.6 Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Merencanakan program kerja sosialisasi dengan target wilayah dan peserta di mana program Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio belum pernah terlaksana.
Mengevaluasi peserta dari tahun sebelumnya untuk menyusun daftar undangan prioritas sehingga menghasilkan sosialisasi tahun 2025 dengan peserta yang berasal dari ISP dan Konsesi

10.7 Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan sosialisasi perizinan frekuensi radio, mencakup beberapa aspek dari sisi efisiensi waktu dimana pendataan konfirmasi kehadiran peserta menjadi lebih cepat dengan adanya konfirmasi secara digital, pengumpulan data lebih cepat dan rekap otomatis. Kemudian penggunaan materi digital untuk sosialisasi memungkinkan pengurangan biaya cetak dan distribusi fisik.

10.8 Implementasi Budaya Nilai Berakhlak Pada Kegiatan

Dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perizinan Frekuensi Radio kepada Masyarakat, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio. Memberikan pelayanan yang baik kepada peserta yang menghadiri kegiatan Sosialisasi. Memberikan pelayanan dengan ramah, cekatan dan memberikan solusi atas kendala-kendala selama kegiatan berlangsung. Melakukan evaluasi kegiatan Sosialisasi Frekuensi Radio Kepada Masyarakat untuk perbaikan kegiatanselanjutnya.

- Akuntabel, petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas. Petugas pelayanan memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap penggunaan barang milik negara untuk kegiatan pelayanan dengan secara baik, efektif dan efisien. Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

- Kompeten, petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/ kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi; Memiliki rasa untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan dan pengalaman antar setiap pegawai.

- Harmonis, narasumber mampu memberikan materi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan peserta dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan peserta.

- Loyal, taat dan tertib dalam menjalankan kegiatan Sosialisasi sesuai dengan susunan acara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

- Adaptif, panitia tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait kegiatan yang dapat terjadi sewaktu–waktu. Berkontribusi dalam kegiatan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi kepada masyarakat dengan namun mudah dipahami. Penyesuaian lokasi kegiatan dilakukan sebagai upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan secara hybrid melalui kombinasi metode luring dan daring.

- Kolaboratif, panitia berkoordinasi dan bekerjasama dengan narasumber dan pihak terkait untuk menyukseskan kegiatan Sosialisasi.

10.9 Data Dukung

Gambar 3.19
Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik di Balmon SFR Kelas II Lampung



11. IKSK-11 Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Dalam upaya pencapaian kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Balmon SFR Kelas II Lampung, telah dilakukan Survei Kepuasan Pelayanan Publik sebanyak 4 (empat) kali pelaksanaan yang dimulai dari awal bulan tahun 2025 sampai dengan akhir tahun 2025. Survei ini ditujukan pada penilaian hasil kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari unit kerja yang dinilai secara langsung oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat pelayanan. Hasil Survei ini disampaikan secara terbuka sebagai informasi hasil kualitas pelayanan publik di Balmon SFR Kelas II Lampung sebagai UPT Ditjen Infrastruktur Digital.

11.1. Latar Belakang

Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)” Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), mempunyai tugas dan fungsi terkait pelayanan publik yaitu Asistensi, konsultasi pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio, Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio, dan Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Penerima manfaat indikator ini meliputi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berintegritas, serta dapat memenuhi kepentingan dan harapan pengguna layanan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan survei kepada pengguna layanan dan stakeholder secara berkala.

11.2 Tabulasi data capaian

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga akhir Tahun 2025, diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Indeks Integritas, Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) , dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) telah mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat direalisasikan secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
Adapun hasil dari 4 (empat) kegiatan survei yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu seperti berikut:

Tabel 3.22
Hasil Survei Selama Tahun 2025

Indikator	Hasil	Ket
Triwulan 1	3,83	Tercapai
Triwulan 2	3,86	Tercapai
Triwulan 3	3,94	Tercapai
Triwulan 4	3,93	Tercapai

Indikator Kinerja Persentase terlaksananya kegiatan Survei Kepuasan Pelayanan Publik pada 5 Tahun terakhir selalu mencapai target dan realisasi kegiatan 100%.

Tabel 3.23
Hasil Survei Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target	Reaslisasi	Ket
2025	100%	100%	Tercapai
2024	100%	100%	Tercapai
2023	100%	100%	Tercapai
2022	100%	100%	Tercapai
2021	100%	100%	Tercapai

11.3 Analisis Pencapaian Target

Capaian indikator menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2025. Survei menggunakan alat bantu berupa kuesioner berbasis elektronik, dimana responden yang memiliki ISR dan SOR dapat mengisi kuesioner melalui formulir online

Balai Monitor Lampung mengambil Balai Monitor SFR Kelas II Manado sebagai benchmark karena keduanya merupakan UPT Kelas II dan Jumlah Kabupaten dan Kota yang hampir sama. Kedua UPT telah mencapai target program sosialisasi pelayanan publik, Tabel berikut menunjukkan capaian kedua UPT :

Tabel 3.24
Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

IKSK	UPT DJID	Target	Capaian	Realisasi
Presentase (%) Penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelayanan Publik	Balmon Lampung	100%	100%	100%
	Balmon Manado	100%	100%	100%

Benchmark ini menunjukkan bahwa kedua UPT Kelas II telah melaksanakan seluruh target kegiatan Survei Kepuasan Pelayanan Publik dengan baik sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan di masing-masing UPT dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

11.4 Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target

Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyederhanakan alur perizinan spektrum frekuensi radio secara daring (online), masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Lampung yang memiliki hambatan psikologis berupa kurangnya kemauan untuk mempelajari dan memahami tahapan prosedur yang baru.

Adanya keengganan untuk membaca panduan regulasi membuat sebagian responden secara subjektif langsung menilai bahwa alur perizinan memiliki tahapan yang sangat panjang dan birokratis. Penilaian negatif dalam survei tersebut seringkali bukan disebabkan oleh sistem pelayanan Balmon yang tidak optimal, melainkan berakar dari resistensi mandiri masyarakat terhadap perubahan sistem dan kurangnya minat untuk memahami alur pemrosesan dokumen yang sebenarnya sudah dipangkas menjadi lebih ringkas.

Provinsi Lampung memiliki kontur geografis yang luas, meliputi wilayah pesisir, kepulauan (seperti di pesisir barat dan Lampung Selatan), hingga area pegunungan dan pedalaman. Permasalahan umum berupa keterbatasan infrastruktur jaringan internet (blank spot) di beberapa daerah tingkat tapak membuat metode pengisian survei yang berbasis digital (online) sulit diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat penerima manfaat (misalnya nelayan tradisional atau pengguna frekuensi di pelosok daerah). Hal ini menghambat perolehan representasi data survei yang sepenuhnya inklusif.

Tingkat pemahaman masyarakat Lampung terhadap pentingnya regulasi spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi masih belum merata antar-wilayah (perkotaan vs perdesaan). Banyak masyarakat penerima manfaat akhir yang merasa awam dengan istilah teknis operasional Balmon dalam kuesioner. Akibatnya, muncul keengganan atau kesulitan dari responden dalam memberikan penilaian yang objektif dan substansial. Petugas di lapangan harus mengalokasikan waktu ekstra untuk memberikan pendampingan dan edukasi terlebih dahulu sebelum masyarakat dapat mengisi survei dengan benar.

B. Upaya Percepatan dalam mencapai target

- Selalu memberikan pelayanan publik prima untuk masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.
- Selalu menerapkan one day sercive konsultasi dan asistensi dalam melaksanakan pelayanan publik.
- Pelayanan publik tidak hanya bersifat offline, tetapi juga bisa secara online untuk memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- Berkomitmen selalu memberikan pelayanan yang mudah, aman, terpercaya dan tidak dipungut biaya.

Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target
Realisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 (empat) kali secara berkala sepanjang tahun 2025 bukan sekadar pemenuhan target administratif, melainkan instrumen strategis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam menjaga akuntabilitas pelayanan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai penilai utama, Balmon Lampung secara nyata mengaktualisasikan semangat Reformasi Birokrasi dan penguatan Zona Integritas, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan prima demi kemaslahatan masyarakat luas di Provinsi Lampung, berikut dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat :

a. Dampak Langsung

Dampak nyata dalam jangka pendek yang dirasakan langsung oleh masyarakat selaku penerima manfaat layanan atas pelaksanaan survei periodik:

- Pelaksanaan survei sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2025 memberikan dampak langsung bagi masyarakat berupa adanya ruang resmi untuk menyampaikan penilaian, kritik, dan saran terhadap kinerja pelayanan Balmon Lampung. Hal ini membuat masyarakat merasa didengar (citizen-centric), sehingga setiap kendala pelayanan di lapangan dapat diidentifikasi secara cepat.

- Melalui pelaksanaan survei yang terbagi dalam 4 periode (triwulanan), Balmon Lampung dapat langsung melakukan evaluasi dan perbaikan berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Dampak langsungnya, masyarakat merasakan perbaikan mutu pelayanan (seperti transparansi waktu pengurusan izin, keramahan petugas, dan kejelasan informasi) yang terus meningkat dari satu triwulan ke triwulan berikutnya.

- Penyampaian hasil survei secara terbuka kepada publik memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi. Masyarakat dapat mengetahui secara objektif nilai kualitas pelayanan (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang diberikan oleh Balmon Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sebuah UPT di bawah Ditjen Infrastruktur Digital.

b. Dampak Tidak Langsung

Dampak jangka panjang atau efek domino (multiplier effect) terhadap penguatan

kelembagaan, agenda Reformasi Birokrasi, dan budaya kerja internal di Provinsi Lampung:

- Hasil survei yang dinilai langsung oleh masyarakat menjadi indikator utama pembuktian bahwa Balmon Kelas II Lampung telah bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara tidak langsung, data objektif dari 4 kali survei ini mempercepat pencapaian prasyarat mutlak dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

- Secara tidak langsung, program ini mendorong kedewasaan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada area perubahan penguatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas. Hasil survei menjadi kompas atau benchmark internal untuk merumuskan kebijakan pelayanan yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis digital sesuai kebutuhan masyarakat Lampung ke depan.

- Adanya penilaian berkala secara langsung oleh masyarakat menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan mendorong perubahan pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) seluruh aparatur Balmon Lampung. Petugas pelayanan secara tidak langsung dituntut untuk selalu konsisten menjaga integritas, profesionalisme, dan menjauhi perilaku maladministrasi (seperti pungli atau gratifikasi).

- Konsistensi dalam mengukur kepuasan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap kredibilitas pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital di wilayah Provinsi Lampung.

11.5 Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung.

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja IKM/IPKP menjadi pondasi dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

11.6 Rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya

Berdasarkan hasil analisis capaian indeks dan evaluasi pelaksanaan survei pada tahun berjalan, terdapat sejumlah rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung pada tahun berikutnya. Rekomendasi ini disusun untuk memperkuat integritas, meningkatkan kepuasan masyarakat, memperbaiki persepsi anti korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Rekomendasi perbaikan ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan program kerja dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.

11.7 Efisiensi

Efisiensi juga terlihat dari pemanfaatan SDM secara optimal. Petugas pelayanan dan tim pengumpulan data tidak memerlukan tambahan tenaga khusus karena sistem survei yang berbasis digital sudah otomatis mengelompokkan dan mengolah data. Dengan demikian, SDM dapat difokuskan pada peningkatan kualitas interaksi pelayanan dan penyelesaian aduan masyarakat, yang secara langsung berdampak pada peningkatan nilai IKM/IPKP.

11.8 Implementasi Budaya BerAKHLAK

Dalam penyelenggaraan kegiatan Survei Kepuasan Pelayanan Publik kepada Masyarakat, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio. Melakukan evaluasi kegiatan Survei Kepada Masyarakat untuk perbaikan kegiatan selanjutnya.

- Akuntabel, petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas. Petugas pelayanan

memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

- Kompeten, petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/ kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi.

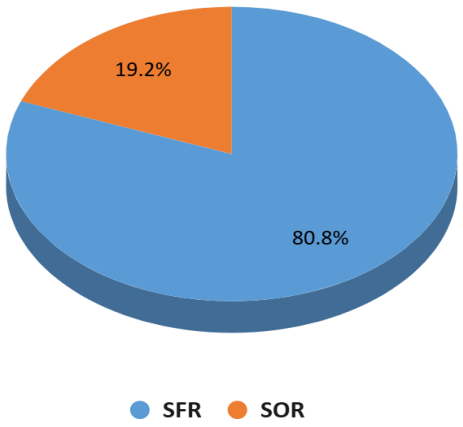
- Harmonis, Petugas mampu memberikan informasi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan client dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat.

- Loyal, taat dan berintegritas dalam menjalankan kegiatan survei sesuai dengan Undang-undang yang ditetapkan.

- Adaptif, Petugas pelayanan tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait aturan yang dapat berubah sewaktu–waktu. Berkontribusi dalam kegiatan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi kepada masyarakat dengan namun mudah dipahami.

- Kolaboratif, petugas berkoordinasi dan bekerjasama dengan pimpinan dipusat dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi terkini terkait kegiatan Survei.

Grafik 3.26
Responden Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025



Grafik 3.27
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat





11.9 Data Dukung

Gambar 3.20
Dokumentasi kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat



12. IKSK-12 Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Balmon SFR Kelas II Lampung, telah dilakukan Survei Integritas Pelayanan Publik sebanyak 4 (empat) kali pelaksanaan yang dimulai dari awal bulan tahun 2025 sampai dengan akhir tahun 2025. Survei ini ditujukan pada penilaian hasil kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan birokrasi pelayanan dari unit kerja yang dinilai secara langsung oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat pelayanan. Hasil Survei ini disampaikan secara terbuka sebagai informasi hasil kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi di Balmon SFR Kelas II Lampung sebagai UPT Ditjen Infrastruktur Digital.

12.1. Latar Belakang

Indikator “Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), mempunyai tugas dan fungsi terkait pelayanan publik yaitu Asistensi, konsultasi pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio, Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio, dan Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Penerima manfaat indikator ini meliputi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berintegritas, serta dapat memenuhi kepentingan dan harapan pengguna layanan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melaksanakan survei kepada pengguna layanan dan stakeholder secara berkala.

12.2. Tabulasi data capaian

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan hingga akhir Tahun 2025, diketahui bahwa indikator kinerja Persentase Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) telah mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat direalisasikan secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

Adapun hasil dari 4 (empat) kegiatan survei yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu seperti berikut:

Tabel 3.25
Hasil Survei Selama Tahun 2025

Indikator	Hasil	Ket
Triwulan 1	3,82	Tercapai
Triwulan 2	3,90	Tercapai
Triwulan 3	3,92	Tercapai
Triwulan 4	3,98	Tercapai

Indikator Kinerja Persentase terlaksananya kegiatan Survei Kepuasan Pelayanan Publik pada 5 Tahun terakhir selalu mencapai target dan realisasi kegiatan 100%.

Tabel 3.26
Hasil Survei Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target	Reaslisasi	Ket
2025	100%	100%	Tercapai
2024	100%	100%	Tercapai
2023	100%	100%	Tercapai
2022	100%	100%	Tercapai
2021	100%	100%	Tercapai

12.3 Analisis Pencapaian Target

Capaian indikator menunjukkan kinerja sangat baik dengan realisasi sebesar 100% pada tahun 2025. Survei menggunakan alat bantu berupa kuesioner berbasis elektronik, dimana responden yang memiliki ISR dan SOR dapat mengisi kuesioner melalui formulir online

Balai Monitor Lampung mengambil Balai Monitor SFR Kelas II Manado sebagai benchmark karena keduanya merupakan UPT Kelas II dan Jumlah Kabupaten dan Kota yang hampir sama. Kedua UPT telah mencapai target program sosialisasi pelayanan publik, Tabel berikut menunjukkan capaian kedua UPT :

Tabel 3.27
Benchmark Capaian Kinerja Dengan UPT Lainnya

IKSK	UPT DJID	Target	Capaian	Realisasi
Presentase (%) Penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelayanan Publik	Balmon Lampung	100%	100%	100%
	Balmon Manado	100%	100%	100%

Benchmark ini menunjukkan bahwa kedua UPT Kelas II telah melaksanakan seluruh target kegiatan Survei Kepuasan Pelayanan Publik dengan baik sehingga mampu mencapai target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan di masing-masing UPT dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

12.4 Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Targe

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target

Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyederhanakan alur perizinan spektrum frekuensi radio secara daring (online), masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Lampung yang memiliki hambatan psikologis berupa kurangnya kemauan untuk mempelajari dan memahami tahapan prosedur yang baru.

Adanya keengganan untuk membaca panduan regulasi membuat sebagian responden secara subjektif langsung menilai bahwa alur perizinan memiliki tahapan yang sangat panjang dan birokratis. Penilaian negatif dalam survei tersebut seringkali bukan disebabkan oleh sistem pelayanan Balmon yang tidak optimal, melainkan berakar dari resistensi mandiri masyarakat terhadap perubahan sistem dan kurangnya minat untuk memahami alur pemrosesan dokumen yang sebenarnya sudah dipangkas menjadi lebih ringkas.

Provinsi Lampung memiliki kontur geografis yang luas, meliputi wilayah pesisir, kepulauan (seperti di pesisir barat dan Lampung Selatan), hingga area pegunungan dan pedalaman. Permasalahan umum berupa keterbatasan infrastruktur jaringan

internet (blank spot) di beberapa daerah tingkat tapak membuat metode pengisian survei yang berbasis digital (online) sulit diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat penerima manfaat (misalnya nelayan tradisional atau pengguna frekuensi di pelosok daerah). Hal ini menghambat perolehan representasi data survei yang sepenuhnya inklusif.

Tingkat pemahaman masyarakat Lampung terhadap pentingnya regulasi spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat telekomunikasi masih belum merata antar-wilayah (perkotaan vs perdesaan). Banyak masyarakat penerima manfaat akhir yang merasa awam dengan istilah teknis operasional Balmon dalam kuesioner. Akibatnya, muncul keengganan atau kesulitan dari responden dalam memberikan penilaian yang objektif dan substansial. Petugas di lapangan harus mengalokasikan waktu ekstra untuk memberikan pendampingan dan edukasi terlebih dahulu sebelum masyarakat dapat mengisi survei dengan benar.

B. Upaya Percepatan dalam mencapai target

- Selalu memberikan pelayanan publik prima untuk masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.
- Selalu menerapkan one day sercive konsultasi dan asistensi dalam melaksanakan pelayanan publik.
- Pelayanan publik tidak hanya bersifat offline, tetapi juga bisa secara online untuk memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- Berkomitmen selalu memberikan pelayanan yang mudah, aman, terpercaya dan tidak dipungut biaya.

C. Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target

Realisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 (empat) kali secara berkala sepanjang tahun 2025 bukan sekadar pemenuhan target administratif, melainkan instrumen strategis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dalam menjaga akuntabilitas pelayanan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai penilai utama, Balmon Lampung secara nyata mengaktualisasikan semangat Reformasi Birokrasi dan penguatan Zona Integritas, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan prima demi kemaslahatan masyarakat luas di Provinsi Lampung, berikut dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat :

a. Dampak Langsung

Dampak nyata dalam jangka pendek yang dirasakan langsung oleh masyarakat selaku penerima manfaat layanan atas pelaksanaan survei periodik:

- Pelaksanaan survei sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun 2025 memberikan dampak langsung bagi masyarakat berupa adanya ruang resmi untuk menyampaikan penilaian, kritik, dan saran terhadap kinerja pelayanan Balmon Lampung. Hal ini membuat masyarakat merasa didengar (citizen-centric), sehingga setiap kendala pelayanan di lapangan dapat diidentifikasi secara cepat.
- Melalui pelaksanaan survei yang terbagi dalam 4 periode (triwulanan), Balmon Lampung dapat langsung melakukan evaluasi dan perbaikan berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Dampak langsungnya, masyarakat merasakan perbaikan mutu pelayanan (seperti transparansi waktu pengurusan izin, keramahan petugas, dan kejelasan informasi) yang terus meningkat dari satu triwulan ke triwulan berikutnya.
- Penyampaian hasil survei secara terbuka kepada publik memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi. Masyarakat dapat mengetahui secara objektif nilai kualitas pelayanan (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang diberikan oleh Balmon Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sebuah UPT di bawah Ditjen Infrastruktur Digital.

b. Dampak Tidak Langsung

Dampak jangka panjang atau efek domino (multiplier effect) terhadap penguatan kelembagaan, agenda Reformasi Birokrasi, dan budaya kerja internal di Provinsi Lampung:

- Hasil survei yang dinilai langsung oleh masyarakat menjadi indikator utama pembuktian bahwa Balmon Kelas II Lampung

telah bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara tidak langsung, data objektif dari 4 kali survei ini mempercepat pencapaian prasyarat mutlak dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

- Secara tidak langsung, program ini mendorong kedewasaan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada area perubahan penguatan kualitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas. Hasil survei menjadi kompas atau benchmark internal untuk merumuskan kebijakan pelayanan yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis digital sesuai kebutuhan masyarakat Lampung ke depan.
- Adanya penilaian berkala secara langsung oleh masyarakat menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan mendorong perubahan pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) seluruh aparatur Balmon Lampung. Petugas pelayanan secara tidak langsung dituntut untuk selalu konsisten menjaga integritas, profesionalisme, dan menjauhi perilaku maladministrasi (seperti pungli atau gratifikasi).
- Konsistensi dalam mengukur kepuasan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap kredibilitas pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital di wilayah Provinsi Lampung.

Melalui upaya percepatan yang terstruktur dan berkelanjutan tersebut, UPT Balai Monitor SFR Kelas II Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi, berintegritas tinggi, serta mampu memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi seluruh pengguna layanan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat konsistensi nilai IIPP, IPAK, dalam memenuhi target kinerja setiap tahunnya.

12.5 Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Pemanfaatan laporan ini tidak hanya sebatas sebagai pengukuran capaian kinerja tahunan, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan, penguatan tata kelola, serta penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.

12.6 Rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya

- Selalu memberikan pelayanan publik prima untuk masyarakat khususnya di Provinsi Lampung dengan tidak menerima segala bentuk gratifikasi dan korupsi.
- Selalu menerapkan *one day sercive* konsultasi dan asistensi dalam melaksanakan pelayanan publik tanpa adanya tambahan biaya.
- Pelayanan publik tidak hanya bersifat offline, tetapi juga bisa secara online untuk memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat serta petugas selalu menghindari terjadinya komunikasi diluar pembahasan perizinan ISR.
- Berkomitmen selalu memberikan pelayanan yang mudah, aman, terpercaya dan tidak dipungut biaya.

12.7 Efisiensi

Efisiensi juga terlihat dari pemanfaatan SDM secara optimal. Petugas pelayanan dan tim pengumpulan data tidak memerlukan tambahan tenaga khusus karena sistem survei yang berbasis digital sudah otomatis mengelompokkan dan mengolah data. Dengan demikian, SDM dapat difokuskan pada peningkatan kualitas interaksi pelayanan dan penyelesaian aduan masyarakat, yang secara langsung berdampak pada peningkatan nilai IIPP/IPAK.

12.8 Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Sosialisasi Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan kegiatan Survei Kepuasan Pelayanan Publik kepada Masyarakat, kami menerapkan budaya BerAKHLAK sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat pengguna Frekuensi Radio. Melakukan evaluasi kegiatan Survei

Kepada Masyarakat untuk perbaikan kegiatanselanjutnya.

- Akuntabel, petugas pelayanan memiliki komitmen tanggungjawab, berintegritas tinggi, jujur, cermat dan teliti serta selalu disiplin dalam melaksanakan tugas. Petugas pelayanan memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan dan kepentingan pribadi.

- Kompeten, petugas pelayanan harus memiliki dan meningkatkan kompetensi/ kemampuan diri dalam segala hal yang diperlukan untuk memberikan pelayanan baik secara teknis, administrasi maupun komunikasi.

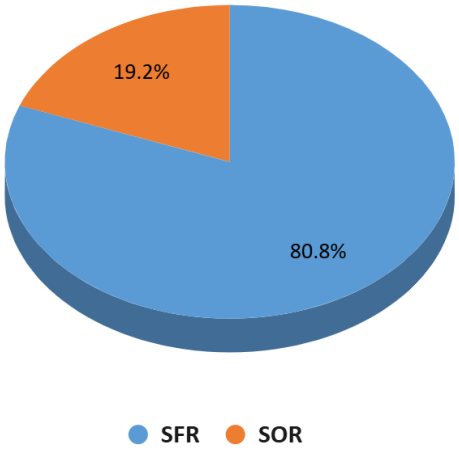
- Harmonis, Petugas mampu memberikan informasi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan client dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat.

- Loyal, taat dan berintegritas dalam menjalankan kegiatan survei sesuai dengan Undang-undang yang ditetapkan.

- Adaptif, Petugas pelayanan tanggap dan mampu mengikuti setiap perubahan terkait atutran yang dapat berubah sewaktu–waktu. Berkontribusi dalam kegiatan untuk menyampaikan setiap perubahan yang terjadi kepada masyarakat dengan namun mudah dipahami.

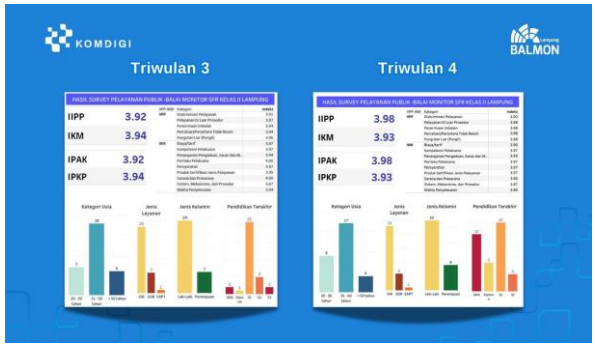
- Kolaboratif, petugas berkoordinasi dan bekerjasama dengan pimpinan dipusat dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi terkini terkait kegiatan Survei.

Grafik 3.28
Responden Survei Integritas Pelayanan Publik Tahun 2025



Grafik 3.29
Hasil Survei Integtiras Pelayanan Publik Tahun 2025





12.9 Data Dukung

Gambar 3.21
Dokumentasi kegiatan Integtiras Pelayanan Publik



13. IKSK - 13 Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Indikator Kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) memiliki target sebesar 100%. Capaian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Lampung pada tahun 2025 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

13.1. Latar Belakang

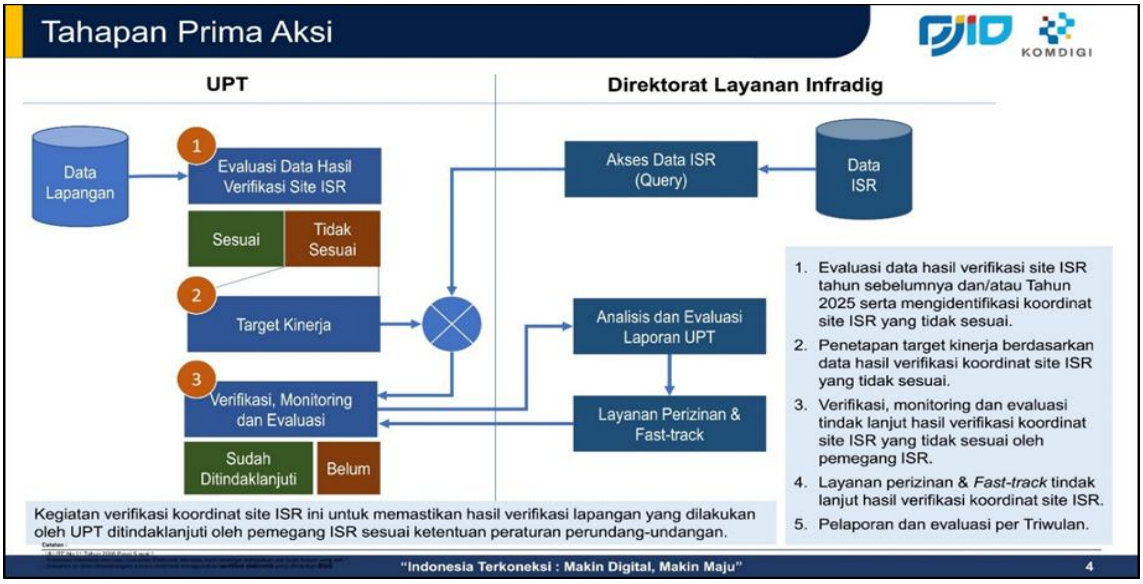
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) memperlihatkan urgensi akan akurasi dan kepatuhan dalam mencatat lokasi fisik dari peralatan telekomunikasi. Dalam lingkungan telekomunikasi yang terus berkembang, kepastian akan posisi yang tepat dari antena *microwave*, dan infrastruktur terkait lainnya menjadi krusial. Hal yang melatarbelakangi kegiatan ini yaitu tingginya penolakan ISR karena hasil analisis teknis berpotensi interferensi atau data ISR tidak sesuai dengan data di lapangan serta belum ada referensi koordinat site ISR sebagai acuan perizinan.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) adalah untuk memastikan bahwa operasinya sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam industri telekomunikasi serta menurunnya penolakan ISR, menurunnya temuan ketidaksesuaian data ISR oleh Unit Pelaksana Teknis (Data ISR sesuai dengan data di lapangan) dan tersedianya referensi koordinat site ISR (MDRS).

Direktorat Layanan Infrastruktur Digital bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan tindak lanjut hasil verifikasi data koordinat site ISR oleh pemegang ISR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Layanan Infrastruktur Digital dapat menyelenggarakan layanan fast-track untuk percepatan layanan perizinan ISR tindak lanjut hasil verifikasi data koordinat site.

Alur proses pembenahan data koordinat adalah sebagai berikut :

Gambar 3.22
Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)



13.2 Tabulasi Data Capaian

Berikut sasaran kegiatan Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) di Balai Monitor SFR Kelas II Lampung selama Tahun 2025 dengan target capaian 100% (merujuk pada Nota Dinas No. 176/DJSDPPI.3/PR.04.07/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Penetapan Kinerja (PK) UPT dan Manual IKU Tahun 2025 terkait Direktorat Operasi Sumber Daya:

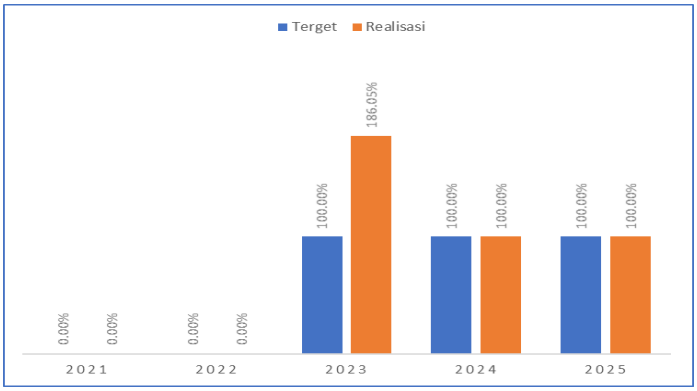
a. Melaksanakan kegiatan Tindaklanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai dengan target 100% dari total seluruh ISR MW Link Tahun 2025 yang tidak sesuai di wilayah kerja Balmon SFR Kelas II Lampung.
b. Mengevaluasi capaian dengan laporan per triwulan

Grafik 3.30
Capaian IK-13 Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Target	100%
Realisasi	100%
Capaian	100%

Grafik 3.31
Perbandingan Realisasi IK-13 Persentase (%) Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) Tahun 2021 – 2025



Balai Monitor SFR Kelas II Lampung melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) sebanyak 214 ISR (target) berdasarkan temuan dari hasil verifikasi koordinat tahun sebelumnya dan telah dilaksanakan sebanyak 214 ISR pada tahun 2025 sehingga capaian Kinerja Balai Monitor Kelas II Lampung mampu mencapai 100% berdasarkan dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.28
Data Hasil Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Periode	Target	Site ISR yang tidak sesuai (target)	Site ISR yang telah ditindaklanjuti (realisasi)	% Realisasi	% Capaian
TW-1	100%	214	0	0.00%	0.00%
TW-2	100%		31	14.49%	14.49%
TW-3	100%		214	100%	100%
TW-4	100%		214	100%	100%
TOTAL		**214**	**214**	**100%**	**100%**

Realisasi Kegiatan verifikasi data koordinat site ISR
(sumber: komin.fo/primaksikoord)

Grafik 3.32
Capaian Kinerja IKSK-13 Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)



13.3. Analisis Pencapaian Target

Keberhasilan capaian Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) sepanjang tahun 2025 melebihi target hingga 100% yaitu mencapai 100% tidak lepas dari beberapa hal yang mendukung yakni antara lain:

- Adanya data dukung yang memadai seperti data SIMS/Profil data ISR Lampung, & data Pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh tim Balmon.
- Pendekatan terhadap stakeholder seperti Operator Seluler dan Penyiaran sangat berpengaruh karena dari Stakeholder didapatkan data master lokasi site atau pemancar yang mereka miliki.
- Penggunaan *tool* tambahan untuk mempercepat proses verifikasi data koordinat seperti MyMaps & Google Maps.
- Sinergitas antar tim yang melaksanakan kegiatan verifikasi data koordinat di lapangan.

Pada tahun 2025 telah tercapai target verifikasi site microwave link yang tidak sesuai (Prima Aksi) mencapai 100% sebanyak 214 ISR.

Berikut contoh benchmarking IKSK-13 Verifikasi Site Microwave Link yang tidak sesuai Tahun 2025 antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado:

Aspek Perbandingan	Balmon SFR Kelas II Lampung	Balmon SFR Kelas II Manado
Target Indikator Kinerja	100%	100%
Capaian Kinerja	Realisasi 100%	Realisasi 125%
Target	214 ISR	228 ISR
Realisasi	214 ISR	338 ISR
Status verifikasi site Microwave Link	214 Penyesuaian ISR	215 Penyesuaian ISR, 123 Digudangkan

Berdasarkan perbandingan tersebut, kedua UPT menunjukkan kinerja verifikasi site microwave link yang sangat baik dengan realisasi yang melampaui target indikator yang ditetapkan.

13.4. Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

a. Kendala/Hambatan

Adapun kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan data hasil monitoring dan inspeksi site, karena tidak seluruh lokasi dapat dijangkau akibat keterbatasan waktu serta sebagian besar inspeksi dilakukan dengan metode remote site. Selain itu, keterbatasan visibilitas lokasi site pada proses deskwork analysis menggunakan Google Maps, khususnya di wilayah terpencil atau dengan kondisi lingkungan tertentu, juga menjadi hambatan dalam verifikasi visual. Kendala lainnya adalah belum cepatnya tindak lanjut dari sebagian operator terhadap temuan koordinat site yang tidak sesuai.

Untuk mengatasi hal tersebut, Balmon Lampung melakukan upaya percepatan melalui koordinasi intensif dan penyampaian surat resmi kepada operator seluler agar segera melakukan perbaikan data ISR atau penggudangan ISR sesuai ketentuan. Upaya ini berdampak pada meningkatnya akurasi data perizinan, tertibnya administrasi ISR Microwave Link, berkurangnya potensi gangguan dan konflik penggunaan spektrum frekuensi radio, serta terwujudnya tata kelola pengendalian infrastruktur telekomunikasi yang lebih akuntabel dan andal bagi masyarakat

b. Upaya Percepatan Target

Berdasarkan evaluasi dari kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) tahun sebelumnya, tim Balmon Lampung telah menyusun strategi inovasi pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun berjalan seperti sebagai berikut :

1. Memperbanyak data master site sebagai referensi dalam verifikasi site ISR Microwave Link baik dari *stakeholder* terkait maupun dari sumber lainnya yang terpercaya;
2. Lebih intens dalam pengamatan melalui *tool* seperti MyMaps atau Google Maps untuk mempercepat verifikasi;
3. Melakukan analisis data pembanding antara data profil SIMS, Data master site dari Stakeholder dengan data Pengamatan melalui MyMaps atau Google Maps;
4. Melakukan penandaan lokasi di MyMaps untuk memudahkan analisis dan verifikasi serta mengurangi resiko data terverifikasi secara berulang.
5. Melakukan verifikasi data secara on-site.

c. Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target

Capaian kinerja verifikasi site ISR Microwave Link pada tahun 2025 telah terealisasi sepenuhnya sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa seluruh ketidaksesuaian data teknis pada site Microwave Link telah diverifikasi dan ditindaklanjuti secara tuntas melalui mekanisme PrimaAksi. Kondisi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap akurasi data base stasiun radio nasional sehingga potensi tumpang tindih penggunaan kanal frekuensi dapat dieliminasi secara efektif di wilayah Lampung.

Tercapainya target 100% ini memberikan manfaat nyata bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam mendapatkan kepastian parameter teknis yang sesuai dengan izin stasiun radio yang dimiliki. Validitas data yang terjaga melalui verifikasi lapangan berperan penting untuk menjamin kualitas koneksi Microwave Link sebagai tulang punggung infrastruktur telekomunikasi daerah. Dampak jangka panjang dari ketuntasan tindak lanjut ini adalah terciptanya efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio yang lebih optimal untuk mendukung keandalan jaringan komunikasi digital bagi masyarakat luas

13.5. Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja

Tindak lanjut atas indikator kinerja Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) dilaksanakan dengan menyampaikan hasil verifikasi koordinat site ISR yang tidak sesuai kepada klien pemegang ISR Microwave Link. Klien diminta untuk segera melakukan pembaruan data ISR agar sesuai dengan kondisi di lapangan, atau melakukan penggudangan ISR apabila site tersebut sudah tidak digunakan.Selanjutnya, data ISR yang telah diperbarui atau dihentikan dijadikan sebagai dasar pemutakhiran data dalam sistem, sehingga informasi yang tercatat menjadi lebih akurat. Tindak lanjut ini diharapkan dapat menurunkan tingkat penolakan ISR, mengurangi temuan ketidaksesuaian data oleh UPT, serta menyediakan referensi koordinat site ISR (MDRS) yang valid dan dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pengawasan selanjutnya.

13.6. Rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya

Untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link ke depan, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan klien pemegang ISR agar pembaruan atau penghentian ISR dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu pemanfaatan referensi koordinat site ISR (MDRS) perlu terus dioptimalkan sebagai acuan bersama dalam proses verifikasi dan pengawasan. Penyempurnaan mekanisme penyampaian hasil verifikasi serta peningkatan pemutakhiran data secara berkala juga direkomendasikan guna meminimalkan ketidaksesuaian data dan menurunkan potensi penolakan ISR pada proses selanjutnya.

13.7. Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut verifikasi data koordinat site ISR Microwave Link yang tidak sesuai, dilakukan beberapa cara berikut:

- Menerapkan teknologi seperti perangkat GPS yang akurat dan perangkat lunak seperti Mymaps dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pengumpulan data koordinat. Serta membantu meningkatkan efisiensi.
- Memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman dalam kegiatan verifikasi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data koordinat. Tim yang efisien dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat.
- Mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda, seperti pemetaan satelit, data survey lapangan, dan database internal perusahaan, dapat membantu menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang lokasi *site* telekomunikasi.
- Berkolaborasi dengan pemilik site, otoritas regulasi, dan penyedia layanan telekomunikasi lainnya dapat membantu dalam pengumpulan informasi yang diperlukan secara lebih efisien. Berbagi data dan sumber daya juga dapat meningkatkan efisiensi.
- Membuat dan menerapkan standar operasional yang jelas dan terstruktur untuk kegiatan verifikasi data koordinat dapat membantu meningkatkan konsistensi, akurasi, dan efisiensi proses tersebut

Kegiatan tindak lanjut verifikasi data site ISR Microwave Link yang tidak sesui pada tahun 2025 tidak menggunakan anggaran sama sekali dalam pencapaian targetnya, tetapi target mencapai 100%.

13.8. Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)

Implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam kegiatan verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi). Berikut adalah beberapa contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan prinsip-prinsip ini:

- **Berorientasi Pelayanan**: Tim yang terlibat dalam verifikasi data koordinat harus memiliki fokus yang kuat pada kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan. Mereka harus siap untuk memberikan pelayanan yang baik dan responsif dalam menjawab pertanyaan atau kebutuhan terkait dengan data koordinat.
- **Akuntabel**: Proses verifikasi data koordinat harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pencatatan yang akurat dari setiap langkah dalam proses verifikasi, serta memastikan bahwa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji ulang.
- **Kompeten**: Tim yang melakukan verifikasi data koordinat harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam Teknik pengukuran, penggunaan perangkat lunak seperti Mymaps, dan pemahaman yang baik tentang regulasi telekomunikasi yang relevan.
- **Harmonis:** Kerja sama yang harmonis antara anggota tim dan dengan pihak lain yang terlibat dalam proses verifi kasi, seperti pemilik site, operator jaringan, dan otoritas regulasi, sangat penting. Ini akan memastikan bahwa proses berjalan lancar dan tanpa hambatan.
- **Loyal**: Anggota tim harus mematuhi standar etika profesional dan kode perilaku yang relevan dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus berkomitmen untuk bertindak secara jujur dan terpercaya dalam semua aspek kegiatan verifi kasi data koordinat.
- **Adaptif:** Tim harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kondisi yang mungkin terjadi selama proses verifi kasi. Ini bisa termasuk mengatasi kendala teknis, perubahan cuaca, atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi akses ke site telekomunikasi.
- **Kolaboratif:** Kolaborasi yang efektif antara anggota tim dan dengan pemangku

kepentingan lainnya, seperti pemilik site, operator jaringan, dan badan regulasi, dapat meningkatkan keberhasilan dan efi siensi proses verifikasi. Hal ini termasuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

13.9. Data Dukung

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator *"Persentase (%) Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)"* telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).

Gambar 3.23
Kegiatan Verifikasi Site ISR Microwave Link yang Tidak Sesuai (Prima Aksi)



1.1. Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

1. IKSK-1 Nilai Kinerja Anggaran UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Tahun 2025

Latar Belakang

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung selaku UPT Ditjen Infrastruktur Digital mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Lampung meliputi 15 Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut, perlu didukung oleh Subbagian Umum dalam hal keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan. Sasaran kinerja yang menjadi target perjanjian kinerja Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien indikatornya adalah nilai kinerja anggaran Ditjen Infrastruktur Digital dengan target sebesar 97%. Indikator nilai kinerja anggaran Ditjen Infrastruktur Digital pada Kementerian Komunikasi dan Digital meliputi kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran, dengan didukung oleh monitoring dan evaluasi sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tujuan Pengukuran Kinerja IKPA yaitu:

1. Kelancaran pelaksanaan anggaran meliputi pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat dan kebijakan dispensasi SPM.
2. Mendukung manajemen kas meliputi pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, Renkas

RPD, deviasi halaman III Dipa dan Return SP2D.

3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan meliputi penyampaian LPJ bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja.

Tabulasi Data Capaian

1.2. Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 2 komponen yaitu Nilai Kerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 sebesar 86.95.

Formula yang digunakan untuk menghitung realisasi NKA yaitu sebagai berikut :

50%*NK Perencanaan DIPA Baru* + *50%*NK Pelaksanaan (Rata-rata Baru + Lama)

1.3. Berikut realisasi pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berdasarkan aplikasi e-Monev Kementerian Keuangan (monev.kemenkeu.go.id)

Gambar 3.24 (Dipa Lama)



Gambar 3.25 (Dipa Baru)



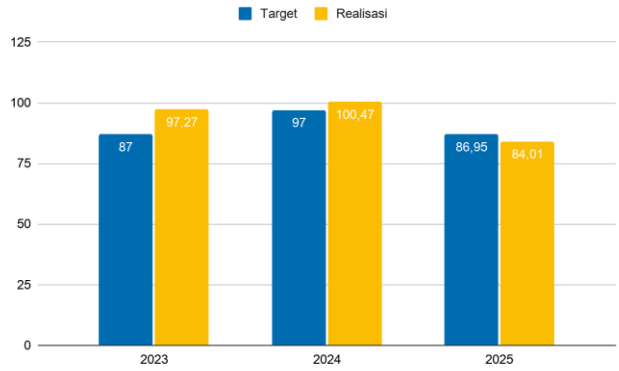
Berdasarkan data-data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

Nilai Kinerja Anggaran = 50% * 75 + 50% * ((95,84+90,19)/2) = 84,01

Realisasi kurang maksimal dikarenakan adanya nomenklatur baru dan efisiensi anggaran sehingga menyebabkan deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk kegiatan yang menggunakan SBK melebihi batas yang ditentukan (deviasi maksimal 20%)

Berikut perbandingan target, realisasi dan capaian Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran periode tahun 2023 s/d 2025 pada grafik berikut :

Grafik 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi NKA



Analisis Pencapaian Target

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan anggaran di atas sesuai dengan adanya kualitas perencanaan (revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA) dan kualitas pelaksanaan (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM) yang baik.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui belanja kontraktual dapat dilaksanakan secara terjadwal dengan rekanan pihak ketiga dengan pola penyelesaian tagihan yang juga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, hal tersebut sejalan dengan pengelolaan UP dan TUP tepat waktu. Sehingga dapat melakukan pembayaran untuk penyelesaian tagihan dengan tidak adanya penolakan SPM oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Apabila dibandingkan dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado, didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 3.29
Benchmarking Kit

UPT	Target	Realisasi	Capaian
Lampung	86,95	84.01	96,62
Manado	86,95	86,20	99,14

Untuk Target NKA Tahun 2025 sebesar 86,95, dan tidak dapat dicapai oleh kedua UPT. realisasi UPT

Lampung lebih rendah dari UPT Manado, capaian tersebut karena masih kurang optimalnya kolaborasi dari pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan yang saling bersinergi. Besar harapan kedepan untuk memperbaiki kolaborasi antara pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan yang saling bersinergi sehingga rencana kegiatan dan realisasi anggaran dapat bersinergi.

Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

1.4.

Pelaksanaan anggaran Tahun 2025 pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung menghadapi beberapa kendala, terutama adanya perubahan nomenklatur kementerian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian struktur organisasi, program, dan kegiatan yang memerlukan revisi perencanaan anggaran. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menyebabkan adanya perubahan alokasi anggaran dan deviasi antara perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, khususnya pada kegiatan yang menggunakan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK). Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi anggaran belum optimal dan target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) belum tercapai secara maksimal.

Sebagai upaya percepatan capaian target, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia, mempercepat pelaksanaan kegiatan prioritas, meningkatkan koordinasi antara pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif dan efisien.

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target.

- Adanya perubahan nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyebabkan penyesuaian program dan kegiatan.
- Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada perubahan dan pengurangan alokasi anggaran dalam DIPA.
- Deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya pada kegiatan yang menggunakan SBKK melebihi batas maksimal deviasi yang ditentukan.
- Penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran akibat adanya penyesuaian kegiatan dan anggaran.
- Kurangnya optimalisasi kolaborasi dan sinergi antara pengelola anggaran dengan pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan program kerja.

B. Upaya Percepatan dalam mencapai Target.

- Melakukan revisi dan penyesuaian perencanaan kegiatan sesuai kondisi anggaran terbaru.
- Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah tersedia dukungan anggarannya agar penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara rutin dan berkala.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan.
- Mengoptimalkan pengelolaan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan UP/TUP secara tepat waktu.
- Mengendalikan deviasi pelaksanaan anggaran agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

C. Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target

Pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran memberikan dampak positif terhadap tata kelola organisasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pencapaian target juga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan serta pengendalian spektrum frekuensi radio di wilayah Lampung sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

a. Dampak Langsung

Dampak langsung dari pencapaian target antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan dan program kerja dapat berjalan sesuai rencana dan jadwal.

- Penyerapan anggaran menjadi lebih optimal dan tertib administrasi.
- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran.
- Proses pembayaran dan penyelesaian tagihan berjalan tepat waktu tanpa adanya penolakan SPM oleh KPPN.
- Terciptanya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

b. Dampak Tidak Langsung

Dampak tidak langsung dari pencapaian target antara lain:

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung.
- Mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel
- Meningkatkan sinergi dan budaya kerja kolaboratif antarpegawai dalam pelaksanaan kegiatan.
- Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan anggaran pada tahun berikutnya agar target NKA dapat tercapai lebih optimal.
- Mendukung tercapainya transformasi digital dan pelayanan publik yang lebih baik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Tindak lanjut pemanfaatan laporan kinerja

Sebagai bahan perbandingan di laporan kinerja tahun sebelumnya bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah mencapai nilai target PK begitupula untuk tahun ini, dan perbaikan perencanaan anggaran ditahun berikutnya. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan Menyusun laporan kinerja berikutnya dengan tepat waktu

Rekomendasi perbaikan di tahun selanjutnya

Rekomendasi tahun selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun terutama untuk kegiatan yang menggunakan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) sehingga dapat mengoptimalkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKA). Hal tersebut perlu untuk terus dilakukan pada tahun mendatang supaya target NKA dapat tercapai.

Dampak tercapainya indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran untuk masyarakat yaitu masyarakat dapat mendapatkan layanan sesuai kebutuhan melalui program-program yang telah direncanakan dan dijalankan secara efektif dan efisien.

Efisiensi

Dalam pelaksanaan anggaran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah mengupayakan efisiensi melalui optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana secara bersama, serta pengendalian biaya operasional. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian kinerja organisasi.

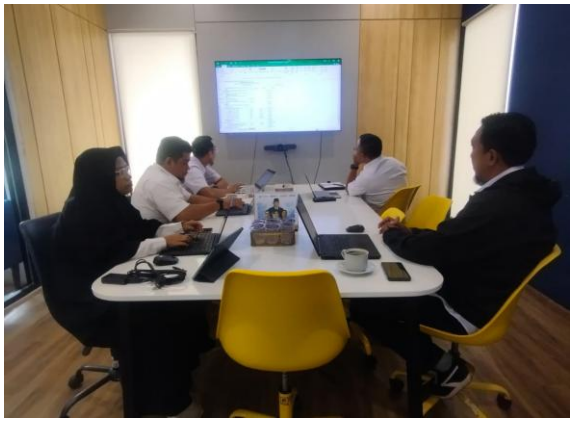
Implementasi Budaya Bernilai BerAKHLAK dalam Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Ber**orientasi Pelayanan, melalui kegiatan pelaksanaan anggaran, tim telah memberikan pelayanan kepada publik secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya dukungan anggaran untuk pelayanan dan konsultasi publik.
2. **A**kuntabel, proses pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. **K**ompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya.
4. **H**armonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama secara sinergis.
5. **L**oyal, pelaksanaan anggaran tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai target maksimal yang diberikan.
6. **A**daptif, dalam pelaksanaan kegiatan, tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang tidak menentu.

7. Kolaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan bekerjasama baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai target output maksimal.

Data Dukung



Gambar 3.27
Dokumentasi Rapat Kinerja Anggaran

1.9.

2. IKSK-2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Latar Belakang

2.1. Laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki peran penting dalam mencerminkan kinerja keuangan dan akuntabilitas suatu instansi atau unit kerja. UAKPA bertugas mengelola anggaran yang telah diberikan kepada mereka sebagai kuasa pengguna anggaran. Laporan keuangan UAKPA mencakup informasi terperinci tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo anggaran, memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu unit dalam periode tertentu.

2.2. Dalam laporan keuangan UAKPA, informasi tentang sumber dan penggunaan dana dijelaskan dengan rinci. Hal ini mencakup penerimaan dana dari berbagai sumber seperti alokasi anggaran, dan pengeluaran dana untuk berbagai kegiatan atau proyek. dengan demikian, laporan keuangan UAKPA menjadi instrumen penting bagi pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, pemerintah, dan pihak eksternal untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu unit dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan keuangan yang berlaku.

Selain itu, laporan keuangan UAKPA juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, dengan menyajikan informasi keuangan secara terperinci dan akurat, laporan ini membantu meningkatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk publik dan pemberi dana. transparansi ini menjadi landasan yang kuat untuk membangun tata kelola keuangan yang baik dan efisien dalam suatu organisasi atau unit kerja. dengan demikian, laporan keuangan UAKPA memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan akuntabilitas penuh.

Tabulasi Data Capaian

Berikut merupakan tabulasi target dan capaian bulanan dari laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Tabel 3.30
Target Bulanan dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

BULAN	TARGET BULANAN	SATUAN	PENJELASAN TARGET
Januari	5	%	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024; 2. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024; 3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
Februari	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024.

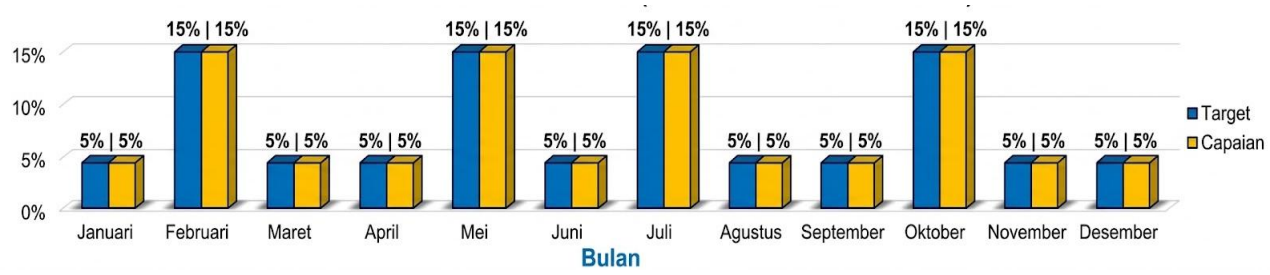
Maret	5	%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
April	5	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan 2. Menerima dan Melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BPK) Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
Mei	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024 Audited; 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d. April TA 2025.
Juni	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025
Juli	15	%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2025.
Agustus	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025.
September	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025.
Oktober	15	%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025.
November	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025.
Desember	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025.

Tabel 3.31
Capaian bulanan dari laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

BULAN	TARGET BULANAN	SATUAN	CAPAIAN	SATUAN	PENJELASAN TARGET
Januari	5	%	5	%	1. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024; 2. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024; 3. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
Februari	15	%	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024.
Maret	5	%	5	%	Koordinasi dalam rangka pemeriksaan
April	5	%	5	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan 2. Menerima dan Melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BPK) Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran(UAKPA).

Mei	15	%	15	%	1. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; 2. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024 Audited; 3. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d. April TA 2025.
Juni	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025
Juli	15	%	15	%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2025.
Agustus	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025.
September	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025.
Oktober	15	%	15	%	1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; 2. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025.
November	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025.
Desember	5	%	5	%	Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025.

Gambar 3.26
Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)



1. Januari a. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Desember TA 2024; b. Penyusunan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran TA 2024; c. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan	5. Mei a. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; b. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2024 Audited; c. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Januari s.d. April TA 2025.	9. September a. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Agustus 2025.

2. Februari a. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan; b. Penyusunan Laporan Keuangan TA 2024.	6. Juni a. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Mei 2025	10. Oktober a. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tingkat Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; b. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025.
3. Maret a. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan	7. Juli a. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) TA 2025; b. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juni 2025.	11. November a. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Oktober 2025.
4. April a. Koordinasi dalam rangka pemeriksaan b. Menerima dan Melaksanakan Hasil Pelaksanaan Tripartit (Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BPK) Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran(UAKPA).	8. Agustus a. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode Juli 2025.	12. Desember a. Rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode November 2025.

2.3.

Analisis Pencapaian Target

Berdasarkan tabulasi target dan capaian bulanan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025, dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan pelaporan keuangan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setiap bulan menunjukkan capaian sebesar 100% dari target bulanan, yang berarti seluruh tahapan kegiatan pelaporan keuangan berhasil dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pada awal tahun, yaitu bulan Januari hingga Maret, kegiatan yang dilaksanakan lebih berfokus pada rekonsiliasi laporan keuangan akhir tahun sebelumnya, penyusunan laporan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta koordinasi dalam rangka pemeriksaan. Seluruh kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga mendukung proses penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2024.

Pada bulan April hingga Mei, kegiatan pelaporan keuangan difokuskan pada tindak lanjut hasil pelaksanaan tripartit antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta penyusunan Laporan Keuangan UAKPA Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit (Audited). Selain itu, pada periode ini juga dilakukan rekonsiliasi eksternal laporan keuangan untuk periode Januari sampai dengan April Tahun Anggaran 2025. Seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai jadwal sehingga mendukung kelancaran proses audit dan pelaporan keuangan.

Selanjutnya pada pertengahan tahun, kegiatan pelaporan keuangan diarahkan pada penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 serta pelaksanaan rekonsiliasi eksternal secara rutin setiap bulan. Kegiatan rekonsiliasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data antara sistem pelaporan keuangan internal dengan sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Pada triwulan ketiga, kegiatan utama adalah penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada bulan Oktober, disertai dengan rekonsiliasi eksternal laporan keuangan periode September 2025. Sementara itu pada bulan-bulan lainnya, kegiatan

difokuskan pada pelaksanaan rekonsiliasi eksternal laporan keuangan secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian kualitas pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, pencapaian target indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang optimal dan konsisten sepanjang tahun, dengan capaian yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Tabel 3.32 Benchmarking

UPT	Target	Realisasi	Capaian
Lampung	97	100	103.09 %
Manado	97	100	103.09 %

Berdasarkan hasil benchmarking, baik UPT Lampung maupun UPT Manado memiliki target nilai kualitas pelaporan keuangan sebesar **97**. Namun demikian, kedua unit kerja tersebut berhasil memperoleh realisasi nilai sebesar **100**, sehingga capaian kinerja yang diperoleh mencapai **103,09%** dari target yang telah ditetapkan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan pada kedua unit kerja telah dilaksanakan dengan sangat baik dan mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan. Capaian ini juga mencerminkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah dilakukan secara tertib, akurat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pengelolaan keuangan negara.

Melalui kegiatan benchmarking ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan secara berkelanjutan serta menjadi sarana pembelajaran antar unit kerja dalam menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2.4. Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan Capaian Target

A. Faktor Kendala/Hambatan Pada Pencapaian Target

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) antara lain masih adanya potensi ketidaksesuaian data dalam proses pencatatan transaksi keuangan, terutama apabila dokumen pendukung yang diterima belum lengkap atau terdapat kekeliruan dalam penggunaan akun belanja. Kondisi tersebut dapat menimbulkan selisih data pada saat pelaksanaan rekonsiliasi internal maupun eksternal.

Selain itu, pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan membutuhkan ketelitian dan ketepatan waktu yang tinggi. Apabila terjadi keterlambatan penyampaian data dari unit terkait, maka dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Dinamika perubahan regulasi dan penyesuaian sistem aplikasi keuangan pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan kemampuan adaptasi dan pemahaman teknis dari petugas pengelola keuangan. Diperlukan komitmen dan konsistensi petugas dan operator dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan tahapan target bulanan yang telah ditentukan

B. Upaya Percepatan dalam Mencapai Target

Dalam rangka mempercepat pencapaian target indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung melakukan beberapa upaya strategis, antara lain meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pengelola keuangan serta unit kerja terkait agar proses penyampaian data dan dokumen pendukung dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.

Selain itu, dilakukan pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan secara rutin dan berkala untuk memastikan kesesuaian data antara laporan internal dengan sistem aplikasi keuangan pemerintah. Upaya lainnya adalah meningkatkan ketelitian dalam proses pencatatan transaksi keuangan, khususnya pada penggunaan akun dan penyusunan neraca, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan maupun selisih data.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga dilakukan melalui pembelajaran mandiri, koordinasi teknis, serta pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis digital guna mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang lebih efektif, cepat, dan akurat.

C. Dampak Yang Dihasilkan Dari Pencapaian Target dan Indikator Kinerja UAKPA terhadap masyarakat

a. Dampak Langsung

Peningkatan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memberikan dampak langsung terhadap terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan, tertib, dan akuntabel di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Melalui penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik.

b. Dampak Tidak Langsung

Secara tidak langsung, kualitas pelaporan keuangan yang baik turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mencerminkan komitmen instansi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional, sehingga masyarakat memperoleh keyakinan bahwa anggaran negara telah digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung pelayanan dan pembangunan di bidang pengawasan serta pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan secara rutin dan konsisten juga memberikan dampak positif dalam meminimalkan potensi kesalahan pencatatan maupun selisih data keuangan. Kondisi tersebut mendukung terciptanya sistem pengendalian intern yang lebih baik, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, seluruh program kerja dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.

Selain itu, keberhasilan pencapaian target indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA yang mencapai 100% setiap bulan menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Capaian tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja internal organisasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.Beberapa faktor yang menentukan pencapaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah komitmen dan konsistensi petugas dan operator dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan tahapan target bulanan yang telah ditentukan. Selain itu kesigapan dan kecermatan dalam memperbaiki setiap selisih ataupun kesalahan pada pelaporan keuangan.

Kendala yang dapat mengurangi pencapaian adalah ketika informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat sehingga berpotensi menjadi selisih akibat kekurangcermatan dalam melakukan pencatatan**.**

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan pencapaian target indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), diantaranya memperbaiki pencatatan neraca dan lebih teliti dalam melakukan pencatatan nomor akun.

Tindak Lanjut Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2024 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja pada tahun 2025. Informasi yang terdapat dalam LAKIN 2024 dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja serta sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan dan pelaporan kinerja pada tahun berikutnya.

Dalam kaitannya dengan indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), beberapa tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2025 antara lain meningkatkan ketelitian dalam proses pencatatan transaksi keuangan, melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara rutin dan tepat waktu, serta memperkuat koordinasi antara unit pengelola keuangan dengan unit kerja terkait. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan dan sistem pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, tindak lanjut dari hasil evaluasi LAKIN 2024 juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan, penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan akurat, serta pelaksanaan rekonsiliasi eksternal secara berkala dengan pihak terkait. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan pencatatan serta meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan.

Dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja dari LAKIN tahun sebelumnya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Rekomendasi Perbaikan di Tahun Selanjutnya

Beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara unit pengelola keuangan dengan unit pelaksana kegiatan guna memastikan kelengkapan dan keakuratan data transaksi keuangan.
2. Melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis aplikasi yang digunakan oleh pemerintah.
3. Meningkatkan ketelitian dalam proses pencatatan transaksi serta melakukan pengecekan berkala terhadap kesesuaian data antara laporan internal dengan sistem aplikasi keuangan pemerintah.
4. Melakukan evaluasi rutin terhadap proses rekonsiliasi internal dan eksternal untuk meminimalkan potensi selisih data.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan yang lebih efektif dan akurat.

Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah dilaksanakan secara efisien melalui pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah serta penerapan prosedur kerja yang terstandar. Dengan memanfaatkan sistem digital dalam proses pencatatan dan pelaporan, proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Selain itu, efisiensi juga tercapai melalui koordinasi yang baik antar pegawai dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan pencatatan serta mempercepat penyelesaian laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Implementasi Budaya Ber-AKHLAK

Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) **Ber**orientasi Pelayanan melalui kegiatan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, Balai Monitor SFR Kelas II Lampung telah menempatkan tanggung jawab atas penggunaan anggaran yang akuntabel sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat secara tidak langsung.

b) **A**kuntabel, proses pelaksanaan anggaran dilakukan dengan baik dan benar sehingga menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.

c) **K**ompeten, kegiatan ini didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya

d) **H**armonis, dalam pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif serta tim kerja yang terus bekerja sama secara sinergis.

e) **L**oyal, pelaksanaan anggaran tersebut melibatkan tim kerja yang loyal dalam mencapai target maksimal yang diberikan.

f) **A**daptif, dalam pelaksanaan kegiatan, tim kerja dengan sigap dan cekatan dalam penyesuaian diri menghadapi perubahan situasi dan kondisi yang tidak menentu.

g) **K**olaboratif, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan bekerjasama baik secara internal maupun eksternal untuk mencapai target output maksimal.

Data Dukung

2.9.

Gambar 3.26
Dokumentasi Rapat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)





Lampung
BALMON

2025

BAB IV
PENUTUP

Penutup
Galeri Kegiatan

PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio, pengawasan perangkat telekomunikasi, serta peningkatan kualitas layanan komunikasi dan digital di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja organisasi selama Tahun 2025 sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan efektivitas pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sepanjang Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan optimalnya pelaksanaan monitoring dan pengawasan spektrum frekuensi radio, meningkatnya kepatuhan terhadap standar teknis perangkat telekomunikasi, serta terjaganya keandalan operasional stasiun monitoring. Selain itu, data hasil pengukuran kualitas layanan komunikasi juga telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam upaya peningkatan mutu layanan komunikasi.

Pada aspek pelayanan publik, pelaksanaan layanan teknis dan administratif, kegiatan sosialisasi, serta survei kepuasan masyarakat dan survei integritas pelayanan publik menunjukkan hasil yang baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi kemudahan akses layanan, kecepatan proses pelayanan, maupun kepastian prosedur pelayanan. Namun demikian, pada aspek tata kelola anggaran masih terdapat indikator Nilai Kinerja Anggaran yang belum sepenuhnya mencapai target sehingga menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja pada periode berikutnya guna mendorong peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

GALERI KEGIATAN



KUNJUGAN
DIREKTUR JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL







UJIAN NEGARA AMATIR RADIO







SOSIALIASI BIMTEK SRC/LRC







PENANGANAN PENCEGAHAN PIUTANG







SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK







SURVEI IKM/IPKP
SURVEI IIPP/IPAK







PEMANTAUAN FREKUENSI RADIO







PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS RADIO







PENERTIBAN NASIONAL TAHUN 2025







PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO







PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN SELULER







MONEV PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS







DIGIWAWE 2025
RAIH 6 PENGHARGAAN











MONEV PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS







BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG

0721-781212

www.balmonlampung.postel.go.id

upt_lampung@postel.go.id

Jl. Kramat Jaya KM 14 No. 09 Hajimena
Lampung Selatan